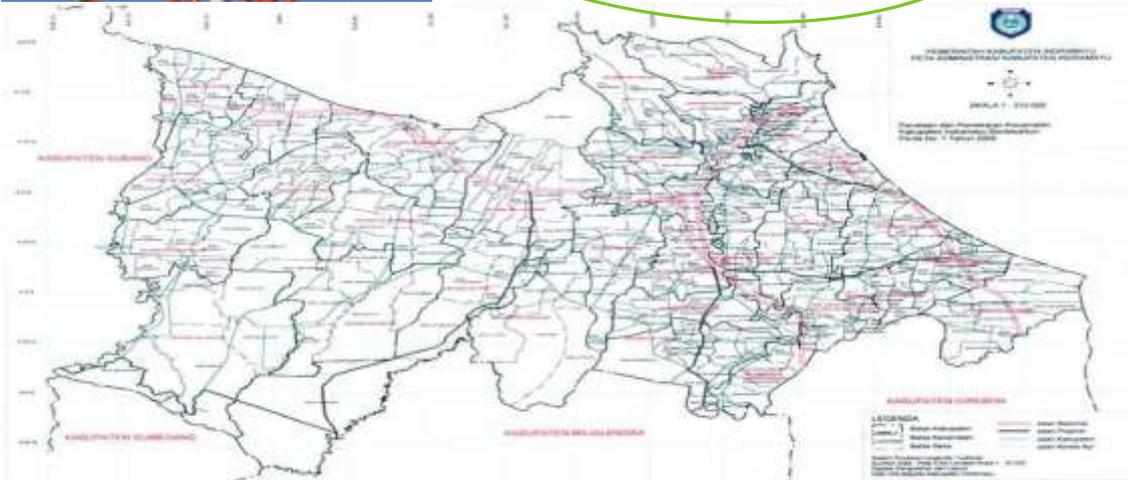




**REVISI RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
DINAS PENDIDIKAN  
Jalan MT. Haryono No. 56 Sindang – Indramayu 45222**

## **TIM PENYUSUN**

Penasehat	:	Bupati dan Wakil Bupati Indramayu
Ketua	:	Dr. H. M. Ali Hasan, M.Pd Kepala Dinas Pendidikan
Sekretaris	:	Dra. Hj. Lily Ulyati, MA Sekretaris Dinas Pendidikan
Kelompok Kerja	:	H. Satori, SE Kepala Sub Bagian PE
Anggota	:	
	1	H. Mardono, S.Sos, M.Si Kabid PLS
	2	Drs. H. Jahirin, M.Si Kabid SD
	3	Dr. A. Sudalim Gymnasthiar, M.Pd Kabid SMP
	4	H. A. Banani, S.Pd.I, M.Si Kabid PNF
	5	Hajar Iswadi, SE Staf Sub Bagian PE
	6	Ridwan, SE Staf Sub Bagian PE
	7	Daryono, SE Staf Sub Bagian PE
	8	Romli Staf Sub Bagian PE
	9	Novi Muhandianti, A.Md Staf Sub Bagian PE

## KATA SAMBUTAN



Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa penyusunan Revisi Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Revisi Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 ini, dikembangkan dan disusun dengan berpedoman pada Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021. Di samping itu pengembangan dan penyusunannya juga mempertimbangkan Grand Design Pembangunan III Kabupaten Indramayu 2016-2020. Selanjutnya Renstra Pendidikan Kabupaten Indramayu ini akan dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Indramayu.

Disadari sepenuhnya bahwa isi Revisi Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritikan dan saran dari semua pihak agar dapat kami gunakan bahan untuk menyempurnakan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga.

Indramayu, 16 Oktober 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

Dr. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.: 19601108 198109 1 005

## KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Kabupaten Indramayu 2016-2021 disusun melalui beberapa tahap kegiatan. Pertama, disusun Renstra Pendidikan Kabupaten Indramayu 2016-2021 yang dilakukan setelah melalui kegiatan koordinasi penyusunan rancangan bersama dengan seluruh Kepala Bidang beserta Seksinya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, serta Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Dalam Kegiatan yang sama diseminarkan pula isu-isu strategis pendidikan di Indramayu dengan melibatkan Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu. Kedua, Setelah diterbitkannya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021, dilakukan revisi atas Renstra berpedoman pada RPJMD yang dimaksud. Ketiga, draft hasil revisi Renstra Pendidikan Kabupaten Indramayu 2016-2021 selanjutnya disosialisasikan ke seluruh Bidang dan UPT yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan. Keempat, draft Renstra yang telah direvisi berdasar masukan dan saran Bidang serta UPT, disosialisasikan. Selanjutnya melalui beberapa kali konsultasi dengan Bappeda Kabupaten Indramayu dilakukan perbaikan akhir dan naskah Revisi Renstra Pendidikan Kabupaten Indramayu 2016-2021 siap untuk disahkan.

Sistematika Revisi Renstra Pendidikan Kabupaten Indramayu 2016-2021 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, dan berbeda dengan sistematika Revisi Renstra Pendidikan Kabupaten Indramayu periode sebelumnya. Keterbatasan waktu dan kurang lengkap data menjadi kendala utama bagi tercapainya kesempurnaan Renstra Pendidikan Kabupaten Indramayu ini.

Selain sebagai dokumen perencanaan, Renstra mempunyai manfaat lain yang bersifat informatif bagi berbagai pihak yang peduli dengan pembangunan pendidikan. Sehingga, dengan manfaat ganda yang dimilikinya, Renstra merupakan dokumen perencanaan yang penting yang mempunyai nilai strategis. Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran pendidikan serta para pemangku kepentingan pendidikan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan.

Akhirnya semoga apa yang telah tersusun memberikan kemanfaatan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu.

Indramayu, 16 Oktober 2017

TIM PENYUSUN



## PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56, Telp. (0234) 274190  
Fax (0234) 274190, e-mail : disdik\_imy@yahoo.com

**INDRAMAYU**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 420/KEP.....-SEKRET  
TENTANG  
REVISI RENCANA STRATEGIS 2016-2021  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu, dan untuk menjamin terselenggaranya Pembangunan Pendidikan yang efektif, terarah dan berkelanjutan, maka diperlukan adanya Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Revisi Rencana Strategis tersebut dijadikan pedoman dalam upaya mewujudkan peningkatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Indramayu dengan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada dalam masyarakat serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam kerangka otonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subag dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

- Tahun 2003 tentang Keuangan negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
  16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2

- Tahun 2003 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Indramayu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Melek Huruf di Kabupaten Indramayu;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Revisi Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Revisi Rencana Strategis 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, merupakan pedoman bagi semua jajaran Penyelenggara Pendidikan di Kabupaten Indramayu
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku setelah ditetapkan.

Ditetapkan di : INDRAMAYU  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

Dr. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NP.: 19601108 198109 1 005

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Kepala Dinas Keuangan Daerah Kab.Indramayu.

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SK RENSTRA	iv
DAFTAR ISI	vii
SUMMARY	ix
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB II. GAMBARAN PELAKSANAAN SKPD	16
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	18
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan	23
2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok sasaran Dinas Pendidikan	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan	49
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	56
3.1. Evaluasi masa lalu (Hasil-hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya)	56
3.2. Analisa masalah dan isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan	60
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	71
4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan	71
4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	79
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan	89

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.	94
5.1. Rencana Program dan Kegiatan	94
5.2. Indikator Kinerja	101
5.3. Kelompok Sasaran	102
5.4. Pendanaan Indikatif	109
BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.	115
6.1. Target Indikator Kinerja	115
6.2. Kerangka Pendanaan	121
BAB VII. PENUTUP	146
DAFTAR PUSTAKA	

## **SUMMARY**

*Education Office of Indramayu Regency is one of Region Organizations Instruments of West Java Province. It's located in North Java Strip. Geographically it's located between 107.52° and 108.36° EL also between 6.15° and 6.40° SL. The longest distance from North to South has 40 km and the longest distance from West to East has 70 km, spread along of North Sea Strip of Java Island. It's temperature quite high ranging between 18°C – 28°C. The population has about 1,718,495 people in 2015 consist of 196,195 between 7-12 years old, 98,412 between 13-15 years old, and 92,693 between 16-18 years old.*

*Education program 2017-2021 as the agent of social change focus on the vision, mission and target that was formulated in the revision of Strategic Planning, while the budget has been allocated about Rp 1,000,735,595,337.00. It's 34.84% from the total of GRP 2015 about Rp 2,872,005,363,742.00 in 2016 education budget about Rp 951,097,776,482.00 about 28.06% from the total of GRP 2016 about Rp 3,389,085,937,592.00.*

*The vision of the development of Indramayu regency is “To actualize Indramayu society who are religious, progress, independent, and prosperous to create regional advantages”. For the sake effort of to be five strategic objectives education consisted, i.e. (1) strategic objectives education service the equitable and affordable; (2) increase professionalism and accountability implementation and management of education; (3) setting the moral education leaders and professionals; (4) establish a network of multicultural religious education improvement; and (5) establish and develop information systems education.*

*Our development of education was based on full human character building. It will optimize the capacity of human capital potential, that consist of the three base humanity i.e (1) affective that can reflects on quality of faith, piety, excellent personality. And esthetics competency; (2) cognitive*

*that can reflects on thinking capacity and the power of intellectuality for study and developing also mastering the science and technology; and (3) psichomotorics that can shows on the ability to develops technical skill, peactical skill, and kinestetics potency.*

*The human capital development is directed for development of the six core business i.e agribusiness, ocean business, manufacture industry, service industry, tourism and human resource development. Regionally, the local development based on space management and providing optimal regional infrastructure i.e. (1) pre primary school program; (2) 9 year compulsory (elementary) education program; (3) Non-formal education program; (4) quality improvement of teachers and education personnel program; (5) service education management program; (6) special service education program; and (7) other management programs.*

*The recommendation in planning and level of disaggregation of information that consumes daily must adaptating with the factual condition continually. Therefore, by paying attention to some limited data then our need research agenda was needed of updating and modifying of planning across sectors and region which has planned continually. Futhermore we need to update the model of relation among sectors and regions including schools, students, and human resource education data.*

## RINGKASAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat yang terletak dijalur pantai utara pulau jawa, secara Geografis terletak antara 107,52° dan 108,36° BT serta 6,15° dan 6,40° LS. Jarak terpanjang menurut garis lurus Utara Selatan adalah 40 km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah 70 km, membentang sepanjang pesisir pantai utara pulau jawa membuat suhu cukup tinggi berkisar antara 18°C – 28°C. Jumlah penduduk tahun 2015 tercatat sebanyak 1.718.495 orang. 196.195 orang berusia 7-12 tahun, 98.412 orang berusia 13-15 tahun, dan 92.693 orang berusia 16-18 tahun.

Pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju, maka perlu direformulasikan kembali isu strategis dan prioritas pembangunan bidang pendidikan agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2017 tetap mengarah kepada pencapaian visi, misi dan target yang ditetapkan dalam Revisi Renstra, sementara itu Pemerintah Kabupaten Indramayu telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 1.000.735.595.337,00 (34,849%) dari Total Belanja APBD 2015 sebesar Rp 2.872.005.363.742,00 Pada tahun 2016 alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 951.097.776.482,00 (28,06%) dari Total Belanja APBD 2016 sebesar Rp 3.389.085.937.592,00.

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Kabupaten Indramayu adalah: “ **Terwujudnya masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah**” yang ditandai dengan perikehidupan masyarakat yang sehat jasmani, rohani dan sosial baik secara individu, komunitas maupun system kehidupannya yang diharapkan dapat menjadi daerah yang memiliki stabilitas politik dan keamanan yang mantap. Upaya mewujudkan 5 (lima) sasaran strategis pendidikan yang terdiri dari (1)

Menyediakan Layanan Pendidikan Yang Merata dan Terjangkau; (2) Meningkatkan Profesionalitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan; (3) Menyiapkan Pemimpin Pendidikan yang Bermoral dan Profesional; (4) Membangun jaringan kerja perbaikan pendidikan multikultural yang agamis; dan (5) Membangun dan mengembangkan sistem informasi pendidikan.

Pembangunan pendidikan didasarkan pada membangun manusia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Prasyarat pembangunan tersebut diarahkan untuk pengembangan 6 *core business* yaitu agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, industri jasa, pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia. Secara kewilayahan pembangunan daerah tersebut harus didasarkan pada penataan ruang dan penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai antara lain : (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; (3) Program Pendidikan Non-formal; (4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan; (5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; (6) Program Pendidikan Layanan Khusus; (7) Program Manajemen Lainnya.

Rekomendasi dalam perencanaan serta tingkat disagregasi informasi yang digunakan harus secara terus menerus disesuaikan dengan perkembangan kondisi faktual. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan berbagai batasan terutama menyangkut ketersediaan dan

kualitas data yang digunakan, maka agenda riset yang diperlukan adalah sebagai berikut. :

- 1)** Perlu adanya updating dan modifikasi secara terus menerus terhadap model perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah yang telah disusun.
- 2)** Perlu riset lanjutan untuk melakukan pemutakhiran model keterkaitan lintas sektor dan lintas daerah dengan memperhitungkan data dan informasi mikro berupa data sekolah, siswa dan tenaga pendidik sebagai proxi terhadap perubahan perilaku dari para praktisi pendidikan.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data PNS berdasarkan jabatan	23
Tabel 2.2. Data pegawai Struktural berdasarkan eselon	23
Tabel 2.3. Data Guru berdasarkan Penugasan/fungsi	23
Tabel 2.4. Data Pengawas berdasarkan penugasan	24
Tabel 2.5. Data PNS berdasarkan kualifikasi	24
Tabel 2.6. Data PNS berdasarkan golongan	24
Tabel 2.7. Data PNSD berdasarkan penerima Tunjangan	25
Tabel 2.8. Jumlah PAUD menurut jenjang dan siswa	26
Tabel 2.9. Jumlah sekolah menurut jenjang dan siswa	26
Tabel 2.10. Perkembangan anggaran dinas pendidikan	27
Tabel 2.11. Sarana dan prasarana kerja dinas	27
Tabel 2.12. Perkembangan jumlah penduduk	28
Tabel 2.13. Perkembangan Indikator Kinerja	31
Tabel 2.14. Pencapaian kinerja pelayanan dinas	55
Tabel 3.1. Capaian PAUD 2011-2015	59
Tabel 3.2. Capaian Pendidikan Dasar 2011-2015	60
Tabel 3.3. Capaian Pendidikan Menengah 2011-2015	61
Tabel 3.4. Capaian Pendidikan Non Formal 2011-2015	62
Tabel 4.1. Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan	98
Tabel 4.2. Sasaran pokok pembangunan tata kelola	99
Tabel 5.1. Kelompok sasaran pembangunan pendidikan	109
Tabel 5.2. Rencana Program dan Kegiatan	110
Tabel 5.3. Target Indikator Pencapaian kinerja	115
Tabel 5.4. Target Indikator Kinerja Daerah	121
Tabel 5.5. Program dan Kegiatan selaras dengan RPJMD	121
Tabel 6.1. Target Indikator Kinerja Daerah	135
Tabel 6.2. Target Indikator Kinerja berdasarkan Program	136
Tabel 6.2. Program dan Kegiatan selaras dengan Renstra Kemendikbud	135

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Indramayu	17
Gambar 2.2. Struktur Dinas Pendidikan	22

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (GLOSSARY)

A		
APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
APK	=	Angka Partisipasi Kasar
APM	=	Angka Partisipasi Murni
APS	=	Angka Partisipasi Sekolah
ASEAN	=	<i>Assosiation of South East Asia Nations</i>
B		
BAN	=	Badan Akreditasi Nasional
BAN-PNF	=	Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal
BAN-PT	=	Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi
BAN-SM	=	Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah
BANS/BANM	=	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
BAPPENAS	=	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BHP	=	Badan Hukum Pendidikan
BHPP	=	Badan Hukum Pendidikan Pemerintah
BHPPD	=	Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah
BHPM	=	Badan Hukum Pendidikan Masyarakat
BHP Penyelenggara	=	Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara
BMN K/L	=	Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga
BKM	=	Bantuan Khusus Murid
BOP	=	Biaya Operasional Penyelenggara
BOS	=	Bantuan Operasional Sekolah
BOMN	=	Bantuan Operasional Manajemen Mutu
BPK	=	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	=	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar
BPKP	=	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Balai
BPPNFI	=	Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal
BSNP	=	Badan Standar Nasional Pendidikan
C		
CPD	=	<i>Continuing Professional Development</i> atau Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPB)
CTL	=	<i>Contextual Teacing and Learning</i> (Pembelajaran Kontekstual)
D		
D4	=	Diploma 4
DAK	=	Dana Alokasi Khusus
DAU	=	Dana Alokasi Umum
DBH	=	Dana Bagi Hasil
Dekonsentrasi	=	Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat Kepada Gubernur selaku Pemerintah Pusat.
Kemendiknas	=	Kementerian Pendidikan Nasional
Diklatpim	=	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Ditjen	=	Direktorat Jenderal

DKI	=	Daerah Khusus Ibukota
DN	=	Dalam Negeri
DPR	=	Dewan Perwakilan Rakyat
Distance Learning	=	Pembelajaran Jarak Jauh
DSS	=	<i>Decision Support System</i>
E		
EDI	=	<i>Education Development Index</i>
EFA	=	<i>Education for All</i>
EfSD	=	<i>Education for Sustainable Development</i>
G		
GDI	=	<i>Gender-related Development Index</i>
GDLN	=	<i>Global Development Learning Network</i>
Gender	=	kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang social, politik dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, kaya miskin, orang cacat dan tidak, desa kota atau sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki atau perempuan yang dibangun oleh social dan budaya.
H		
HAKI	=	Hak Atas Kekayaan Intelektual
HDI	=	<i>Human Development Index</i>
HET	=	Harga Eceran Tertinggi
HIV	=	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
I		
ICDE	=	<i>International Conference on Data Engineering</i>
IEA	=	<i>International Organization for Evaluation of Educational Achievement</i>
IKK	=	Indikator Kinerja Kegiatan
IKU	=	Indikator Kinerja Utama
Inpres	=	Instruksi Presiden
IPA	=	Ilmu Pengetahuan Alam
IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
IPS	=	Ilmu Pengetahuan Sosial
IPTEK	=	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRDI	=	<i>The Indonesian Research and Development Institute</i>
ISO	=	<i>International Organization for Standardization</i>
ITJEN	=	Inspektorat Jenderal
J		
Jardiknas	=	Jejaring Pendidikan Nasional
K		
KBE	=	<i>Knowledge Based Economy</i>
KBK	=	Kurikulum Berbasis Kompetensi
KKN	=	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KKG	=	Kelompok Kerja Guru
KKKS	=	Kelompok Kegiatan Kepala Sekolah
KKPS	=	Kelompok Kegiatan Pengawas Sekolah
Kopertis	=	Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
KPJM	=	Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
KTSP	=	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

L		
LAKIP	=	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Learning Resources Center	=	Pusat Sumber Belajar
Life Skills	=	Kecakapan Hidup
Life long education	=	Pendidikan sepanjang hayat
Litbang	=	Penelitian dan Pengembangan
Literasi	=	Melek Aksara
LKP	=	Lembaga Kursus dan Pelatihan
LPMP	=	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPTK	=	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LSK	=	Lembaga Sertifikasi Kompetensi
M		
MA	=	Madrasah Aliyah
MAK	=	Madrasah Aliyah Kejuruan
MBM	=	Manajemen Berbasis Masyarakat
MBK	=	Manajemen Berbasis Kinerja
MBS	=	Manajemen Berbasis Sekolah
MDGs	=	<i>Millenium Development Goals</i>
Mendiknas	=	Menteri Pendidikan Nasional
MGMP	=	Musyawahar Guru Mata Pelajaran
Mhs	=	Mahasiswa
MI	=	Madrasah Ibtidaiyah
MKKS	=	Musyawahar Kerja Kepala Sekolah
MKPS	=	Musyawahar Kerja Pengawas Sekolah
Musrenbang	=	Musyawahar Perencanaan Pembangunan Nasional
MTEE	=	<i>Medium Term Expenditure Framework</i> (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah)
MTs	=	Madrasah Tsanawiyah
N		
NAD	=	Nanggroe Aceh Darussalam
NKRI	=	Negara Kesatuan republic Indonesia
O		
OECD	=	<i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
P		
P4TK	=	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAUD	=	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	=	<i>Performance Based Budgetin</i> (Penganggaran berbasis kinerja)
PBJ	=	Pengadaan Barang dan Jasa
PDB	=	Produk Domestik Bruto
PEK	=	Pengembangan Ekonomi Kreatif
Permendiknas	=	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
PIRLS	=	<i>Progress International Reading Literacy Study</i>
PISA	=	<i>Programme for International Student assessment</i>
PKBM	=	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH	=	Pendidikan Kecakapan Hidup

PNBAI	=	Program Nasional Bagi Anak Indonesia
PNBP	=	Pendapatan Negara Bukan Pajak
Posyandu	=	Pos Pelayanan Terpadu
PP	=	Peraturan Pemerintah
PPB	=	Pengembangan Profesional Berkelanjutan
PPPNFI	=	Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal
PT	=	Perguruan Tinggi
PTA	=	Perguruan Tinggi Agama
PTK-PNF	=	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan non formal
PTN	=	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	=	Perguruan Tinggi Swasta
PUG	=	Pengarustamaan Gender
PuPEB	=	Pendidikan untuk Perkembangan Pengembangan dan/atau Pembangunan Berkelanjutan atau <i>Education for Sustainable Development</i> )
Prodi	=	Program Studi
PTK PAUD	=	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
Q		
QS Star	=	<i>Quacouarelli Symonds Star</i>
R		
RA	=	Raudhatul Athfal
RKA-KL	=	Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga
Renstra	=	Rencana Strategis
Renja	=	Rencana Kerja
RI	=	Republik Indonesia
RKB	=	Ruang Kelas Baru
RPJMN	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	=	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPPNJP	=	Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
RSBI	=	Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
S		
S-1	=	Strata 1 (sarjana)
S-2	=	Strata 2 (magister)
S-3	=	Strata 3 (doktor)
Sakernas	=	Survei Angkatan Kerja Nasional
SAI	=	Sistem Akuntansi Instansi
Satker	=	Satuan Kerja
SBI	=	Sekolah Bertaraf Internasional
SD	=	Sekolah Dasar
SDA	=	Sumber Daya Alam
SDLB	=	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	=	Sumber Daya Manusia
Setjen	=	Sekretariat Jenderal
SIM	=	Sistem Informasi
Sisdiknas	=	Sistem Pendidikan Nasional

SKB	=	Sanggar Kegiatan Belajar
SKL	=	Standar Kompetensi Lulusan
SKPD	=	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLB	=	Sekolah Luar Biasa
SM	=	Sekolah Menengah
SMA	=	Sekolah Menengah Atas
SMLB	=	Sekolah Menengah Luar Biasa
SMK	=	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	=	Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	=	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SNP	=	Standar Nasional Pendidikan
SOP	=	Standar Operasi dan Prosedur
SPI	=	Sistem Pengendalian Internal
SPM	=	Standar Pelayanan Minimal
SUKMA	=	Surat Keterangan Melek Aksara
Susenas	=	Survei Sosial Ekonomi Nasional
T		
Tata Nilai	=	Pandangan hidup dan kesepakatan atas norma dalam mengelola organisasi
TBM	=	Taman Bacaan Masyarakat
Tendik	=	Tenaga Pendidik
THES	=	<i>Times Higher Education Supplement</i>
TIK	=	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIMSS	=	<i>Trends in International Mathematic and Science Study</i>
TK	=	Taman Kanak-kanak
TKLB	=	Taman Kanak-kanak Luar Biasa
TUK	=	Tempat Uji Kompetensi
U		
UASBN	=	Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional
UKS	=	Usaha Kesehatan Sekolah
UNSMP	=	Ujian Nasional Sekolah Menengah Perama
UPBJJ	=	Unit Pendidikan Bejara Jarak Jauh
UPT	=	Unit Pelaksana Teknis
USB	=	Unit Sekolah Baru
UU	=	Undang-Undang
UUD 1945	=	Undang-Undang Dasar 1945
V		
Vokasi	=	Keahlian terapan
W		
Wajar	=	Wajib Belajar
WCU	=	<i>World Class University</i>
WDP	=	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	=	Wajar Tanpa Pengecualian
WTO	=	<i>World Trade Organization</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, oleh Karena itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kemerdekaan memberikan janji kepada seluruh anak bangsa lintas generasi, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Janji adalah sesuatu yang harus dilunasi. Janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menempatkan pembangunan pendidikan menjadi isu pokok

dan agenda utama tiap periode pemerintahan. Janji kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum lebih memperkuat keniscayaan itu. Arti penting pembangunan pendidikan juga merupakan pelaksanaan amanat Konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya melunasi janji kemerdekaan dan kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan. Visi Pendidikan Nasional pun menjadi semakin jelas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang

menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025. Penyelarasan tema dan fokus pembangunan pendidikan tiap tahap kemudian dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025. Dalam perencanaan jangka menengah, masih dimungkinkan adanya penyesuaian atau perbaikan tema sesuai dengan kondisi terkini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tiap periode pemerintahan, serta Rencana Strategis Kementerian yang ditugaskan. Tema-tema pembangunan pendidikan tiap tahap menurut Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 yang diselaraskan dengan tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, selain itu pembangunan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan.

Di era otonomi daerah saat ini, tuntutan dalam bidang pendidikan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan

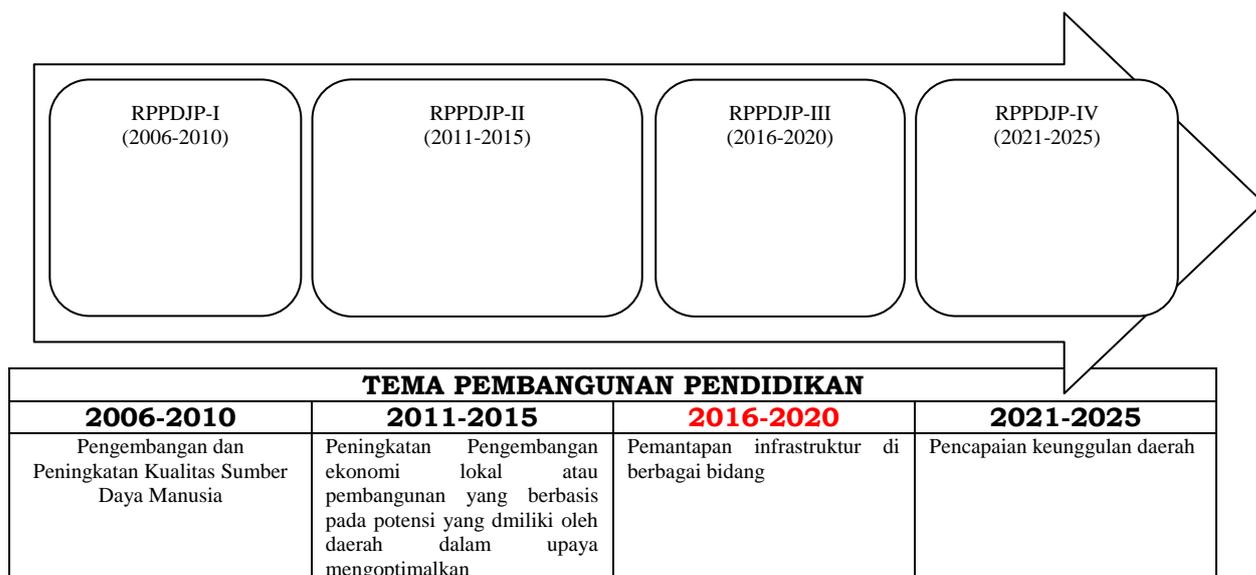
pembangunan pendidikan yang menjamin **ketersediaan** layanan pendidikan, memperluas **keterjangkauan** layanan pendidikan, meningkatkan **kualitas** dan relevansi pendidikan, mewujudkan **kesetaraan** bagi semua warga negara dalam layanan pendidikan dan menjamin **kepastian** layanan pendidikan. Kondisi ini menuntut suatu perencanaan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang akurat, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan kebijakan, strategi, program maupun kegiatan pembangunan dapat mengakomodir kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan di daerah.

Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang transparan dan akuntabel mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berorientasi pada pemecahan masalah. Oleh karena itu kecermatan dan ketelitian mengidentifikasi permasalahan/isu-isu strategis di daerah menjadi faktor penting dalam proses tahapan perencanaan pembangunan pendidikan.

Pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPD tersebut, OPD-Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Daerah Jangka Panjang (RPPDJP) 2005-2025..

RPPDJP telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2006-2010) dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; tema pembangunan II (2011-2015) dengan fokus pada peningkatan pengembangan ekonomi lokal atau pembangunan yang berbasis pada potensi yang dimiliki oleh daerah dalam upaya mengoptimalkan kesejahteraan; tema pembangunan III (2016-2020) dengan fokus pada pemantapan infrastruktur diberbagai bidang; dan tema pembangunan IV (2021-2025) dengan fokus pada pencapaian keunggulan daerah. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya perlu disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMD 2016-2021 serta perkembangan kondisi yang akan datang.

RPJMD Tahun 2016-2021 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Indramayu di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMD Tahun 2016-2021 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Revisi Renstra OPD-Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021. Revisi Renstra OPD-Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan di UPTD dan sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan.



Gambar 1.1. Tema Pembangunan Pendidikan 2006-2025

Otonomi daerah dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta pendayagunaan potensi daerah secara optimal, secara serasi, dinamis dan bertanggung jawab dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh. Dengan demikian, fokus otonomi adalah pembangunan dalam arti luas, termasuk di dalamnya pembangunan pendidikan. Sepenuhnya menjadi kewajiban daerah pula untuk mengupayakan kelancaran jalannya pembangunan pendidikan pada umumnya dan pendidikan dasar dan menengah pada khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah masing-masing.

Dalam kerangka pembangunan daerah, Renstra Dinas Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena akan

berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana. Pada tahun 2016-2021, penyusunan Revisi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu masih mengacu kepada Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tahun 2014 – 2019.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

- (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
  14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  16. Peraturan Pemerintah No. 27, 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Nasional;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  18. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun tentang Peran serta masyarakat Pendidikan Dalam Pendidikan Nasional;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 5);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
34. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2016).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Revisi Rencana Strategis adalah untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan yang telah ditetapkan demi mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Tujuan dari penyusunan Revisi Rencana Strategis ini adalah;

1. Sebagai pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 dengan Revisi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
3. Memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu hingga 5 (lima) tahun ke depan;
4. Menjadi acuan/kerangka dasar bagi Dinas Pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan;
5. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan pedoman, maka dalam penyusunan Revisi Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

Tahun 2016-2021 mempergunakan sistematika penulisan sebagai berikut;

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

### **Bab II Gambaran Pelayanan SKPD**

Bab ini memaparkan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, dengan kondisi Sumber Daya Dinas Pendidikan yang dimiliki dan Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan yang telah dicapai, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan.

### **Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

Bab ini terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra Kemdikbud, serta Penentuan Isu-isu Strategis yang menjadi permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Indramayu.

### **Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Bab ini menjabarkan visi, misi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021, penentuan tujuan dan sasaran

jangka menengah, serta strategi, dan kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran.

## **Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini memaparkan rencana program dan kegiatan dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif yang dibutuhkan.

## **Bab VI Indikator Kinerja Dinas Pendidikan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Indramayu**

Bab ini menjelaskan memuat tentang indikator kinerja program Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta target capaian setiap tahunnya dari tahun 2016-2021.

## **Bab VII Penutup**

Bab ini menjelaskan fungsi dan peran dari dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021.

## BAB II

### GAMBARAN PELAKSANAAN SKPD

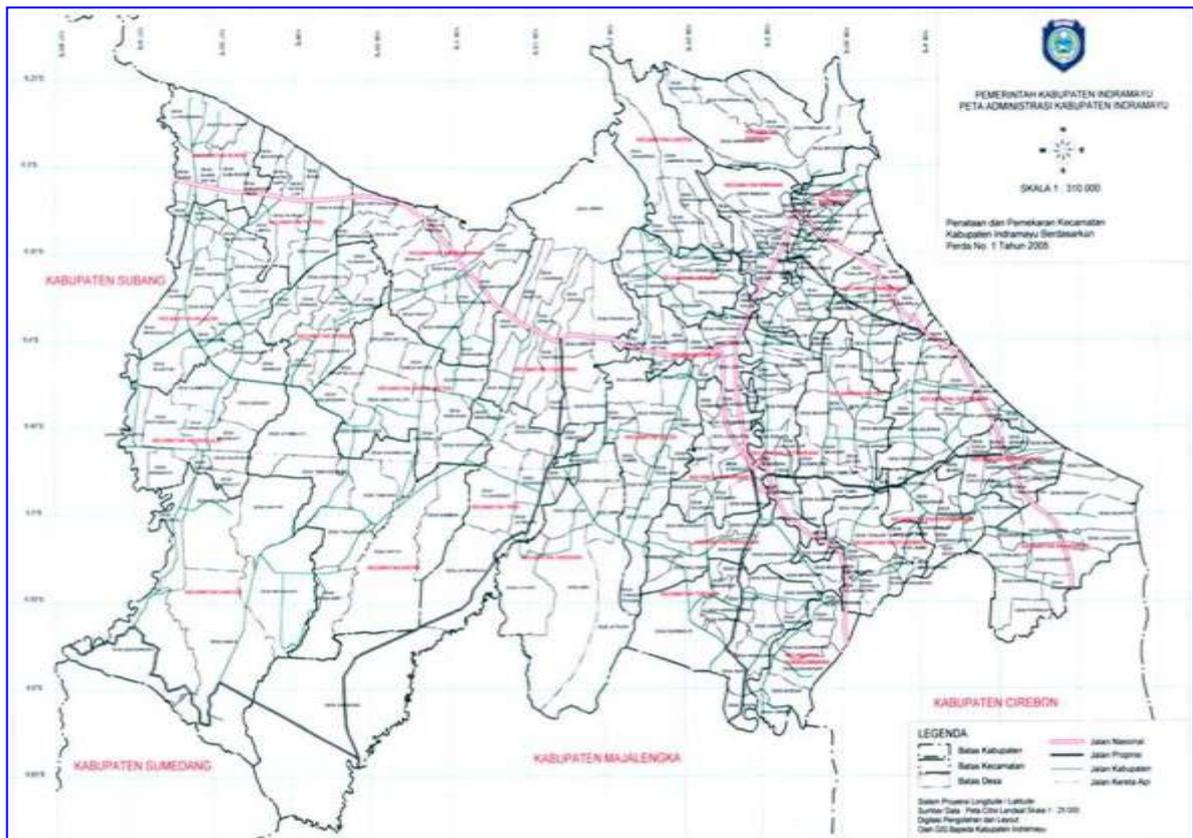
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Indramayu, perencanaan pembangunan terbagi kedalam perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Indramayu. Dalam konteks ini penyusunan RPJPD harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional). Demikian pula halnya dengan RPJMD dan RKPD harus mengacu kepada RPJM Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Otonomi daerah dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta pendayagunaan potensi daerah secara optimal, secara serasi, dinamis dan

bertanggung jawab dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh. Dengan demikian, fokus otonomi adalah pembangunan dalam arti luas, termasuk di dalamnya pembangunan pendidikan. Sehingga, adalah menjadi kewajiban daerah pula untuk mengupayakan kelancaran jalannya pembangunan pendidikan pada umumnya dan pendidikan dasar dan menengah pada khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah masing-masing.

Dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, pemerintah memanfaatkan otonomi seoptimal mungkin untuk memacu pembangunan pendidikan daerah dalam rangka membangun pendidikan nasional secara keseluruhan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka ini kabupaten/Kota perlu didorong untuk dapat menyusun rencana pengembangan pendidikan dasar dan menengah yang komprehensif dengan data yang akurat, lengkap, aktual dan relevan sesuai dengan permasalahan dan potensi sumber daya daerah masing-masing. Sehingga, masalah-masalah pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota dapat ditanggulangi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia baik dari pusat melalui dana dekonsentrasi maupun dana APBD dan juga dana masyarakat.



Gambar 2.1. Peta Kabupaten Indramayu

## 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

### 2.1.1. Tugas

Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu mengemban tanggung jawab bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bidang pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan OPD-Dinas Pendidikan yang merupakan salah satu unsur pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dibidang pendidikan.

Unsur OPD-Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan Sekretaris yang berada di bawahnya yang bertanggung jawab kepada Bupati Indramayu melalui Sekretaris Daerah, serta beberapa pelaksana yaitu Kepala Bidang, Seksi dan Subag, UPTD, dan kelompok jabatan fungsional.

Komponen Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

**a. Kepala;**

**b. Sekretariat, membawahkan :**

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

**c. Kepala Bidang Pembinaan PAUD, membawahkan :**

- 1) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD;
- 2) Seksi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana PAUD;
- 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.

**d. Kepala Bidang Pembinaan SD, membawahkan :**

- 1) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD;
- 2) Seksi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana SD;
- 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD.

**e. Kepala Bidang Pembinaan SMP, membawahkan :**

- 1) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP;
- 2) Seksi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana SMP;

3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.

**f. Kepala Bidang Pembinaan PNF, membawahkan :**

1) Seksi Pendidikan Kursus;

2) Seksi Pendidikan Masyarakat;

3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF.

**g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

**h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Dinas Pendidikan saat ini memiliki 31 UPTD-Pendidikan Kecamatan, dan UPT-UPT yang terdiri atas : 4 unit TK Negeri, 866 SD Negeri, 2 unit SDLB Negeri, 74 unit SMP Negeri dan 16 unit SMP Terbuka, 22 unit SMA Negeri, 19 unit SMK Negeri, dan 1 SKB, serta kelompok jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan juga membina sekolah swasta yaitu 52 Kelompok Bermain, 265 SPS, 6 TPA, 284 TK, 3 SLB, 25 SD, 113 SMP, 35 SMA, dan 115 SMK. Di samping membina sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional seperti tersebut di atas, Dinas Pendidikan juga membantu pembinaan penyelenggaraan sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Agama yang meliputi : 95 RA, 124 MI, 76 MTs, 30 MA baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Indramayu.

**2.1.2. Fungsi.**

OPD-Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendidikan,

yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pendidikan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pendidikan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan UPT;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3. Kewenangan.**

Dalam rangka mensukseskan tugas dan mengoptimalkan fungsi kelembagaannya sebagaimana tertuang diatas, tugas-tugas tersebut dibantu oleh Sekretaris dan para Kepala Bidang dengan rincian tugas-tugasnya sebagai berikut :

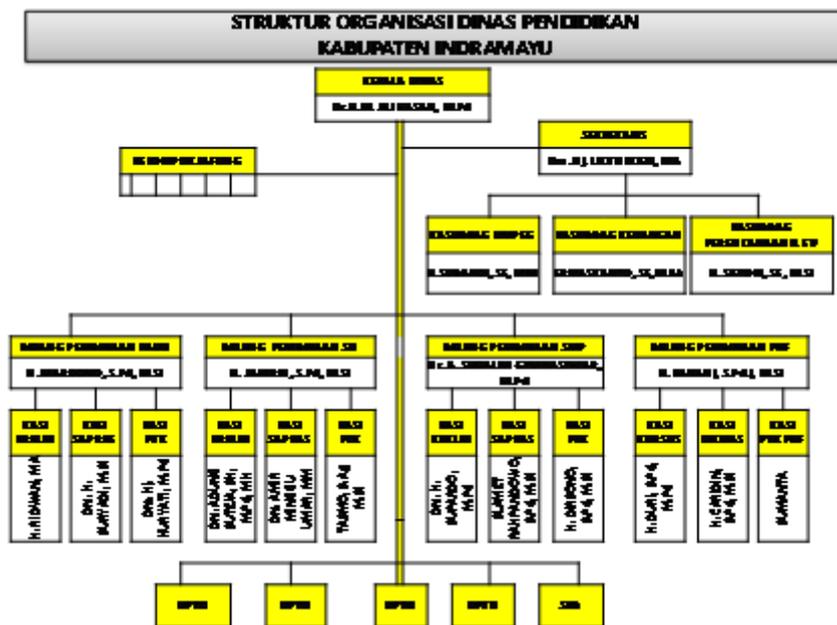
- 1) Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi;
- 2) Kepala Bidang Pembinaan PAUD mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kurikulum, peserta didik, kelembagaan,

- sarana, prasarana, serta pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) Kepala Bidang Pembinaan SD, mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kurikulum, peserta didik, kelembagaan, sarana, prasarana, serta pendidik dan tenaga kependidikan;
  - 4) Kepala Bidang Pembinaan SMP, mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kurikulum, peserta didik, kelembagaan, sarana, prasarana, serta pendidik dan tenaga kependidikan;
  - 5) Kepala Bidang Pembinaan PNF, mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kurikulum, warga belajar, kelembagaan, sarana, prasarana, serta pendidik dan tenaga kependidikan PNF.

Dalam tingkat implementasinya di lapangan, dibantu pula oleh pegawai baik tenaga guru/fungsional maupun tenaga administratif sebanyak  $\pm$  18.400 orang. Jumlah pegawai tersebut dalam rangka melayani warga belajar yang tersebar disejumlah sekolah dengan jumlah siswa di Kabupaten Indramayu pada tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak :  $\pm$  30.217 murid TK/RA,  $\pm$  182.912 murid SD/MI/SDLB,  $\pm$  90.545 murid SMP/MTs/SMPLB,  $\pm$  24.718 murid SMA/MA/SMALB, dan  $\pm$  45.524 murid SMK baik pada sekolah negeri maupun swasta.

#### 2.1.4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.2. Struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

## 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

### 2.2.1. Kondisi Umum Pegawai

Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, diketahui jumlah Pejabat Struktural (Eselon II, III dan IV) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sebanyak 85

orang, Staf sebanyak 520 orang, dan kelompok fungsional yang terdiri dari guru dan pengawas sebanyak 145 orang. Dengan demikian total pegawai negeri yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sebanyak 705 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, berikut ini jumlah pegawai sesuai dengan kualifikasinya.

Tabel. 2.1.  
Data PNS Berdasarkan Jabatan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Struktural	605	80,67
2	Fungsional	145	19,33
JUMLAH		750	100

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tahun 2016

Tabel. 2.2.  
Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH	%
1	Eselon II.b	1	0,17
2	Eselon III.a	1	0,17
3	Eselon III.b	4	0,66
4	Eselon IV.a	47	7,77
5	Eselon IV.b	32	5,29
6	Staf	520	85,95
JUMLAH		605	100

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tahun 2016

Tabel. 2.3.  
Data Guru Berdasarkan Penugasan/Fungsi

NO	JENJANG	L	P	JUMLAH
1	TK	85	1.370	1.455
2	SD	4.590	4.518	9.108
3	SMP	2.453	1.842	4.295
4	SMA	634	480	1.114
5	SMK	1.314	920	2.234
6	SLB	6	18	24
JUMLAH		9.082	9.140	18.230

<http://niep.data.kemdikbud.go.id/24-11-2016>

Tabel 2.4  
Data Pengawas Berdasarkan Penugasan/Fungsi

NO	JENJANG	L	P	JUMLAH
1	TK	0	6	6
2	SD	85	24	109
3	SMP	26	3	29
4	SMA	7	0	7
5	SMK	5	1	6
6	SLB			
	<i>JUMLAH</i>	123	34	157

<http://niep.data.kemdikbud.go.id/24-11-2016>

Tabel. 2.5.  
Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi	Eselon	Staf	Guru	Pengawas	Penilik/pamong	Total
S.3	4		8	1		13
S.2	29		2.597	128	8	377
S.1/D.IV	50	59	7.655	28	133	9.357
D.III		147	125			97
D.II		0				839
D.I		47				47
SMA	2	384				590
SMP		343				343
SD		110				110
Jumlah	85	1.090	10.385	157	141	11.773

<http://niep.data.kemdikbud.go.id/24-11-2016>

Tabel. 2.6.  
Data PNS Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	7.465	63,41
2	Golongan III	2.973	25,25
3	Golongan II	1.316	11,18
4	Golongan I	19	0,16
<b>JUMLAH</b>		11.773	100

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tahun 2016

Tabel. 2.7.

## Data PNSD Berdasarkan Penerima Tunjangan Profesi

NO	JENJANG	GURU	PENGAWAS	JUMLAH
1	TK	162	6	168
2	SD	4.270	109	4.379
3	SMP	1.101	29	1.130
4	SMA	506	7	513
5	SMK	272	6	278
6	SLB	24	0	24
	<i>JUMLAH</i>	<i>6.335</i>	<i>157</i>	<i>6.492</i>

<http://niep.data.kemdikbud.go.id/24-11-2016>

Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan berjumlah 11.773 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 1.090 orang dan pegawai fungsional sebanyak 10.683 orang.

Data pegawai struktural yang berjumlah 1.090 orang di atas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 5 orang, pejabat eselon IV sebanyak 79 orang yang tersebar di tingkat kabupaten, UPT Pendidikan, UPT tingkat satuan pendidikan tingkat SMP dan SMA, staf berjumlah 1.030 orang yang tersebar di tingkat kabupaten, UPT Pendidikan kecamatan, UPT SKB, dan satuan pendidikan dari tingkat SMP, SMA, dan SMK.

Sementara untuk jumlah pegawai fungsional yang berjumlah 10.683 orang terdiri dari guru dan kepala sekolah sebanyak 10.385 orang yang tersebar di tingkat satuan pendidikan yaitu tingkat TKN, SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN, dan pengawas/penilik/pamong berjumlah 298 orang terdiri dari pengawas dikmen dan pengawas TK/SD.

Sedangkan untuk pegawai berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan strata tiga (S3) sebanyak 13 orang, lulusan strata dua (S2) sebanyak 377 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 9.357 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 97 orang, lulusan diploma dua (D2) sebanyak 839 orang, lulusan diploma satu (D1) sebanyak 47 orang, lulusan SLTA sebanyak 590 orang, lulusan SMP sebanyak 343 orang, lulusan SD sebanyak 110 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 7.465 orang, golongan III sebanyak 2.973 orang, golongan II sebanyak 1.316 Orang, dan golongan I sebanyak 19 orang.

Tabel 2.8.

Jumlah PAUD menurut jenjang dan Jumlah siswa

No	Jenjang	Status			Jumlah siswa		
		N	S	Jml	N	S	Jml
1	TK	4	362	366	7.589	7.660	15.249
2	KOBER	0	56	56	0	1.103	1.103
3	TPA	0	1	1	0	11	11
4	SPS	0	397	397	0	14.167	14.167
	JUMLAH	4	816	820	355	29.862	30.217

<http://niep.data.kemdikbud.go.id/24-11-2016>

Tabel 2.9.

Jumlah Sekolah menurut jenjang dan Jumlah siswa

No	Jenjang	Status			Jumlah siswa		
		N	S	Jml	L	P	Jml
1	TK	4	362	366	7.589	7.660	15.249
2	SD	868	21	890	82.534	77.483	160.017
3	SMP	90	113	203	31.859	32.194	64.053
4	SMA	21	32	53	7.026	10.652	17.678
5	SMK	19	100	119	22.876	19.065	41.941
6	SLB	2	3	5	225	247	472
	Jumlah	1.004	609	1.613	152.109	147.301	299.410

<http://niep.data.kemdikbud.go.id/24-11-2016>

### 2.2.2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran belanja daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tahun 2014-2017 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Indramayu.

TABEL 2.10

Perkembangan anggaran Dinas Pendidikan lima tahun terakhir (2011-2015)

Tahun	Belanja Disdik	Belanja Tidak Langsung (BTL)	%	Belanja Langsung (BL)	%
2011	758.687.596.467	599.164.845.683	99,31	159.522.750.784	61,21
2012	848.542.148.983	698.971.458.526	97,89	149.570.690.457	71,48
2013	890.291.133.871	777.677.072.010	96,99	112.614.061.861	77,49
2014	1.009.707.277.100	862.457.427.914	97,80	147.249.849.186	83,47
2015	1.000.735.595.337	887.014.885.177	89,37	113.720.710.160	88,76
JML	4.507.963.751.758	3.825.285.689.310	96,27	682.678.062.448	76,48

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

### 2.2.3. Kondisi Umum Sarana kerja

TABEL 2.11.

Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
A.	SARANA GEDUNG		
1	Tanah	-	m.2
2	Gedung Kantor Disdik	-	m.2
3	Gedung UPTD Pendidikan	31	Unit
4	Gedung TKN	4	Unit
5	Gedung SDN	868	Unit
6	Gedung SMPN	90	Unit
7	Gedung SMAN	21	Unit
8	Gedung SMKN	19	Unit
9	Gedung SLBN	2	Unit
10	Gedung UPTD SKB	1	Unit
B	SARANA ANGKUTAN		
1	Kendaraan Roda empat	38	Unit
2	Kendaraan roda dua	225	Unit
C	SARANA PERKANTORAN		
1	Komputer	42	Unit
2	Laptop / Note Book	16	Unit

3	Infocus	3	Unit
4	Tustel	3	Unit
D	SARANA PENUNJANG LAINNYA		
1	Jaringan WEB DAPODIK	1	Line

### 2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

Gambaran umum demografi di Kabupaten Indramayu bersumber dari BPS Kabupaten Indramayu menyebutkan pada tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Indramayu sebanyak **1.718.495** jiwa, terdiri dari penduduk Laki-laki sebanyak 885.214 jiwa, dan perempuan sebanyak 833.281 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,58%.

Tabel 2.12

#### Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Indramayu

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk	Jiwa	<b>1.675.790</b>	<b>1.683.460</b>	<b>1.697.491</b>	<b>1.708.551</b>	<b>1.718.495</b>
2	Jumlah penduduk laki-laki	Jiwa	862.846	866.795	874.171	880.024	885.214
3	Jumlah penduduk perempuan	Jiwa	812.944	816.665	823.320	828.527	833.281
4	Laju pertumbuhan penduduk	%	0,72	0,35	0,41	0,65	0,58
5	Sex Rasio	Poin	106,14	106,14	106,14	106,22	106,21
6	Kepadatan penduduk (Jiwa per km <sup>2</sup> )	Jiwa	821	802	805	813	818
7	Penduduk usia 0-4 tahun	Jiwa	143.539	144.195	144.851	146.391	147.249
8	Penduduk usia 5-19 tahun	Jiwa	466.712	468.847	471.054	476.113	478.889
9	Penduduk usia 20-54 tahun	Jiwa	854.861	858.775	862.508	871.399	876.480
10	Penduduk usia 55-65 tahun	Jiwa	122.848	123.410	123.921	125.132	125.849
11	Penduduk usia 65+ tahun	Jiwa	87.830	88.233	88.643	89.516	90.028

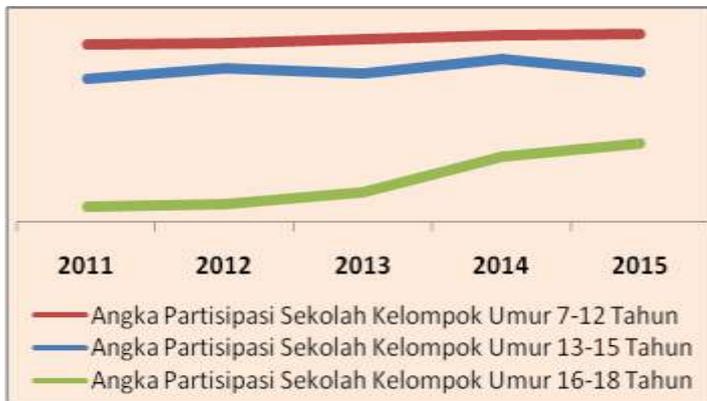
Sumber data : BPS dan Pusdalisbang 2016

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rata-rata lama sekolah dan Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT);
2. Angka Partisipasi Kasar (APM);
3. Angka Partisipasi Murni (APK);
4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan;
5. Angka Putus Sekolah (APuS);
6. Angka Buta Aksara;
7. Angka Kelulusan (AL)
8. Angka Melanjutkan (AM)
9. Fasilitasi Pendidikan
10. Rasio Siswa/Kelas dan Rasio Guru/Siswa
11. Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Prestasi dan Penghargaan Pendidikan Kabupaten Indramayu

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Indramayu tidak luput dari perhatian terhadap indikator-indikator pendukung di atas. Oleh karena itu, sebaiknya terdapat uraian penjelasan mengenai indikator-indikator tersebut.

### 2.3.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS).



Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia

sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Indramayu kelompok umur 7-12 tahun sebesar 96,97% pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 99,70% pada tahun 2015. APS pada kelompok umur 13-15 tahun sebesar 88,06% pada tahun 2011 meningkat secara fluktuatif menjadi sebesar 89,67% pada tahun 2015. APS pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 53,98% pada tahun 2011 terus meningkat menjadi sebesar 70,98% pada tahun 2015. Dilihat dari *trendline*-nya APS Kabupaten Indramayu pada semua kelompok umur mengalami kenaikan, namun capain masing-masing kelompok umur berbeda. Pada kelompok umur 7-12 tahun capaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok umur 13-15 tahun

dan kelompok umur 16-18 tahun. Kelompok umur 16-18 tahun jauh lebih rendah dari kelompok umur 13-15 tahun dan kelompok umur 7-12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penduduk usia 7-12 tahun melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, dan tidak semua penduduk usia 13-15 tahun yang meneruskan pada tingkat sekolah selanjutnya. *Gap* (kesenjangan) yang paling besar adalah antara APS pada kelompok umur 13-15 tahun dengan kelompok umur 16-18 tahun, dengan rata-rata sebesar 29%. Sementara kesenjangan APS dari kelompok umur 7-12 tahun dengan kelompok umur 13-15 tahun hanya sebesar 8%. Artinya bahwa lebih banyak penduduk usia sekolah yang tidak meneruskan pada jenjang pendidikan menengah atas. Penduduk usia sekolah 13-15 tahun perlu mendapat perhatian lebih besar untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Tabel 2.13

Perkembangan Indikator kinerja pembangunan Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	61,47	62,09	62,98	63,55	64,24
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,08	70,17	70,25	70,29	70,39
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	10,87	11,11	11,36	11,62	11,39
4	Angka Rata-rata Lama Sekolah	tahun	4,93	5,09	5,29	5,45	5,56
5	APS usia 7-12 tahun	%	96,97	97,44	98,57	99,68	99,70
6	APS usia 13-15 tahun	%	88,06	90,89	89,41	93,33	89,67
7	APS usia 16-18 tahun	%	53,98	54,82	57,85	67,38	70,98

Sumber data : BPS dan Pusdalisbang 2016

Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kesejahteraan masyarakat yang populer digunakan sebagai alat ukur. Semakin tinggi angka IPM menunjukkan semakin tinggi kesejahteraan suatu daerah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,



kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Angka IPM Kabupaten

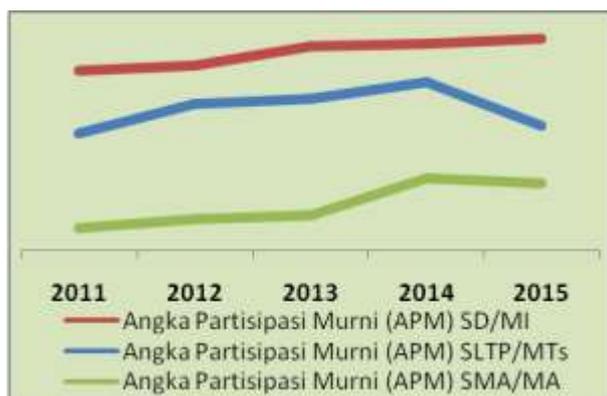
Indramayu berdasarkan metode perhitungan baru menunjukkan peningkatan yang signifikan secara terus menerus pada periode 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2011 sebesar 61,47 poin meningkat menjadi sebesar 62,09 poin pada tahun 2012, kemudian secara berturut-turut meningkat menjadi sebesar 62,98 poin tahun 2013, 63,55 poin tahun 2014 dan menjadi sebesar 64,36 di tahun 2015.



Peningkatan angka IPM didorong oleh peningkatan komponen Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup penduduk yang masih akan dijalani yang telah mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup Kabupaten Indramayu menunjukkan peningkatan secara terus

menerus. Pada tahun 2011 sebesar 70,08 tahun menjadi 70,59 tahun pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perbaikan hidup di Kabupaten Indramayu yang cenderung terus meningkat. Peningkatan angka IPM juga berkat kontribusi Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2011 sebesar 10,87 tahun meningkat menjadi sebesar 12,09 tahun pada tahun 2015. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2011 sebesar 4,93 tahun juga meningkat menjadi sebesar 5,46 tahun pada tahun 2015.

### 2.3.2. Angka Partisipasi Murni (APM).



Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang seusia

dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu usia sekolah maka APM akan mencapai nilai 100. APM Kabupaten Indramayu pada semua jenjang sekolah mengalami peningkatan dengan fluktuasi yang berbeda. APM SD/MI sebesar 90,98 pada tahun 2011 meningkat menjadi 99,70% pada tahun 2015. Pada jenjang SD/MI angkanya selalu diatas 90% sehingga dapat dikatakan bahwa hampir semua anak pada kelompok usia SD/MI bersekolah tepat waktu usia sekolah. Berbeda

dengan jenjang SLTP/MTs, meskipun APM cenderung meningkat secara fluktuatif namun capaiannya berkisar pada angka 70%-an. Pada tahun 2011 sebesar 73,84% meningkat menjadi sebesar 76,02% pada tahun 2015. Masih terdapat  $\pm$  30% anak pada kelompok usia SLTP/MTs yang tidak sekolah tepat waktu usia sekolah. APM Kabupaten Indramayu pada jenjang SLTA/MA APM menunjukkan capaian yang lebih rendah lagi. Pada tahun 2011 sebesar 48,14% meningkat menjadi 60,24% pada tahun 2015. APM pada jenjang SLTA/MA meningkat secara terus menerus dari tahun ke tahun. Peningkatan secara drastis terjadi pada tahun 2014 menjadi sebesar 61,74% sehingga menjadi momentum peningkatan yang lebih dari 50%. APM Kabupaten Indramayu pada setiap jenjang pendidikan selalu terdapat kesenjangan. Kesenjangan tertinggi adalah dari APM SLTP/MTs ke APM SLTA/MA. Artinya bahwa masih banyak anak pada kelompok usia SLTA/MA tidak bersekolah tepat waktu usia mencapai kiasaran 40%-an. Namun demikian, secara kecenderungan, APM Kabupaten Indramayu meningkat secara terus menerus dari tahun ke tahun. Peningkatan yang landai memerlukan program kegiatan untuk melakukan upaya percepatan peningkatan angka partisipasi murni di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Indramayu.

### 2.3.3. Angka Partisipasi Kasar (APK).



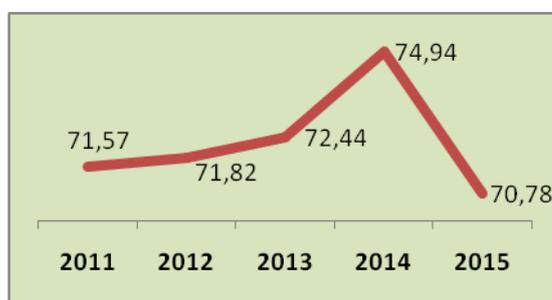
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK

merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100% jika populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun tetapi masih bersekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Di Kabupaten Indramayu, APK SD/MI pada tahun 2011 sebesar 100,11% meningkat menjadi sebesar 117,91% pada tahun 2015. Capaian ini menunjukkan bahwa banyak terdapat usia dibawah 7 tahun yang masuk SD/MI atau usia diatas 12 tahun yang masih bersekolah SD/MI. Sebaliknya, APK SLTP/MTs secara kecenderungan justru menurun. Pada tahun 2011 sebesar 93,39% menurun menjadi sebesar 83,48% pada tahun 2015. Penurunan ini mengandung arti bahwa masih banyak terdapat penduduk usia yang seharusnya bersekolah di jenjang SLTP/MTs tetapi tidak bersekolah pada jenjang tersebut. Penurunan APK SLTP/MTs ini perlu mendapat perhatian lebih besar karena capaian angkanya cenderung terus menurun dari tahun ke tahun. Pada APK SLTA/MA, secara fluktuatif meningkat dari tahun 2011 sebesar

59,92% menjadi sebesar 74,55% pada tahun 2015. Meskipun capaian APK SLTA/MA lebih kecil daripada capaian APK SD/MI maupun SLTP/MTs, namun secara *trendline* menunjukkan capaian yang tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

#### 2.3.4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan.

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan digunakan untuk melihat struktur penduduk menurut kepemilikan ijazah tertinggi. Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Indramayu menunjukkan capaian yang relatif menurun. Pada tahun



2011 sebesar 71,57% menurun menjadi sebesar 70,78% pada tahun 2015, meskipun mengalami kenaikan pada 3 (tiga) tahun sebelumnya secara berturut-turut. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2014 sampai menyentuh angka 74,94%. Namun demikian, fluktuasi capaian tersebut masih berkisar diantara 70%-an.

#### 2.3.5. Angka Putus Sekolah.

Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah digunakan



untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing

kelompok umur. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Angka putus sekolah penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 sebesar 1,74% menurun menjadi sebesar 0,84% pada tahun 2013. Artinya, dari 100 orang penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2011 terdapat 1 sampai 2 orang putus sekolah, namun terus menurun hampir tidak ada penduduk usia 7-12 tahun yang putus sekolah sampai dengan tahun 2013. Capaian tahun 2011 pada kelompok umur 13-15 tahun sebesar 11,78%. Artinya, dari 100 orang penduduk terdapat 11 sampai 12 orang yang putus sekolah pada tahun 2011. Angka ini menurun pada akhir tahun 2014 menjadi sebesar 5,19%. Capaian angka putus sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun sebesar 45,40% pada tahun 2011, menurun setiap tahun secara berturut-turut menjadi sebesar 31,75% pada tahun 2014.

### 2.3.6. Angka Buta Aksara

Angka Buta Aksara adalah proporsi penduduk usia 15



tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Angka buta Aksara digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah,

karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka buta aksara termasuk indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat buta aksara yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Angka buta aksara Kabupaten Indramayu pada penduduk usia 15 tahun sebesar 15,68% pada tahun 2011. Capaian tersebut menurun menjadi sebesar 11,51% pada tahun 2014. Pada penduduk kelompok usia 15-44 tahun, angka buta aksara sebesar 3,64 pada tahun 2011, meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2012 namun kembali menurun sampai dengan 2,42% pada tahun 2014. Angka buta huruf pada penduduk kelompok usia diatas 45 tahun masih tinggi sebesar 42,58%, namun menurun secara terus menerus menjadi sebesar 27,29% pada tahun 2014. Angka buta aksara terbesar terdapat pada penduduk kelompok usia diatas 45 tahun. Meskipun demikian, penduduk kelompok usia 15 tahun juga perlu mendapat perhatian lebih besar meskipun jumlahnya lebih sedikit karena pada usia tersebut merupakan usia sekolah dan bentuk intervensi pemerintah melalui program wajib belajar 12 tahun.

### **2.3.7. Angka Kelulusan (AL)**

Angka Kelulusan (AL) menunjukkan rasio perbandingan siswa yang berhasil lulus pada jenjang pendidikan tertentu dengan seluruh siswa pada jenjang yang bersangkutan. Pada tahun 2015 pada berbagai jenjang pendidikan capaian hasilnya membanggakan. Untuk jenjang SD/MI/Paket A sebesar 100,00, untuk jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 100,00, dan untuk jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C, sebesar 100,00. Meskipun demikian bila dicermati perkembangannya dari tahun ke tahun ternyata AL berfluktuasi dari tahun ke tahun terutama pada jenjang SMP/MTs/Paket B. Untuk jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C relatif baik, oleh karena dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kondisi ini dapat dipahami, karena seperti diketahui AL yang dicapai banyak sekali dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain variasi kualitas pendidikan yang ada berbagai lembaga penyelenggara pendidikan, dipengaruhi pula oleh kualitas pelaksanaan Ujian Nasional pada setiap tahunnya.

### **2.3.8. Angka Melanjutkan (AM)**

Angka Melanjutkan (AM) merupakan rasio perbandingan jumlah siswa baru kelas 1 pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah lulusan jenjang pendidikan sebelumnya. Indikator capaian pembangunan ini penting terkait dengan program wajib belajar 12 tahun. Tingkat AM amat dipengaruhi oleh keberhasilan

pendidikan pada masing-masing jenjang dan penyediaan fasilitasnya belajar pada jenjang pendidikan selanjutnya, serta bantuan pembiayaan untuk siswa yang akan melanjutkan dan terkendala oleh biaya. Pada tahun 2015 AM untuk Kabupaten Indramayu dari jenjang SD/MI/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B cukup tinggi, sebesar 100,00, artinya tidak ada siswa yang telah menamatkan pendidikan di jenjang SD/MI/Paket A, tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Untuk AM dari SMP/MTs/Paket B ke jenjang SMA/SMK/MA/Paket C, sebesar 100,00, berarti tidak ada siswa lulusan SMP/MTs/Paket B yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sebaran data AM untuk kecamatan pada jenjang SD/MI/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B dapat dikatakan homogen, tingkatannya hampir sama antar kecamatan, dan mendekati angka rata-rata Kabupaten Indramayu, bahkan sebagian besar kecamatan memiliki AM di atas 99%. Sementara AM untuk jenjang SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C lebih variatif. Secara keseluruhan perkembangan capaian kinerja pendidikan di Kabupaten Indramayu terkait dengan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke jenjang SMP/MTs dan dari jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK dari tahun 2014 hingga 2015, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

### **2.3.9. Fasilitasi Pendidikan**

Capaian kinerja layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu terkait dengan fasilitas belajar diindikasikan oleh persentase jumlah ruang kelas yang baik dan rusak ringan dari keseluruhan jumlah ruang kelas. Jumlah ruang kelas pada tahun 2015 untuk sekolah jenjang SD dan yang sederajat sebanyak 5.751. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.350 ruang kelas dalam kondisi rusak berat. Dengan demikian lebih dari 23,47% ruang kelas yang tersedia untuk kegiatan belajar di jenjang pendidikan SD dan yang sederajat dalam kondisi rusak berat. Untuk jenjang pendidikan SLTP dan yang sederajat, kondisinya lebih baik, oleh karena ruang kelas yang kondisinya rusak berat hanya sebesar 15,61%, atau sebanyak 313 ruang kelas, dari jumlah keseluruhan ruang kelas sebanyak 2.005. Dengan demikian untuk jenjang pendidikan SLTP atau yang sederajat, persentase jumlah ruang kelas yang berada dalam kondisi baik dan rusak ringan sebesar 84,39%. Untuk jenjang pendidikan SLTA atau yang sederajat, persentase ruang kelas yang berada dalam kondisi baik dan rusak ringan, lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan sebelumnya, yaitu sebesar 92,18%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendidikan yang memerlukan pemikiran untuk peningkatannya ada pada jenjang pendidikan SD dan yang sederajat.

Sebaran data untuk kecamatan pada semua jenjang pendidikan bersifat homogen. Artinya tidak ada

kecamatan yang persentase ruang kelas yang dalam kondisi baik dan rusak ringan berada jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari angka rata-rata di tingkat Kabupaten. Meskipun demikian sejalan dengan peningkatan jumlah warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan, diperlukan peningkatan jumlah ruang kelas. Selain itu diperlukan pula peningkatan penyediaan dana untuk pemeliharaan ruang kelas yang kondisinya baik, dan dana perbaikan untuk ruang kelas yang mengalami kerusakan ringan.

### **2.3.10. Rasio Siswa/Kelas dan Rasio Guru/Siswa**

Untuk Rasio Siswa/Kelas dan Rasio Guru/Siswa di Kabupaten Indramayu tahun 2015, dapat dikatakan baik dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar proses. Meskipun demikian oleh karena angka rasio yang dihitung dari jumlah ruang kelas dibagi dengan jumlah siswa per jenjang pendidikan, maka pada dasarnya angka rasio siswa/kelas dan rasio guru/siswa, belum menggambarkan variasi yang ada pada masing-masing lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Rasio siswa/kelas untuk jenjang SD/MI sebesar 32, artinya masing-masing kelas yang ada di lembaga pendidikan dipergunakan oleh 32 orang siswa SD/MI dalam proses belajar-mengajar. Untuk jenjang SMP/MTs rasio siswa/kelas sebesar 32, dan untuk jenjang SMA/SMK/MA sebesar 32. Sementara itu bila dilihat dari rasio ketersediaan sekolah yang dimaknai sebagai jumlah

sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, dan sesuai dengan pengembangan program wajar 12 tahun, pada tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah sebesar 31, artinya pada setiap 10.000 penduduk usia 16-18 tahun, tersedia 31 sekolah.

Untuk rasio guru/siswa kondisinya juga telah menunjukkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Indramayu. Pada jenjang SD/MI rasio guru/siswa sebesar 13, untuk jenjang SMP/MTs sebesar 12 dan pada jenjang SMA/SMK/MA sama dengan jenjang sebelumnya sebesar 12. Persoalan ketersediaan guru sebenarnya bukan semata persoalan jumlah, akan tetapi lebih dari itu terkait dengan masalah kualifikasi guru, baik dari segi kualifikasi pendidikan maupun status sertifikasinya. Untuk jenjang SD/MI persentase guru yang berkualifikasi akademik D4/S1 sebesar 70,25%, untuk jenjang SMP/MTs sebesar 90,28%, dan untuk jenjang SMA/SMK/MA sebesar 91,90%. Untuk status sertifikasi, pada jenjang SD/MI persentase guru yang telah bersertifikasi sebesar 59,89%, untuk jenjang SMP/MTs 74,20%, dan untuk jenjang SMA/SMK/MA sebesar 66,64%.

Secara keseluruhan perkembangan capaian kinerja pendidikan di Kabupaten Indramayu terkait dengan Rasio Siswa/Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan

menengah, dari tahun 2014 hingga 2016, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

### **2.3.11. Pendidikan Anak Usia Dini.**

Di Kabupaten Indramayu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pertumbuhan cukup pesat. Jumlah lembaga PAUD terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2016 mencapai 18.217 lembaga. Sejalan dengan peningkatan lembaganya jumlah siswa PAUD juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun dan pada tahun 2014 jumlahnya sebanyak 754.094 orang. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 86,36. Sementara rasio pendidik/murid PAUD sebesar 9,30. Dari sebaran data untuk kecamatan di Kabupaten Indramayu, memberikan gambaran tentang masih tingginya disparitas capaian keberhasilan PAUD antar kecamatan di Indramayu

### **2.3.12. Prestasi dan Penghargaan Pendidikan Kabupaten Indramayu**

Di samping capaian kinerja pendidikan seperti telah diungkapkan, perlu pula dipaparkan prestasi dan penghargaan di bidang pendidikan (akademis, seni dan olah raga) yang berhasil diraih oleh siswa, guru, kepala sekolah maupun pengawas. Prestasi dan penghargaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Prestasi Kesiswaan

- 1) Peringkat Nasional Lomba Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional jenjang SMA (SMA Negeri Sindang tahun 2014);
- 2) Peringkat Nasional Lomba Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional jenjang SMP (SMP Negeri 1 Kertasemaya tahun 2014);
- 3) Peringkat Raka Prasadha Lomba Sekolah Berbudaya Lingkungan tingkat Provinsi (SMA Negeri 1 Indramayu tahun 2014);
- 4) Peringkat Raka Prasadha Lomba Sekolah Berbudaya Lingkungan tingkat Provinsi (SMP Negeri 2 Indramayu tahun 2014);
- 5) Peringkat Nasional Lomba Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional jenjang SMA (SMA Negeri 1 Indramayu tahun 2015);
- 6) Peringkat Nasional Lomba Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional jenjang SMP (SMP Negeri 2 Indramayu tahun 2015);
- 7) Peringkat Raka Prasadha Lomba Sekolah Berbudaya Lingkungan tingkat Provinsi (SMK Negeri 1 Anjatan tahun 2015);
- 8) Peringkat Raka Prasadha Lomba Sekolah Berbudaya Lingkungan tingkat Provinsi (SMP Negeri 1 Indramayu tahun 2015);
- 9) Peringkat Raka Prasadha Lomba Sekolah Berbudaya Lingkungan tingkat Provinsi (SD Negeri Unggulan Indramayu tahun 2015);

- 10) Peringkat Raka Prasadha Lomba Sekolah Berbudaya Lingkungan tingkat Provinsi (SD Negeri Margadadi IV Indramayu tahun 2015);
  - 11) Juara I Lomba UKS tingkat Provinsi (SMA Negeri 1 Sindang tahun 2015);
  - 12) Juara III Lomba Tata Upacara Bendera Sekolah tingkat provinsi (SMA Negeri 1 Sindang tahun 2015);
- b. Prestasi Keolahragaan
- 1) Juara I Lomba Cabor Catur Cepat tingkat Nasional pada acara O2SN (2014);
  - 2) Juara II Lomba Cabor Catur Standar tingkat Nasional pada acara O2SN (2014);
  - 3) Juara I Lomba Cabor Karate Putri tingkat Provinsi pada acara O2SN (2014);
  - 4) Juara III Lomba Cabor Bola Voli Putra tingkat Provinsi pada acara O2SN (2014);
  - 5) Juara II Lomba Cabor Penca Silat Putra tingkat Provinsi pada acara O2SN (2014);
  - 6) Juara I Lomba Cabor Bola Voli Pasir Putra tingkat Provinsi pada acara O2SN (2014);
  - 7) Juara I dan II Lomba Cabor Judo tingkat Provinsi pada acara O2SN (2014);
  - 8) Juara I dan II Lomba Cabor Tekwondo tingkat Provinsi pada acara O2SN (2014);
  - 9) Juara III Lomba Cabor Panahan tingkat Nasional pada acara O2SN (2014);
  - 10) Juara I Lomba Cabor Tinju tingkat Provinsi pada acara O2SN (2014);

- 11) Juara II Lomba Cabor Penca Silat tingkat Provinsi pada acara O2SN (2014);
- 12) Juara I, II dan III Lomba Cabor Gulat tingkat Provinsi pada acara O2SN (2014)
- 13) Juara II Lomba Cabor Sepak Takraw tingkat Provinsi pada acara O2SN (2014);
- 14) Juara III Lomba Cabor Sepak Takraw tingkat Provinsi pada acara O2SN (2015);
- 15) Juara III Lomba Cabor Catur tingkat Provinsi pada acara O2SN (2015);
- 16) Juara I Lomba Cabor Bola Voli Pasir Putra tingkat Nasional pada acara POPNAS (2015);

c. Prestasi Karya Cipta

- 1) Juara Harapan I Lomba Karya Tulis Kesanitasian pada acara Duta Sanitasi tingkat Provinsi (2014);
- 2) Juara Favorit Lomba Poster Kesanitasian pada acara Duta Sanitasi tingkat Provinsi (2014);
- 3) Juara I Lomba Cipta Cerpen pada acara FLS2N tingkat Provinsi (2014);
- 4) Juara Harapan II Lomba Desain Batik pada acara FLS2N tingkat Provinsi (2014);
- 5) Juara Harapan II Lomba Storyteling pada acara FLS2N tingkat Provinsi (2014);
- 6) Juara I, II dan III Lomba Ndongeng Basa Cerbon-Dermayu pada acara Pasanggiri Basa Cerbon-Dermayu tingkat Provinsi (2015);

- 7) Juara I, II dan III Lomba Maca Puisi Basa Cerbon-Dermayu pada acara Pasanggiri Basa Cerbon-Dermayu tingkat Provinsi (2015);
- 8) Juara I, II dan III Lomba Nembang Macapat Basa Cerbon-Dermayu pada acara Pasanggiri Basa Cerbon-Dermayu tingkat Provinsi (2015);
- 9) Juara I, II dan III Lomba Maca lan Nulis Basa Cerbon-Dermayu pada acara Pasanggiri Basa Cerbon-Dermayu tingkat Provinsi (2015);

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.**

Analisis atas tantangan yang dihadapi dan peluang bagi pengembangan layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu memerlukan analisis atas kondisi internal dan eksternal. Untuk itu diperlukan analisis atas kondisi pendidikan di Kabupaten Indramayu yang pada dasarnya merupakan gambaran tentang kinerja layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya pendanaan yang besar untuk pengembangan program-program layanan pendidikan beserta realisasinya, sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk mengalokasikan 20% dari APBD, ditambah dengan pendanaan yang besar pula bersumber dari APBN;

2. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sangat memadai, dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan tupoksi organisasi, dilengkapi dengan kualifikasi akademik dan keterampilan yang sesuai bagi upaya pengembangan layanan pendidikan;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat memadai sebagai faktor pendukung bagi pengembangan program-program layanan pendidikan;
4. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi yang mampu menciptakan budaya kerja yang produktif dan iklim organisasi yang kondusif di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
5. Penguasaan dan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang mampu meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan penempatan dan alokasi sumberdaya manusia pada berbagai bidang dan sub bagian yang kurang memperhatikan jenjang karir dan tingkat kemampuan serta keterampilan, mengakibatkan adanya perbedaan produktivitas dan hasil kerja pada masing-

masing bidang dan sub bagian di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

2. Intensitas komunikasi dan kerjasama antar bidang dan sub bagian masih memerlukan peningkatan terutama terkait dengan implementasi program yang pelaksanaannya membutuhkan kerjasama dan kebersamaan antar bidang maupun antar sub bagian;
3. Pengembangan program kerja tahunan masih belum mengacu pada perencanaan strategis jangka menengah, mengakibatkan kontinuitas dan keberlanjutan program dari tahun ke tahun sesuai dengan rencana jangka menengah kurang tercapai dan mampu mengantisipasi perkembangan yang berlangsung di masyarakat;
4. Pada beberapa implementasi program masih dijumpai kekurangjelasan dan kekurangtegasan dalam pelimpahan wewenang dari tingkat pimpinan kepada bawahan, serta kekurangsesuaian penunjukan bidang atau sub bagian untuk melaksanakan program-program kerja yang dilaksanakan;
5. Perbedaan struktur organisasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengakibatkan efektivitas penanganan program-program layanan pendidikan yang diintrodusir oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurang memadai, karena ditempatkan dan ditangani oleh bidang atau sub bagian yang kurang relevan;

Faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

1. Makin meningkatnya kebutuhan, kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai faktor penentu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan harapan untuk meraih keberhasilan di masa depan;
2. Bidang pendidikan menjadi prioritas utama dalam pengembangan program-program pembangunan baik pada skala nasional maupun regional di tingkat kabupaten, sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran bahwa upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
3. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perkembangan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat, menumbuh kembangkan kebutuhan akan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang beragam, dan pada gilirannya meningkatkan perluasan kebutuhan akan jasa layanan pendidikan;
4. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan, sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan di kalangan masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola

dan diselenggarakan oleh masyarakat makin meningkat keberagaman maupun kualitasnya;

5. Arus globalisasi, keterbukaan dan makin meningkatnya persaingan antar negara pada kawasan regional maupun internasional menumbuhkan kerjasama antar negara maupun antar lembaga dalam pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Di sisi yang lain juga menumbuhkan kesadaran akan penting peningkatan kualitas pendidikan untuk menghadapi peningkatan persaingan antar bangsa di segala sendi kehidupan;
6. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Berbagai riset dalam bidang pendidikan telah membawa peningkatan kualitas pendidikan melalui temuan-temuan inovatif dalam praktek pembelajaran. Selain itu pemanfaatan teknologi dalam praktek pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Faktor-faktor eksternal yang merupakan tantangan dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan baik dari sisi kuantitas dan kualitas yang makin meningkat, serta makin meningkatnya sikap kritis

masyarakat atas berbagai kebijakan dan implementasi program-program pendidikan, memerlukan kepekaan untuk memahami dinamika perkembangan kehidupan di masyarakat dan pengambilan kebijakan serta pengembangan program-program pendidikan yang memadai untuk memenuhinya;

2. Arah kebijakan yang kurang menentu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakibatkan banyak perubahan keputusan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, dan pengembangan serta implementasi program yang terkesan kurang mengacu pada perencanaan jangka menengah dan bersifat parsial kurang memiliki keterkaitan yang komprehensif dengan visi dan misi yang telah dikembangkan. Hal ini memerlukan fleksibilitas dan tanggapan yang cepat untuk memfasilitasi pelaksanaannya di tingkat kabupaten, dan seringkali mengganggu kontinuitas implementasi program dan pelaksanaan kerja yang dikembangkan di kabupaten;
3. Kurangnya koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dalam implementasi program-program yang pelaksanaan dan sasarnya pada tingkat UPTD Pendidikan Kecamatan di Kabupaten Indramayu. Selain mengganggu efektivitas dan efisiensi implementasi program-program yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, hal tersebut juga menumbuhkan iklim kerja yang kurang kondusif di Kabupaten Indramayu;

4. Kesenjangan yang masih tinggi pada tingkat produktivitas kinerja secara kuantitatif dan kualitatif antar kecamatan di Indramayu berpengaruh pada terjadinya variabilitas pencapaian target kinerja dalam implementasi program di tingkat kecamatan. Di samping itu dengan disparitas kondisi pendidikan di Kabupaten Indramayu, menuntut dirumuskannya prioritas-prioritas program untuk meniadakan atau paling tidak mengurangi disparitas yang dimaksud. Disparitas kondisi pendidikan tersebut diperberat oleh kurang intensnya respon UPTD Pendidikan Kecamatan dalam berbagai kegiatan koordinasi terkait dengan implementasi program yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan pelaksanaannya melibatkan atau dilakukan di kecamatan;

### BAB III.

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 3.1. Evaluasi masa lalu (Hasil-hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya).

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB II), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

- a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari capaian APK PAUD walaupun capaian pada tahun 2015 dapat melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu target 30,31% dan realisasi 44,04%, akan tetapi realisasi tersebut masih dibawah capaian provinsi dan nasional, yang masing-masing sudah mencapai 58,15% dan 63,01%.

Tabel. 3.1. Capaian PAUD Tahun 2011-2015

Program	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
PAUD	APK (%)	22,31	42,24	33,57	40,01	44,04
	Disparitas APK antara Kabupaten dan Kec. (%)	6,04	5,42	4,37	4,20	4,25

- b. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas adalah permasalahan lain yang

juga perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain adalah APM SD/sederajat, capaian rata-rata kabupaten pada tahun 2015 sebesar 87,31%. Indikator lain dapat dilihat pada capaian APM SMP/sederajat. Capaian tingkat kabupaten adalah 85,53%. Dari 2 (dua) indikator di atas, dapat kita lihat ada kesenjangan (gap) yang cukup lebar antar kecamatan dan hal ini perlu ada intervensi yang serius dari pemerintah kabupaten agar kesenjangan tersebut tidak terlalu lebar dengan cara menambah daya tampung dan membuka unit-unit sekolah baru di kecamatan-kecamatan yang capaian indikatornya masih jauh dari harapan. Kesenjangan yang terjadi dari capaian dua indikator di atas merupakan hasil perhitungan internal dinas pendidikan dengan melakukan pendataan yang basisnya adalah persekolahan.

Tabel. 3.2. Capaian Pendidikan Dasar Tahun 2011-2015

Program	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI/ SDLB/ Paket A	APK (%)	103,86	104,10	141,86	108,18	103,36
	APM (%)	99,06	99,30	99,63	99,92	99,99
	APS (%)	99,88	99,91	99,95	99,99	99,88
	Rerata Nilai UN	0	0	7,10	7,13	7,16
	Rasio Lulusan SD/MI/SDLB /Paket A melanjutkan ke SMP/MTs(%)	98,64	95,91	98,03	99,89	100,00
SMP/MTs /SMPLB/ Paket B	APK (%)	90,28	93,32	99,89	103,84	106,13
	APM (%)	87,84	90,88	95,77	98,94	99,43
	APS (%)	94,25	95,19	97,13	99,02	94,25
	Rerata Nilai UN	0	0	8,64	9,00	9,18
	Rasio Lulusan SMP/MTs/ SMPLB/Paket B ke SMA/ SMK/ MA (%)	64,09	79,23	89,06	93,07	0,21

c. Peningkatan perluasan akses dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius, hal ini bisa kita lihat dari beberapa indikator yang sebarannya masih terjadi kesenjangan antar kecamatan, indikator tersebut antara lain APK dan APM SMA/ sederajat yang walaupun capaian terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, akan tetapi masih jauh jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional. Capaian APK dan APM SMA/ sederajat pada tahun 2014 masing-masing adalah 54,15% dan 48,92%. Sementara capaian APK SMA/ sederajat pada tingkat provinsi dan nasional masing-masing adalah 70,19% dan 78,50%, dan capaian APM/ sederajat adalah 53,28% dan 58,25%.

Tabel. 3.3. Capaian Pendidikan Menengah Tahun 2011-2015

Program	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
SMA/SMK/MA/SALB/Paket C	APK (%)	51,42	64,54	63,87	68,34	49,63
	APM (%)	47,25	60,64	75,33	78,33	48,50
	APS (%)	53,69	57,77	65,27	70,34	53,69
	Rerata Nilai UN	7,60	7,86	8,16	8,32	8,41
	Rasio Jumlah Siswa SMK:SMA	30:70	35:65	40:60	44:56	49:51
	Rasio Kesetaraan Gender (%)	93,80	94,25	94,70	95,15	95,60
	Sertifikasi Kompetensi yang diterbitkan (lembar)	0	0	263	375	508

d. Peningkatan kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar dikdas dan

menengah serta pemberantasan buta aksara, dapat dilihat dari dua indikator makro yang menjadi bagian dari indikator kabupaten termaju dan juga menjadi bagian dari komponen indikator pendidikan, indikator tersebut adalah angka melek huruf (AMH); dan rata-rata lama sekolah (RLS). Capaian dua indikator tersebut pada tahun 2014 masing-masing adalah 95,35% dan 8,04 tahun.

Tabel. 3.4. Capaian Pendidikan Non Formal Tahun 2011-2015

Program	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
Pendidikan Non Formal	Sertifikasi Kompetensi yang diterbitkan (lembar)	0	721	1305	2472	3.059
	Tingkat Literasi > 15 tahun (%)	89,79	90,85	91,91	92,97	94,03
	Rasio Kesetaraan Gender tingkat literasi (%)	92,7	93,73	94,75	95,78	96,80

- e. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat kita lihat dari capaian indikator guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D4 pada tahun 2014 adalah 68,86%. Capaian indikator tersebut tidak secara khusus ditunjang dengan kegiatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik PTK, hal ini dimungkinkan pada kebutuhan dan tuntutan bagi PTK untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi PTK profesional. Hal lain yang juga perlu

mendapat perhatian adalah, dari PTK yang sudah S1/D4, masih terdapat lulusan yang belum sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan.

## **3.2. Analisa masalah dan isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan**

### **3.2.1. Penentuan isu-isu strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 6 (enam) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Permasalahan pembangunan merupakan uraian dari kondisi pembangunan yang belum sesuai dengan harapan. Penuangan permasalahan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan dan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Isu strategis adalah hal-hal pokok yang akan digunakan dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerah serta secara umum dapat mempengaruhi atau berdampak merugikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika tidak segera diantisipasi oleh daerah. Penentuan isu strategis dengan memperhatikan isu strategis nasional maupun provinsi Jawa Barat, disamping itu memiliki dampak yang signifikan terhadap

peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta merupakan hal-hal yang merupakan janji politik Bupati dan Wakil bupati pada periode berkenaan. Dalam menentukan isu strategis dalam dokumen perencanaan harus terukur baik dari sisi kewenangan, kemampuan pendanaan, kapasitas pelaksana atau sumberdaya manusia dan sumberdaya pendukung lainnya serta jangka waktu pencapaiannya. Berdasarkan kondisi permasalahan yang ada serta melihat cakupan dari dampak permasalahan tersebut maka dapat dilaksanakan analisis untuk menentukan isu-isu strategis yang terjadi saat ini dan diperkirakan masih relevan menjadi isu strategis sampai dengan tahun periode akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati (2016-2021).

Dari hasil identifikasi berbagai permasalahan pendidikan berhasil diidentifikasi sejumlah isu-isu strategis di bidang pendidikan. Isu-isu strategis yang teridentifikasi diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021. Isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya pendidikan, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) masyarakat Indramayu tahun 2014 yaitu 5,45 Tahun berdasarkan perhitungan baru IPM;

2. Masih banyaknya masyarakat usia 15 tahun keatas yang buta huruf. Berdasarkan data BPS Pusat Angka Melek Huruf masyarakat Indramayu baru mencapai 90,86% termasuk terendah di Jawa Barat;
3. Masih terdapat Anak putus sekolah SD/MI sebesar 0,11%, SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 6,93%;
4. Masih terdapat ruang kelas, perpustakaan dan meubelair terutama jenjang sekolah dasar dalam kondisi rusak berat, serta kekurangan prasarana minimal pada jenjang TK dan ruang kelas baru bagi SD, dan SMP;
5. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil uji kompetensi guru (UKG) baik jenjang SD, SMP maupun SMA/SMK yaitu 55,81;
6. Masih rendahnya kualitas pendidikan non formal dan informal;
7. Belum optimalnya peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter;
8. Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi;
9. Belum maksimalnya peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan;
10. Belum maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang dan antara Dinas Pendidikan

Kabupaten dan UPTD Pendidikan dalam implementasi kebijakan dan program pendidikan;

11. Belum terealisasinya regulasi di bidang pendidikan berupa Penetapan Peraturan Daerah tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
12. Belum efektifnya pengembangan dan implementasi kurikulum muatan lokal utamanya untuk pendidikan anti korupsi dan pelestarian budaya;
13. Belum efektifnya implementasi program penyerasian pendidikan Diniyah dan Pesantren Salafiyah dengan pendidikan umum;
14. Masih rendahnya tingkat literasi dan minat baca di kalangan masyarakat baik yang masih berusia sekolah maupun yang telah menyelesaikan pendidikan;
15. Belum efektifnya implementasi program peningkatan kualitas pendidikan menengah universal 12 tahun;
16. Belum efektifnya implementasi penerapan kurikulum 2013 pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan;
17. Jumlah angka buta aksara masih tinggi;
18. Rendahnya APK dan APM di tingkat pendidikan menengah;
19. Kurangnya sarana prasarana pendidikan menengah kejuruan;
20. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik pada pendidikan khusus dan layanan khusus (untuk semua jenjang pendidikan) di Indramayu;

21. Belum optimalnya pendataan semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah di Indramayu berkesempatan menikmati layanan pendidikan yang sesuai;
22. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas pendidikan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS);
2. Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana);
3. Peningkatan Angka Melek Aksara;
4. Bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;
5. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
6. Dst

### 3.2.2. Analisa lingkungan strategis (Analisa Swot)

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu

pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (**strengths**) dan kelemahan (**weaknesses**). Lingkungan eksternal meliputi peluang (**opportunities**) dan ancaman (**threats**). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

### **1). Lingkungan Internal**

#### **KEKUATAN/ STRENGTHS (S)**

- a. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat;
- b. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat;
- c. Capaian APK/APM pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi internal dinas pendidikan sudah diatas rata-rata capaian nasional dan provinsi;
- d. Adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap capaian APK/APM pada jenjang pendidikan menengah (SMA/ sederajat), terutama dalam dua tahun terakhir;
- e. Lulusan SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dari tahun-ketahun semakin meningkat;
- f. Proporsi SMK terhadap SMA mendekati proporsi ideal, yaitu 60:50;
- g. Penduduk melek aksara sudah mencapai angka 97,10%;

- h. Adanya peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD, Dikdas, maupun Dikmen.

### **KELEMAHAN/WEAKNESSES (W)**

- a. Tingkat capaian APK PAUD, berdasarkan hasil evaluasi internal, masih dibawah capaian rata-rata nasional dan provinsi;
- b. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya;
- c. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan layanan pendidikan menengah masih belum memadai;
- d. Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara;
- e. Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD, Dikdas, maupun Dikmen belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.

## **2). Lingkungan Eksternal**

### **PELUANG/OPPORTUNITIES (O)**

- a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal (pendidikan menengah);
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;

- c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;
- d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);
- e. Kepedulian masyarakat dalam DUDI terhadap pembangunan sektor pendidikan melalui program CSR (*corporate social responsibility*)-nya dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- f. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan;
- g. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS), baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah;
- h. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antar fungsi baik di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- i. MK, antara kompetensi lulusan dengan dunia kerja (peluang kerja) masih kurang relevan;
- j. Aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang menengah masih belum merata;
- k. Angka kemiskinan relatif tinggi;

- l. Masih terdapat perusahaan yang merekrut karyawan/karyawatnya pada penduduk yang masih usia sekolah;
- m. Dalam hal kebijakan pengupahan, DUDI masih memperlakukan sama antara karyawan yang lulusan pendidikan menengah dengan lulusan yang ada di bawahnya;

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

#### **1. STRATEGI S-O**

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;
- c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- e. Lebih meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar fungsi yang ada di internal maupun eksternal;

- g. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.

## **2. STRATEGI W-O**

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan rekrutmen guru honor daerah;
- e. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- f. Meningkatkan pengembangan program keahlian sesuai dengan tuntutan DUDI baik secara kualitas maupun kuantitas.

## **3. STRATEGI S-T**

- a. Meningkatnya daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;

- d. Menjalin berbagai kerjasama dengan *stakeholder* pendidikan;
- e. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- f. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- g. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.

#### **4. STRATEGI W-T**

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan daya tampung sekolah;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- f. Meningkatkan peran pengusaha dan *stakeholder* pendidikan dalam pembangunan pendidikan.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

##### A. Visi

Visi Bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDRAMAYU YANG RELIGIUS, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA SERTA TERCIPTANYA KEUNGGULAN DAERAH”**.

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 11 tahun 2005 tentang pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, juga visi Bupati terpilih periode 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, serta hasil telaahan terhadap isu-isu aktual yang berkembang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu menetapkan visi sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU YANG MEMILIKI KEUNGGULAN KOMPARATIF, RELIGIUS, AMANAH, TAAT DAN INOVATIF”**. Dengan penetapan rumusan visi tersebut, maka diharapkan penyelenggaraan layanan pendidikan dapat membentuk dan mencetak sumber daya manusia

yang unggul dan mampu bersaing yang mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam sekitarnya untuk dapat mewujudkan visi pemerintah daerah yaitu kabupaten termaju di Indonesia.

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sebagaimana tersebut di atas mengandung arti dan maksud, sebagai berikut:

### **SDM yang Keunggulan**

Masyarakat Indramayu diharapkan mampu memiliki keunggulan yang dimilikinya, untuk dapat membandingkan sumber daya manusia, fasilitas dan kekayaan lainnya dengan memanfaatkan segala keunggulan yang dimilikinya.

### **SDM yang Religius**

Masyarakat Indramayu diharapkan mampu beraktualisasi diri melalui olah hati/qalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.

### **SDM yang Amanah**

Masyarakat Indramayu yang mampu membangun unsur-unsur penting dalam pendidikan yang satu dengan yang lainnya saling terkait, bersinergi dan tidak terlepas, yang berupa kognitif, psikomotorik, afektif, dan intuitif.

### **SDM yang Taat**

Tercipta dan terbentuk masyarakat Indramayu melalui proses yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, ketertiban,

dan kesadaran dalam diri sendiri akan pentingnya kedisiplinan.

### **SDM yang Inovatif**

Masyarakat Indramayu diharapkan mampu membangun pembaharuan yang bertujuan memberikan nilai lebih pada suatu produk dengan ide baru yang berbeda dengan produk lainnya.

### **B. Misi**

Misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah (1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan Budaya Lokal; (2) Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri dan Pertanian; (3) Mengembangkan Infra Struktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal; (4) Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal; (5) Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Mengayomi Rakyat; (6) Menguatkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat; dan (7) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk dapat mewujudkan misi Bupati dan wakil Bupati Indramayu sebagaimana rumusan di atas, maka

Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyediakan layanan pendidikan yang merata dan terjangkau
2. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan
3. Menyiapkan pemimpin pendidikan yang bermoral dan profesional;
4. Membangun jaringan kerja perbaikan pendidikan multikultural yang agamis;
5. Membangun dan mengembangkan sistem informasi pendidikan;

Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan pendidikan. Tata nilai yang dimaksud adalah memiliki keunggulan komparatif, religius, amanah, taat dan inovatif.

Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan tahun 2016 – 2021, dari lima tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

## **DISDIK KREATIF**

Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu diharapkan mampu mengembangkan kreatifitas secara teratur dan mempunyai sikap toleransi terhadap keberhasilan atau kegagalan, menciptakan ide atau gagasan baru yang menghasilkan produk baru yang bisa digunakan oleh masyarakat.

Ciri-ciri orang kreatif antara lain memiliki banyak ide dan kemauan, memiliki jiwa yang suka dengan tantangan, selalu mencoba sesuatu yang baru, serta memiliki jiwa yang profesional.

Orang yang inovatif memiliki ciri-ciri seperti giat belajar dan bekerja, selalu berorientasi ke depan, kaya ide-ide yang cemerlang, berfikir rasional dan berprasangka baik, menghargai dan menggunakan waktu sebaik-baiknya, serta suka melakukan eksperimen dan penelitian.

Untuk mencapai Visi Dinas Pendidikan 2021, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

KODE	MISI
M1	Menyediakan Layanan Pendidikan Yang Merata dan Terjangkau
M2	Meningkatkan Profesionalitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
M3	Menyiapkan pemimpin pendidikan yang bermoral dan profesional
M4	Membangun jaringan kerja perbaikan pendidikan multikultural yang agamis
M5	Membangun dan mengembangkan sistem informasi pendidikan

Misi Renstra Dinas Pendidikan 2016-2021 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Menyediakan Layanan Pendidikan Yang Merata dan Terjangkau adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat;
2. Meningkatkan Profesionalitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar pendidikan, serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
3. Menyiapkan pemimpin pendidikan yang bermoral dan profesional adalah menguatkan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan yang diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
4. Membangun jaringan kerja perbaikan pendidikan multikultural yang agamis adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset dan bukti lapangan;
5. Membangun dan mengembangkan sistem informasi pendidikan adalah mengoptimalkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan menjaga serta memelihara jati diri karakter bangsa.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi Renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Membedayakan orang tua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

Rumusan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu periode tahun 2016-2021 yang sesuai dengan rumusan visi dan misi di atas adalah:

**Misi Pertama : Menyediakan Layanan Pendidikan yang Merata dan terjangkau**, yang tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu dan terjangkau;
2. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan berkeadilan;
3. Meningkatnya akses pendidikan menengah yang bermutu dan berkeadilan;
4. Mengentaskan buta aksara bagi penduduk usia 15 s.d. 59 tahun.

**Misi Kedua : Meningkatkan Profesionalitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan**, yang tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
2. Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik Dinas Pendidikan.

**Misi Ketiga : Menyiapkan pemimpin pendidikan yang bermoral dan profesional**, yang tujuannya adalah meningkatnya pemahaman nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pendidikan.

**Misi Keempat : Membangun jaringan kerja perbaikan pendidikan multikultural yang agamis**, yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas mutu pendidikan melalui penyelenggaraan proses pendidikan yang utuh (*holistic*), meliputi *Holistic Education, Holistic Curriculum, Holistic Teaching, and Holistic Learning*.

**Misi Kelima : Membangun dan mengembangkan sistem informasi pendidikan,** yang tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi dan layanan masyarakat;
2. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya;

#### **4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan**

##### **A. Tujuan**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal;	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya mutu pendidikan Meningkatnya aksesibilitas pendidikan

Tujuan dalam bahasa Inggris disebut goal atau objektif. Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Indramayu pada sektor pendidikan yang tertuang dalam renstra Dinas Pendidikan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Pendidikan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

KODE	TUJUAN
T.1	Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini (PAUD)
T.2	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan berkeadilan
T.3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah yang bermutu dan berkeadilan

T.4	Meningkatnya literasi angka penduduk usia 15 ke atas melalui akses pendidikan non formal
T.5	Meningkatnya jumlah, kualitas dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang pendidikan
T.6	Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik Dinas Pendidikan
T.7	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pendidikan
T.8	Meningkatnya kualitas mutu pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan yang utuh; jaringan kerja perbaikan pendidikan multikultural yang agamis
T.9	Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi dan layanan masyarakat.
T.10	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan (T.1) : Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini (PAUD).**

Tujuan strategis ini merupakan peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Fokus peningkatan akses PAUD terutama pada peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam PAUD dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik integratif.

**2. Tujuan (T.2) : Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan berkeadilan;**

Tujuan strategis ini merupakan upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam lima tahun ke depan sebagaimana diamankan dalam RPJMN 2015-2019 untuk menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun.

**3. Tujuan (T.3) : Meningkatnya akses pendidikan menengah yang bermutu dan berkeadilan.**

Tujuan strategis ini merupakan upaya peningkatan jaminan bagi lulusan SMP untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah merupakan solusi atas kendala biaya dan jarak atau keterjangkauan.

**4. Tujuan (T.4) : Meningkatnya literasi angka penduduk usia 15 ke atas melalui akses pendidikan non formal.**

Tujuan strategis ini merupakan upaya peningkatan akses pendidikan masyarakat mencakup peningkatan kapasitas pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kursus dan pelatihan serta pendidikan orang dewasa keluarga.

**5. Tujuan (T.5) : Meningkatnya jumlah, kualitas dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang pendidikan.**

Tujuan strategis ini adalah merupakan upaya peningkatan kualitas sikap guru dan tenaga kependidikan dalam kepribadian, spriritual, dan sosial.

6. **Tujuan (T.6) : Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik Dinas Pendidikan.**

Tujuan strategis ini adalah upaya peningkatan tata kelola profesionalisme manajemen pelayanan publik instansi pemerintah.

7. **Tujuan (T.7) : Meningkatnya pemahaman nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pendidikan;**

Tujuan strategis ini adalah upaya peningkatan profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan dalam mengimplemantasikan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pendidikan.

8. **Tujuan (T.8) : Meningkatnya kualitas mutu pendidikan melalui penyelenggaraan proses pendidikan yang utuh;**

Tujuan strategis ini adalah upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan melalui penyelenggaraan proses pendidikan yang utuh (*holistic*), meliputi *Holistic Education, Holistic Curriculum, Holistic Teaching, and Holistic Learning*

9. **Tujuan (T.9) : Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi dan layanan masyarakat;**

Tujuan strategis ini adalah upaya penerapan secara bertahap sistem dan metoda pembelajaran berbasis teknologi informasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

10. **Tujuan (T.10) : Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya.**

Tujuan strategis ini adalah upaya peningkatan melalui penyelenggaraan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan

## **B. SASARAN**

Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga untuk mencapai sasarannya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan (*subgoals*) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan *management by*

*objective* atau MBO. Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan. Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan begini, seluruh karyawan akan merasa dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat.

Terkait dengan hal tersebut, kalau kita tarik benang merah dari dua pola pendekatan dalam penentuan sasaran di atas, yang dilakukan di Dinas Pendidikan untuk menentukan sasaran-sasaran yang ada dalam mencapai visi misi yang sudah dirumuskan, Dinas Pendidikan cenderung lebih menggunakan pola yang kedua, yaitu dalam penentuan sasaran-sasaran pendidikan, tidak hanya dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga ada peran aktif pejabat di bawahnya. Dan rumusan sasaran-sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada RPJMD periode 2016-2021.

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk

mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa depan (tahun 2021). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sasaran Strategis (SS.1) : Meningkatkan akses Perilaku Positif Siswa, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran Strategis (IKSS)
SS.1	Meningkatnya Perilaku Positif siswa	Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD minimal baik
		Rata-rata nilai perilaku siswa SD/SMP/SM minimal 76
		Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SMALB minimal baik
		Jumlah orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga
		Prosentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik

2. Terwujudnya Sasaran Strategis (SS.2) : Meningkatkan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu dan terjangkau, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS.2	Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu dan	APK PAUD Usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 57,43%

	terjangkau	Persentase PAUD terakreditasi minimal B sebanyak 397 lembaga
		Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif sekurang-kurangnya 54,60%
		Rata-rata nilai perilaku positif siswa PAUD minimal baik

3. Terwujudnya Sasaran Strategis (SS.3) : Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidik Usia Pendidikan Dasar yang bermutu dan berkeadilan.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS3	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%
		APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 86,91%
		APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 84,10%
		Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 76,07%
		Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 60,00%
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 80
		Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 80

4. Terwujudnya Sasaran Strategis (SS.4) : Meningkatnya literasi angka penduduk usia 15 ke atas melalui akses pendidikan non formal.

		Indikator Kinerja Sasaran
--	--	---------------------------

Kode	Sasaran Strategis	Strategis (IKSS)
SS.4	Meningkatnya literasi angka penduduk usia 15 tahun ke atas melalui akses pendidikan non formal	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,10%
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi sebanyak 120 lembaga
		Minimal 15,60% kabupaten memiliki 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, Kursus dan Pelatihan, atau UPTD)
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 6,11 tahun
		Meningkatnya mutu pendidikan non formal yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sekurang-kurangnya 200 orang
		Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI.

5. Terwujudnya Sasaran Strategis (SS.5) Meningkatkan Profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS.5	Meningkatnya Profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang pendidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional
		Jumlah PTK PNF profesional
		Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM
		Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai SNP
		Prosentase profesionalisme dan distribusi guru dan

		tenaga kependidikan
		Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional
		Jumlah PTK PNF profesional
		Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM

### 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan

#### 4.3.1. Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

Strategi dan arah kebijakan sebagai instrumen lebih lanjut agar penerapan tujuan maupun sasaran dapat dituangkan lebih terarah untuk menentukan program dan kegiatan dalam penentuan proses perencanaan berikutnya. Penentuam strategi dan arah kebijakan dirumuskan agar misi terlaksana efektif. Ada pun arah kebijakan pmerintah daerah yang dirumuskan dalam RPJMD agar pelaksanaan misi terarah selama tahun 2016-2021.

<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya mutu pendidikan di masyarakat	Meningkatkan kualitas mutu pendidikan melalui proses pendidikan yang utuh;	Menuntaskan buta aksara;
		Mengimplementasikan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penerapan kurikulum nasional dengan memberikan penguatan pada pembinaan moral, budi pekerti, bahasa, emosional estetika serta sikap keberagaman;
		Meningkatkan kelayakan sarana prasarana belajar mengajar;
		Meningkatkan kualitas lulusan jenjang pendidikan dasar dan menengah
		Memperbaiki mutu dan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan;

		Meningkatkan kompetensi guru;
		Menerapkan secara bertahap system dan metoda pembelajaran berbasis teknologi informasi;
		Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ternama;
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Peningkatan akses pendidikan bagi anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal serta pendidikan layanan khusus	Peningkatan Perluasaan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan pendidikan layanan khusus;
		Pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu melalui pelayanan kartu pintar;
		Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar melalui rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) sesuai dengan rasio kebutuhan;
		Bantuan operasional sekolah.

#### 4.3.2. Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kab. Indramayu.

Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan diperlukan pengembangan sejumlah sasaran strategis yang akan dicapai pada akhir periode pembangunan pendidikan, yaitu pada tahun 2021.

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016-2021, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran. RPJMD 2016-2021 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pendidikan, oleh karena itu arah kebijakan

dan strategi yang dituangkan ke dalam Revisi Renstra Dinas Pendidikan 2016-2021.

Selanjutnya untuk mewujudkan efektivitas operasional pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan, sesuai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Dinas Pendidikan yang meliputi seluruh organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa dan tantangan pembangunan serta kondisi lingkungan strategis yang dihadapi, pembangunan daerah 2016-2021 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan diarahkan untuk mencapai sasaran pokok/utama pembangunan pendidikan serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

#### 1. Sasaran pokok pembangunan pendidikan

Sasaran pokok pembangunan pendidikan sebagaimana terdapat dalam RPJMD memfokuskan pada delapan sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2021
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	9 thn
2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	100,00%
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,25%
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal	82,35%

	B	
5	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	00,90%

## 2. Sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi

Sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi sebagaimana terdapat dalam RPJMD merupakan sasaran komposit dari pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan memfokuskan pada empat sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2021
1	Meningkatnya perilaku positif siswa	baik
2	Meningkatnya akses pendidikan anak usia Dini (PAUD)	57,43
3	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar	119,09
4	Meningkatnya literasi angka penduduk usia 15 tahun ke atas melalui akses pendidikan non formal	100,00
5	Meningkatnya profesionalitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	88,57

Jika mengacu pada sasaran pokok yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi pemerintah kabupaten Indramayu ke depan, arah kebijakan umum pembangunan pendidikan kabupaten Indramayu

2016-2021 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya mutu pendidikan di masyarakat
2. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan

## BAB V.

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

#### 5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut. Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga/ masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Revisi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran.

Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tahun 2017-2021

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Indramayu tahun 2017-2021 dikembangkan program-program pembangunan bidang pendidikan, yang secara operasional akan diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan pendidikan di seluruh wilayah Indramayu.

Program-program pembangunan pendidikan yang dikembangkan dalam RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 dan tanggung jawab pelaksanaan dan pengelolaannya ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Pendidikan Dasar;
3. Program Pendidikan Non Formal;
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
6. Program Pendidikan Layanan Khusus.

Selain program seperti telah dipaparkan di atas, program pembangunan pendidikan dilakukan pula melalui berbagai program penguatan layanan birokrasi pendidikan. Serangkaian program yang terkait dengan hal tersebut meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan.

Disadari bahwa peningkatan kapasitas layanan birokrasi memiliki arti yang sangat penting bagi keberhasilan program-program pendidikan yang dicanangkan, oleh karena itu urgensi atas pengembangan program-program yang terkait dengan penguatan dan peningkatan layanan birokrasi menjadi relevan.

Program PAUD bertujuan agar semua anak usia dini, laki laki maupun perempuan, terutama yang berasal dari keluarga miskin, memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai potensi yang dimiliki dan

tahap perkembangan atau tingkat usia mereka, sebagai persiapan mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Berdasarkan mutu masukan pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2010/2011, 68,16% siswa baru kelas 1 SD/MI adalah berasal dari tamatan Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), atau sederajat. Ini artinya, masih terdapat 31,84% anak yang belum mengenyam pendidikan TK/RA atau sederajat. Mereka umumnya berasal dari keluarga miskin, dan tinggal di daerah pedesaan. Program ini dititikberatkan pada peningkatan akses dan pelayanan pendidikan melalui jalur formal, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat; juga jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat; serta informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun bertujuan menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar SMP/MTs, termasuk Paket B. Program ini dititikbertakan untuk meningkatkan angka lulusan SD/MI/Paket A untuk melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/Paket B, disertai upaya menurunkan angka

putus sekolah dan mengulang kelas di kalangan peserta didik SMP/MTs/Paket B, sehingga seluruh penduduk usia 13-15 tahun dapat menyelesaikan, setidaknya, pendidikan pada jenjang menengah pertama.

Program Pendidikan Non Formal bertujuan memberikan layanan pendidikan, untuk laki-laki maupun perempuan, terutama penduduk miskin, sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi. Program Pendidikan Non Formal pada periode pembangunan pendidikan 2016-2021 memprioritaskan peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dengan mengintensifkan pemberantasan buta huruf di beberapa kecamatan yang angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah.

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan bertujuan meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik, baik laki-laki maupun perempuan, pada satuan pendidikan formal dan non-formal, negeri maupun swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan

proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, menilai hasil pembelajaran, serta mempunyai komitmen secara profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu diperlukan program-program yang memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya sesuai dengan spesifikasi bidang yang menjadi tugasnya. Disisi lain perlu juga dikembangkan program-program untuk pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kesejahteraan dan pemberian penghargaan yang akan memotivasi kinerja mereka.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di pusat dan daerah, mengembangkan mekanisme tata kelola, meningkatkan koordinasi antar tingkat pemerintahan, mengembangkan kebijakan, melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Program Program Pendidikan Khusus bertujuan untuk meningkatkan asesibilitas anak-anak yang mengalami keterbelakangan fisik maupun mental dalam mengenyam layanan pendidikan. Fenomena yang ada di masyarakat, masih besar jumlah anak, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil belum dapat mengakses layanan pendidikan, oleh karena tidak

tersedianya lembaga pendidikan luar biasa. Untuk itu program sekolah inklusif perlu dikembangkan dan diimplementasikan.

Berdasarkan program pembangunan pendidikan seperti telah dikemukakan di atas, disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, dapat dirumuskan sejumlah kegiatan untuk merealisasikan program yang dimaksud. Di samping itu penyusunan dan perumusan kegiatan juga mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Kegiatan yang terumuskan selanjutnya akan dijadikan acuan oleh Pemerintah Indramayu dalam merealisasikan penggalangan pendanaan. Terkait dengan hal tersebut diperlukan adanya kecermatan dan ketelitian dalam penyusunannya, karena akan menentukan terealisasinya kegiatan di masing-masing bidang khususnya dan secara umum di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Kegiatan yang dirumuskan dengan acuan rencana program pembangunan pendidikan, membuka peluang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu bidang. Oleh karena itu dimungkinkan kegiatan yang dirumuskan dilaksanakan antar bidang.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan program pembangunan pendidikan, selanjutnya perlu dirumuskan indikator kinerja program. Indikator kinerja program menjadi tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan

yang disusun untuk mencapainya. Indikator kinerja program pada matriks yang disusun hanya dipaparkan deskripsinya, capaian secara kuantitatif untuk setiap tahun akan dipaparkan di Bab berikutnya dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

Selanjutnya perlu diungkapkan pula kelompok sasaran program maupun kegiatan. Penetapan kelompok sasaran penting sebagai acuan agar program pembangunan yang direncanakan tertuju pada pihak-pihak yang menjadi sasaran pembangunan. Kekurangtepatan dalam menentukan kelompok sasaran akan mengakibatkan program-program pembangunan pendidikan yang direncanakan tidak berdaya guna, dan pada akhirnya dimungkinkan dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan.

## **5.2. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja daerah memberikan gambaran ukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah yang menjadi target capaian hasil pembangunan di daerah pada akhir periode masa jabatan bupati dan wakil bupati kabupaten Indramayu. Pencantuman indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai peraturan perundangan. Target indikator kinerja daerah Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021 yang disajikan dalam 4 jenis pengelompokan yang pertama dalam bentuk sinergitas dengan target

indikator berdasarkan target kinerja daerah Provinsi Jawa Barat pada periode 2013-2018 sebagaimana telah disampaikan di atas, kedua target indikator sesuai dengan sasaran kabupaten Indramayu sesuai dengan Visi dan Misi yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Indramayu Periode 2016-2021, ketiga Target Indikator Berdasarkan indikator Program Prioritas Daerah dan keempat target indikator berdasarkan : (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (2) Aspek Pelayanan Umum, (3) Aspek Daya Saing Daerah.

### 5.3. Kelompok Sasaran

Penetapan kelompok sasaran mengacu pada 9 (sembilan) program pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan. Di samping itu penetapan kelompok sasaran memberikan kejelasan tentang arah tujuan program beserta pelaksanaan kegiatannya. Kelompok sasaran didasarkan pada program pembangunan pendidikan, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1** Kelompok Sasaran Pembangunan Pendidikan 2016-2021

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KELOMPOK SASARAN</b>
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kelompok penduduk usia 3-6 tahun Lembaga Penyelenggara PAUD
2	Program Pendidikan Dasar	Kelompok penduduk usia 7-15 tahun Lembaga penyelenggara pendidikan dasar
3	Program Pendidikan Non	Kelompok penduduk usia

	Formal	15 tahun ke atas yang buta huruf
		Organisasi penyelenggara pendidikan Non Formal
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tenaga Pendidik pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan
		Tenaga kependidikan pada berbagai jenjang pendidikan
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu
		UPTD Pendidikan Kecamatan dan Satuan Pendidikan di seluruh Kabupaten Indramayu
6	Program Pendidikan Layanan Khusus	Kelompok penduduk yang membutuhkan layanan pendidikan khusus
		Lembaga pendidikan inklusif pada berbagai jenjang
7	Program Lainnya	Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

#### 5.4. Pendanaan Indikatif

## BAB VI.

### INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

#### 6.1. Target Indikator Kinerja

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu mengemban amanat untuk mewujudkan misi pertama yakni : “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan Budaya Lokal”. Secara khusus, berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu bertanggung jawab terhadap pencapaian Tujuan dari misi pertama dimaksud, yakni : “Menyediakan Layanan Pendidikan Yang Merata dan Tejangkau”.

Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai, yakni :

1. Meningkatnya akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu dan terjangkau;
2. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan;
3. Meningkatnya literasi angka penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tabel 6.1

Target Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Program Prioritas dalam RPJMD Kabupaten Indramayu Periode 2016-2021.

NO	PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RENCANA TINGKAT CAPAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PROGRAM PAUD						
	Meningkatnya angka partisipasi bersekolah penduduk 6 tahun ke bawah						
	APK PAUD	45,00	47,25	49,61	52,09	54,70	57,43
	APM PAUD	40,00	42,00	44,10	46,31	48,62	51,05
2	PROGRAM WAJAR DIKDAS SEMBILAN TAHUN						
	Meningkatnya angka partisipasi bersekolah penduduk usia sekolah dasar (SD)						
	APS penduduk usia 7-12 tahun	99,70	99,75	99,80	99,90	100,00	100,00
	APK SD/MI/Paket A	118,40	118,81	119,71	120,61	121,51	122,41
	APM SD/MI/Paket A	99,99	99,99	99,99	100,00	100,00	100,00
	Rasio siswa-guru	20	20	20	20	20	20
	Rasio siswa-sekolah	192	192	192	192	192	192
	Rasio siswa-ruang	32	32	32	32	32	32
	Rasio siswa-rombel	32	32	32	32	32	32
	Nilai Ujian Nasional	71,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
	Meningkatnya angka partisipasi bersekolah penduduk usia sekolah menengah pertama (SMP)						
	APS penduduk usia 13-15 tahun	91,74	93,81	95,88	97,95	100,00	100,00
	APK SMP/MTs/Paket B	86,48	89,48	92,48	95,48	98,48	101,48
	APM SMP/MTs/Paket B	80,02	84,01	88,01	92,00	96,00	100,00
	Rasio guru-siswa	20	20	20	20	20	20
	Rasio siswa-sekolah	384	384	384	384	384	384
	Rasio siswa-ruang	32	32	32	32	32	32
	Rasio siswa-rombel	32	32	32	32	32	32
	Nilai Ujian Nasional	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
3	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL						
	Angka Melek Huruf	97,50	98,48	99,46	100,00	100,00	100,00
	Presentase lulusan UNPendidikan Kesetaraan	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Nilai rata-rata UN Pendidikan Kesetaraan	6,00	6,00	6,20	6,40	6,60	6,80
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan						
	Meningkatnya kualitas guru, kepala sekolah, pengawas sekolah						
	Presentase guru SD kualifikasi D.IV/S.1	97,27	98,27	98,27	99,27	99,77	99,77
	Presentase guru SMP kualifikasi D.IV/S.1	86,46	87,86	88,46	90,78	92,78	94,78
	% guru sertifikasi SD	87,33	87,89	88,33	88,45	89,01	89,01

	% guru sertifikasi SMP	86,46	87,86	88,46	89,32	90,78	90,78
	Nilai rata-rata UKG guru, kepala sekolah, pengawas	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,00
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Ekstrakurikuler						
	Pelayanan Prima penunjang pendidikan fungsi						
	% SD terakreditasi	84,03	84,10	84,17	84,24	84,31	84,38
	% SMP terakreditasi	86,00	86,26	86,39	86,52	86,65	86,78
	Meningkatnya pengembangan karakter siswa ( disiplin, cinta tanah air dan berperilaku hidup sehat)						
	Meningkatnya prestasi siswa dan guru di bidang Seni, OR dan sains	386	300	400	500	600	700
6	Program Pendidikan Layanan Khusus						
	Meningkatnya kesempatan anak (termarginalkan, gepeng, pengguna narkoba, korban trafficking, kesulitan ekonomi) untuk mengikuti pendidikan dan ujian kesetaraan	2925	900	675	550	450	350

Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu 2016-2021 merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah, seperti yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan

*(guidance)* pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*). Renstra saat ini adalah bagian dari konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran Pemerintah Daerah, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat Pemerintah maupun di tingkat SKPD. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai pada tingkat Pemerintah, program, dan kegiatan dalam periode 2016—2021.

Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai

dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK);

2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting. Untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: *pertama* Indikator Kinerja Kunci

(IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; *Kedua* Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Pada tabel bawah ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

### 1. Target kinerja sasaran strategis (SS)

Sasaran Strategis	IKK	satu an	Kondisi awal	TARGET					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Perilaku Positif Siswa	Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD minimal baik	nilai	sedang	sedang	baik	baik	baik	baik	baik
	Rata-rata nilai perilaku siswa SD/SMP/SM minimal baik	nilai	72,00	72,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00
	Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SMALB	indeks	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik
	Jumlah Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga	Orang	100	125	150	175	200	225	250
	Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik	%	70,00	75,00	78,75	83,48	88,48	93,79	99,42
Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini (PAUD)	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 57,43%	%	45,00	45,00	47,25	49,61	52,09	54,70	57,43
	Jumlah PAUD terakreditasi minimal B sebanyak 397	lbg	350	397	417	438	460	483	507

	lembaga								
	Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif minimal 54,60%	lbg	340	366	384	404	424	445	467
	Rata-rata nilai perilaku positif siswa PAUD minimal baik	nilai	81,00	83,00	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00
Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%	%	118,50	118,50	118,62	118,74	118,86	118,97	119,09
	APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%	%	99,99	99,99	100,99	102,00	103,02	104,05	105,09
	APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 84,10%	%	86,48	86,48	86,57	86,65	86,74	86,83	86,91
	APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 84,10%	%	80,02	80,02	80,82	81,63	82,44	83,27	84,10
	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 76,07%	%	60,00	60,00	65,00	67,00	69,00	72,45	76,07
	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 60,00%	%	80,02	80,02	83,45	84,70	85,97	87,26	88,57
	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,10%	%	97,50	97,50	98,48	99,49	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya literasi angka penduduk usia 15 tahun ke atas melalui akses pendidikan non formal	Jumlah lembaga Kursus dan Pelatihan yang terakreditasi sebanyak 120 lembaga	lbg	70	75	80	90	100	110	120
	Jumlah lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan atau UPTD) sekurang-kurangnya 15,60%	lbg	100	120	125	130	135	140	146
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 6,11 tahun	tahun	5,54	5,82	5,88	5,93	5,99	6,05	6,11
	Meningkatnya mutu pendidikan non formal yang berwawasan	Orang	50	77	100	125	150	175	200

	gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sekurang-kurangnya 200 orang								
	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI	%	15,00	16,06	16,87	17,72	18,62	19,56	20,55
Meningkatnya Profesionalitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	74,00	76,88	80,77	84,86	89,15	93,66	98,41
	Jumlah PTK PNF profesional	org	125	150	200	250	300	350	400
	Jumlah PTK PAUD Profesional	org	6.500	6.918	7.022	7.127	7.234	7.343	7.453
	Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM	%	65,00	69,19	72,69	76,37	80,24	84,30	88,57
	Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai SNP	%	75,01	76,88	80,77	84,86	89,15	93,66	98,41
	Prosentase profesionalitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	%	30,00	30,00	30,00	20,00	35,00	15,00	20,00
	Jumlah peserta didik yang melaksanakan pengembangan karakter siswa sekurang-kurangnya 2000 siswa	org	1.000	1.063	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084

## 2. Target Kinerja sasaran Program (SP)

### INDIKATOR KINERJA PROGRAM

NO	PROGRAM/TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
SP.1	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)</b>								
SP.1.1	<b>Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu</b>	<b>Meningkatnya akses PAUD</b>	APK PAUD	45,00	47,25	49,61	52,09	54,70	57,43
			APM PAUD	40,00	42,00	44,10	46,31	48,62	51,05
			Jumlah lembaga PAUD	366	384	404	424	445	467
			Jumlah Kelompok Bermain	60	63	66	69	73	77

			Jumlah TPA	2	3	4	5	6	7
			Jumlah Satuan PAUD Sejenis	397	417	438	460	483	507
			Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	16,45	17,28	18,14	19,05	20,00	21,00
			Jumlah PTK PAUD profesional	215	473	558	643	728	813
SP.1.2	<b>Terwujudnya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PAUD</b>	<b>Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUD</b>	% guru TK bersertifikat pendidik	24,87	24,87	28,87			
							33,87	39,87	46,87
			% PTK PAUD yang memiliki indeks kinerja minimal baik	53,34	53,34	57,84			
							62,84	67,84	73,84
			% PTK PAUD yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosial)	53,34	55,34	59,14			
							62,94	67,74	73,74
			%PTK PAUD yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus.	52,55	52,55	54,55			
							56,55	58,55	60,55
			% PTK PAUD berkualifikasi Si/D4	28,87	28,87	33,87			
							39,87	46,87	46,87
			% PTK PAUD memperoleh penghargaan dan perlindungan	25,00	27,00	54,55			
							56,55	58,55	60,55
			% PTK PAUD yang meningkat karirnya	25,00	27,00	32,00			
							37	42	47
			% PAUD yang memiliki PTK sesuai SNP	15,00	17,00	22,00			
							27	32	37
			Rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
SP.1.3	<b>Terwujudnya Tata Kelola PAUD yang transparan dan akuntabel</b>	<b>Fasilitas, kompetensi SDM dan regulasi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bidang PAUD</b>	Jumlah dokumen data dan informasi PAUD	3	3	3	3	3	3
			Jumlah dokumen program dan anggaran Bidang PAUD	3	3	3	3	3	3

			Jumlah Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Bidang PAUD	3	3	3	3	3	3
			Jumlah dokumen pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	3	3	3	3	3	3
			Jumlah dokumen hukum dan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SPM-NSPK)	1	1	1	1	1	1
			Jumlah dokumen kepegawaian dan pembinaan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1	1	1	1	1	1
			Jumlah SDM Bidang PAUD meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya	10	10	10	10	10	10
			Jumlah satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar dan lembaga/satuan PAUD memperoleh penguatan kapasitas	1	1	1	1	1	1
SP.1.4	<b>Meningkatnya Layanan pengkajian, pengembangan Model/ program, dan pemetaan mutu PAUD</b>	<b>Fasilitas, kompetensi pendidik/tenaga kependidikan yang bermutu</b>	jumlah guru yang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	60	60	60	60	60	60
			Jumlah Lembaga/satuan PAUD yang menerapkan model/program hasil kajian/ pengembangan	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Dokumen NSPK pengkajian dan pengembangan model/program PAUD yang dikembangkan	1	1	1	1	1	1

			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	1	1	1	1	1	1
			Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	1	1	1	1	1	1
			Jumlah dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD	1	1	1	1	1	1
SP.1.5	<b>Terciptanya Penyediaan layanan PAUD</b>	<b>Fasilitas, kompetensi penyelenggara/pendidik dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan PAUD</b>	Jumlah Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD	11.108	14.645	15.377	16.146	16.954	16.674
			Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/revitalisasi	200	500	700	900	1.000	1.500
			Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir	150	750	1.225	1.750	2.100	3.000
			Jumlah Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE	30	100	20	45	75	140
			Jumlah Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD	40	310	465	465	620	775
			Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba dan Apresiasi	10	30	30	35	35	40
			Jumlah lembaga PAUD yang melaksanakan kurikulum 2013	36	30	30	50	50	50
			Jumlah lembaga PAUD baru yang terbentuk	36	30	30	50	50	50
			Jumlah ruang kelas PAUD yang dibangun	1.800	1.800	1.800	2.600	3.250	3.250
			Jumlah ruang kelas baru PAUD yang direhabilitasi	525	525	525	850	1.275	1.275

			Jumlah pengadaan Sarana pendidikan PAUD	1.500	1.500	1.500	220	275	300
			Jumlah Rehabilitasi PAUD	1.125	1.125	1.125	1.700	2.125	3.000
			Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD	1.800	1.800	1.800	2.600	3.250	4.050
			jumlah guru yang mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru PAUD	350	350	350	400	450	500
			Jumlah PAUD Terakreditasi	50	50	50	65	75	100
			Jumlah Lomba-lomba PAUD	50	50	50	75	75	100
			Jumlah Pembangunan Gedung PAUD Baru	1.050	1.074	1.074	1.074	2.148	2.148
SP.2	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR								
SP.2.1	<b>Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Berkualitas</b>	Terlaksananya pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas	APS Penduduk usia 7-12 tahun	99,70	99,75	99,80	99,90	100,00	100,00
			APS Penduduk Usia 13-15 tahun	91,74	93,81	95,88	97,95	100,00	100,00
			APK SD/SDLB/Paket A	118,40	118,81	119,71	120,61	121,51	122,41
			APK SMP/SMPLB/Paket B	86,48	89,48	92,48	95,48	98,48	101,48
			APM SD/SDLB/Paket B	99,99	99,99	99,99	99,99	100,00	100,00
			APM SMP/SMPLB	80,02	84,01	88,01	92,00	96,00	100,00
			Angka Putus Sekolah SD	0,130	0,03	0,02	0,01	0	0
			Angka Putus Sekolah SMP	0,10	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06
			Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA						
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-	91,74	93,81	95,88	97,95	100,00	100,00

			15 Tahun						
			Angka Lulusan (AL) SD-MI	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0
			Angka Lulusan (AL) SMP-MTs	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0
			Rasio siswa - sekolah SD	192	192	192	192	192	192
			Rasio siswa - sekolah SMP	384	384	384	384	384	384
			Rasio siswa - Guru SD	20	20	20	20	20	20
			Rasio siswa - Guru SMP	20	20	20	20	20	20
			Rasio siswa - Ruang SD	32	32	32	32	32	32
			Rasio siswa - Ruang SMP	32	32	32	32	32	32
			Rasio Siswa - Rombel SD	32	32	32	32	32	32
			Rasio Siswa - Rombel SMP	32	32	32	32	32	32
			Nilai Ujian Nasional (UN) SD	71,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
			Nilai Ujian Nasional (UN) SMP	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
SP.2.2	<b>Pembinaan Sekolah Dasar</b>	<b>Tersedianya layanan pendidikan SD</b>	Jumlah ruang kelas SD yang dibangun	6.000	6.000	4.000	5.000	4.000	4.000
			Jumlah ruang kelas baru SD yang direhabilitasi	10.00 0	10.00 0	2.000	4.000	2.000	2.000
			Jumlah RKB yang Rehabilitasi Sekolah Dasar	1.030	10.36 5	12.00 0	14.00 0	16.00 0	18.00 0
			Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.234	-	7.000	6.000	5.000	4.000
			Jumah peserta Ujian Nasional SD	120	100	200	250	300	300
			Jumlah SD yang mendapatkan Sarana pendidikan	3.629	5.984	6.000	6.500	7.000	7.500
			Jumlah peralatan pendidikan untuk sarana prasarana rumah pintar	4.121	-	2.000	2.250	2.500	2.750
			Jumlah Pengadaan koleksi buku pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk jenjang SD (banprop 2017)	2.000	2.382	60	70	80	100
			Jumlah Siswa SD yang mengembangkan bakat dan	31		50	75	100	125

			berprestasi di bidang seni, olah raga dan sains						
			Jumlah Pengadaan paket buku pendidikan lingkungan hidup SD dalam kerangka revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar (banprop 2017)	1.395	1.189	3.000	3.000	4.000	4.000
			Jumlah Pengadaan koleksi buku ensiklopedia untuk perpustakaan SD	465	5.076	300	350	350	350
			Jumlah SD yang menerapkan proses pembelajaran dan penilaian sesuai kurikulum yang berlaku	1.335	-	100	125	150	175
			Jumlah sekolah yang Penyelenggaraan Pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru SD	300	300	500	750	900	1.000
			Jumlah Sekolah SD yang Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	75	50	100	105	110	120
			Jumlah siswa SD yang mengikuti Lomba-lomba Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	12	50	100	125	150	175
			Jumlah siswa SD penerima BOS	160.007	128.748	129.495	##### ##	131.001	131.761
			Jumlah siswa SD penerima bantuan melalui KIP/Bantuan Siswa Miskin (BSM)	90.472	45.000	45.261	45.524	45.788	48.077
			Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SD	46	50	50	75	100	125
SP.2.3	<b>Pembinaan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Tersedianya layanan pendidikan SMP</b>	Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun	531	-	5.000	4.000	3.000	3.000
			Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi	2.433	-	5.000	2.000	2.000	2.000
			Jumlah RKB SMP yang dibangun	3.300	19.409	19.409	19.797	20.193	

			Jumlah laboratorium IPA SMP yang dibangun	2.959	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
			Jumlah laboratorium IPS SMP yang dibangun	2.959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Jumlah laboratorium Matematika SMP yang dibangun	2.959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun	1.622	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000
			Jumlah Penyediaan sarana prasarana sekolah	3.721	375	380	390	400	405
			Jumlah sekolah yang dapat pembangunan pagar halaman	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Jumlah sekolah yang dapat pembangunan jamban	1.194	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			Jumlah pengadaan mebelair SMP	450	300	300	300	300	300
			Jumlah guru SMP yang mengikuti pelatihan kurikulum 2013	690	300	330	330	200	100
			Jumlah Alat laboratorium bahasa berbasis komputer	2.212	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000
			Jumlah Alat laboratorium bahasa berbasis multimedia	2.212	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
			Jumlah Alat peraga IPA, Matematika dan IPS)	1.000	1.000	1.875	1.875	1.875	1.875
			Jumlah Alat peraga Olah Raga	60	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
			Jumlah Alat peraga kesenian	200	900	900	900	200	200
			Jumlah buku perpustakaan	187	200	200	200	200	200
			Jumlah koleksi buku pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk jenjang SMP (banprop 2017)	232	1.618	12	12	12	12
			Jumlah Siswa SMP yang mengembangkan bakat dan berprestasi di bidang seni, olah raga dan sains	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

			Jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	600	600	600	600	600	600
			Jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan akreditasi	112	112	112	112	112	112
			Jumlah SMP yang mendapatkan ruang penunjang lainnya	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
			Jumlah siswa SMP yang mengikuti pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	722	700	700	700	700	700
			Jumlah siswa SMP yang mengirimkan pemilihan duta sanitasi pelajar SMP	25	50	50	50	50	50
			Jumlah siswa SMP yang mengikuti penyelenggaraan Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (Galaksi) dan Pasanggiri	175	75	75	100	100	125
			Jumlah sekolah SMP yang melaksanakan kegiatan TUB, UKS, SBL dan Bela Negara	600	550	550	550	550	550
			Jumlah sekolah SMP yang melaksanakan pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural	50	50	60	70	80	90
			Kegiatan Penyelenggaraan Expo Pendidikan	75	75	75	75	75	75
			Jumlah sekolah SMP yang Mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional	50	150	150	150	150	150
			Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	25	25	15	20	25	25

			Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP	135	20	20	21	21	22
			Jumlah siswa SMP penerima BOS	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
			Jumlah siswa SMP penerima bantuan melalui KIP/Bantuan Siswa Miskin (BSM)	10.160	6.260	6.280	6.300	6.320	6.340
			Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SMP	62	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
SP.3	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL								
SP.3.1	<b>Terciptanya keluasan dan pemerataan akses kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan.</b>	<b>Meningkatnya Akses Pendidikan Kursus dan Pelatihan PNF</b>	AMH (Angka Melek Huruf)	97,50	98,48	99,46	100,00	100,00	100,00
			Persentase Lulusan UN Pendidikan Kesetaraan	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Nilai UNPK	6,00	6,00	6,20	6,40	6,60	6,80
			Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang berkinerja Baik	50,00	50,00	50,00	50,00	75,00	80,00
			Jumlah Lembaga PKBM	10	10	10	10	10	10
			Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan Peningkatan dan Pembelajaran Pendidikan Non Formal	25	25	25	25	25	25
			Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha	20	20	20	20	20	20
			Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	5	5	5	5	5	5

SP.3.2	<b>Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan</b>	<b>Meningkatnya Akses Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan PNF</b>	jumlah Angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	16.950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			Jumlah remaja dan orang dewasa yang belum lulus pendidikan menengah memperoleh kualifikasi setara pendidikan dasar dan menengah	50	50	50	50	50	50
SP.3.3	<b>Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keluarga yang bermutu</b>	<b>Meningkatnya Akses Pendidikan Keluarga yang bermutu</b>	Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga	1	1	1	1	1	1
			Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga	25	25	25	25	25	25
			Jumlah komite sekolah dan madrasah serta persatuan orangtua murid (POM) yang melaksanakan Sosialisasi pendidikan karakter dan budaya prestasi	31	31	31	31	31	31
			Jumlah lembaga/satuan pnf menyelenggarakan pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup	10	10	10	10	10	10
SP.3.4	<b>Terwujudnya tatakelola dan partisipasi Pemerintah Daerah, Lembaga dan Masyarakat</b>	<b>Fasilitas, kompetensi SDM dan regulasi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya</b>	Jumlah model/program PNF yang dibakukan dan diterapkan	5	5	5	5	5	5
			Jumlah Dokumen data dan informasi PNF	3	3	1	1	1	1
			Jumlah dokumen program dan anggaran Bidang PNF	3	10	11	11	12	12
			Jumlah Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Bidang PNF	3	3	1	1	1	1

			Jumlah dokumen hukum dan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1	1	1	1	1	1
			Jumlah dokumen kepegawaian dan pembinaan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Dokumen kerjasama, kehumasan, dan publikasi	1	1	1	1	1	1
			Jumlah SDM Bidang PNF meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya	10	10	60	60	60	60
			Jumlah satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar dan lembaga PNF memperoleh penguatan kapasitas	1	1	5	5	5	5
			Jumlah dokumen Pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1	1	1	1	1	1
SP.3.5	<b>Layanan pengkajian, pengembangan model/program, dan pemetaan mutu PNF</b>	<b>Fasilitas, kompetensi pendidik/tenaga kependidikan dan &amp; DIKMAS Model/Program, PNF yang bermutu</b>	Jumlah Lembaga/satuan PNF yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan	31	31	31	31	31	31
			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	1	1	1	1	1	1

SP.3.6	<b>Penyediaan layanan kursus dan pelatihan</b>	<b>Fasilitas Kursus dan Pelatihan, kompetensi penyelenggara/ pendidik Kursus dan pelatihan, dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD)</b>	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	150	200	60	60	60	60
			Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/ berwirausaha	150	200	60	60	60	60
			Jumlah lembaga kursus dan pelatihan rujukan	5	35	10	10	10	10
			Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	5	10	10	10	10	10
			Jumlah jenis kompetensi kerja terstandarisasi nasional	3	5	5	5	5	5
			Jumlah tempat uji kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina	1	2	4	4	4	4
			Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi	500	500	100	100	100	100
			Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	50	65	65	75	75	100
			Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	50	65	65	75	75	100

			Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi	50	50	50	60	70	70
			Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	100	20	5	5	5	5
			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	1	1	1	1	1	1
SP.3.7	<b>Penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan</b>	<b>Fasilitas, kompetensi penyelenggara/pendidik dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD)</b>	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	700	-	1.000	1.000	1.000	1.000
			Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pra paket A	100	200	200	200	200	200
			Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pra paket B	95	125	125	125	125	125
			Jumlah warga belajar yang menyelenggaraan Paket B Pesantren Salafiah	25	25	50	50	50	50
			Jumlah warga belajar penyelenggaraan Paket B Kelas Baru	125	125	80	100	100	100

			Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pra paket C	150	240	240	240	240	240
			Jumlah peserta Ujian Nasional Paket A, B dan C	2	3	3	3	3	3
			Jumlah warga belajar penyelenggaraan Paket C setara SMA Kelas Baru	180	180	200	225	250	275
			Kegiatan pengembangan pendidikan kesetaraan Bintek Tutor Paket B dan Paket C	264	264	275	275	275	275
			Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan	60	60	60	60	60	60
			Jumlah PKBM Memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM	10	10	10	10	10	10
			Jumlah TBM memperoleh bantuan Sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat	5	5	5	5	5	5
			Jumlah lembaga TBM baru yang dibentuk di satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar	2	2	2	2	2	2
			Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran	1	1	1	1	1	1
			Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, lomba dan apresiasi	2	2	2	2	2	2
			Kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan Lomba PTK PNF	1	1	1	1	1	1
			Kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan Pameran Kursus	1	1	1	1	1	1

SP.4	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>									
SP.4.1	<b>Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUD</b>	<b>Terwujudnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUD yang bermutu</b>	Prosentase Guru bersertifikat pendidik	85,00	85,00	95,00	100,0 0	100,0 0	100,0 0	
			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	
			Nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan	58,00	58,00	59,00	80,00	81,00	85,00	
			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosial)	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	
SP.4.2	<b>Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dikdas</b>	<b>Terwujudnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang bermutu</b>	Prosentase guru SD kualifikasi S.1/D.IV	97,27						
					98,27	98,27	99,27	99,77	99,77	
			Prosentase guru SMP kualifikasi S.1/D.IV	86,46	87,86	86,46	89,32	90,78	90,78	
			Persentase guru sertifikasi jenjang SD	87,33	87,89	88,33	88,45	89,01	89,01	
			Persentase guru sertifikasi jenjang SMP	86,46	87,86	86,46	89,32	90,78	90,78	
			Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	24	-	100	100	100	125	
			Jumlah guru yang melaksanakan Uji Kompetensi Guru dan Penilaian Kinerja kepala Sekolah Dasar	40	1.000	1.500	1.750	200	1.500	
			Jumlah guru yang mendapatkan Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga	300	300	250	300	350	1.500	

			Fungsional SD						
			Kegiatan yang mendapat dukungan Pelaksanaan Pemilihan Tenaga Fungsional dan Komite Sekolah SD Berprestasi	25	93	93	93	100	93
			Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dan Pengawas SD	100	100	100	330	50	50
			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang memiliki indeks kinerja minimal baik	60,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
			Nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SD	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosial)	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus (Inklusi)	2	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
SP.4.3	<b>Pembinaan PTK PAUD yang merata.</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan dan kualitas PTK PAUD yang merata.</b>	Persentase PTK PAUD berkualifikasi S1/D4	21,87	28,87	33,87	39,87	46,87	46,87
			Persentase PTK PAUD memperoleh peningkatan kompetensi	50,00	52,55	54,55	56,55	58,55	60,55
			Persentase PTK PAUD memperoleh penghargaan dan perlindungan	35,00	2,00	54,55	56,55	58,55	60,55
			Persentase PTK PAUD yang meningkat karirnya	50,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00

			Persentase PAUD yang memiliki PTK sesuai dengan SNP	35,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00
SP.4.4	<b>Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD</b>	<b>Meningkat ketersediaan, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraannya dalam rangka penguatan peran strategis untuk mewujudkan revolusi mental</b>	Jumlah pengawas yang bersertifikat pendidik	163	7	8	9	10	10
			Jumlah guru TK/TPA/KB memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4	45	45	47	50	52	55
			Jumlah Guru TK penerima tunjangan profesi	149	214	264	314	364	414
			Jumlah Guru TK/TKLB penerima tunjangan Profesi guru bukan PNS	173	193	393	593	793	993
			Jumlah Guru TK/TKLB penerima tunjangan fungsional guru bukan PNS	87	90	120	150	180	210
			Kegiatan dukungan Manajemen Pelaksanaan Pembinaan Guru dan Tendik PAUD	120	120	125	130	135	140
SP.4.5	<b>Pembinaan Guru Pendidikan Dasar</b>	<b>Meningkatnya profesionalisme Guru Pendidikan Dasar</b>	Jumlah guru Sekolah Dasar (SD) yang bersertifikat pendidik	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251
			Jumlah Guru SD yang menerima tunjangan profesi tambahan (Tamsil)	335	335	335	335	335	335
			Jumlah guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersertifikat pendidik	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
			Jumlah Guru Dikdas yang menerima tunjangan profesi guru bukan PNSD	205	205	205	205	205	205

			Jumlah Guru SMP yang menerima tunjangan profesi tambahan (Tamsil)	77	77	77	77	77	77
			Jumlah Guru Dikdas yang menerima tunjangan fungsional guru bukan PNS	314	314	314	314	314	314
			Jumlah Guru Dikdas dalam jabatan berkualifikasi akademik S-1/D-4	660	660	660	660	660	660
SP.4.6	<b>Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan</b>	<b>Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya</b>	Jumlah guru yang berkompeten bidang TK/PLB	215	249	262	275	224	220
			Jumlah guru yang berkompeten bidang IPA	170	170	180	190	195	200
			Jumlah guru yang berkompeten bidang IPS dan Kewarganegaraan	200	200	250	260	280	300
			Jumlah guru yang berkompeten bidang Matematika	211	211	235	245	250	280
			Jumlah guru yang berkompeten bidang Penjas dan BK	122	122	142	155	165	175
			Jumlah guru yang berkompeten bidang Bahasa	356	356	365	380	385	390
			Jumlah guru yang berkompeten bidang Seni dan Budaya	31	31	50	55	60	70
			Jumlah pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah yang kompeten	4	4	5	6	7	8
			Nilai rata-rata UKG Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,00
SP.5	<b>PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>								
SP.5.1	Terselenggaranya pelayanan pendidikan kepada masyarakat	<b>Pelayanan Prima penunjang fungsi pendidikan</b>	PAUD terakreditasi	20,00	24,71	29,42	34,13	38,84	43,55
			SD terakreditasi	84,03	84,10	84,17	84,24	84,31	84,38
			SMP terakreditasi						

				86,00	86,26	86,39	86,52	86,65	86,78
		<b>Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan</b>	Persentase TK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	40,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00
			Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	65,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
			Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	65,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
			Jumlah layanan pengendalian internal yang berfungsi dengan baik	20,00	20,00	25,00	52,00	30,00	32,00
			Kegiatan yang mendapat dukungan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	1	1	1	1	1	1
			Jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah	1	1	25	52	30	32
			Kegiatan yang mendapat dukungan Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK),	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
			Kegiatan Penataan Asset Milik Daerah	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Pengadaan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik	1	1	1	1	1	1
			Jumlah orang yang mengikuti Bintek sistem aplikasi dapodik bagi operator	1.085	1.085				
			Kegiatan Penyelenggaraan Bintek dan sosialisasi implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	1	1	1	1

			Jumlah sekolah yang dimonitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	1,00	1	1	1
			Jumlah guru SD yang menyelenggarakan diseminasi DBE3-USAID Prioritas	250	250	300	350	400	500
			Kegiatan penyusunan dokumen Peraturan Perundang-undangan tentang sarpras pendidikan	1	1	1	1	1	1
			Jumlah siswa yang mengikuti lomba-lomba Penyelenggaraan Olimpiade Sains Tk. Kabupaten Indramayu	1.350	1.350	1.400	1.410	1.415	1.420
			Jumlah siswa yang mengikuti Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Kabupaten, Wilayah III dan Propinsi	80	80	85	85	90	90
			Kegiatan penyelenggaraan Pengembangan dan Pembinaan Kesiswaan	1.593	1.593	1.600	1.600	1.625	1.625
			Kegiatan penyelenggaraan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS dan SBL)	186	186	186	186	186	186
			Kegiatan Penyelenggaraan TUB dan Paskibra Kabupaten Indramayu	188	188	188	188	188	188
			Kegiatan operasional Penyelenggaraan Penunjang Tunjangan Tambahan dan Profesi Guru	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241
			Kegiatan operasional Penyelenggaraan Penunjang Bantuan Operasional Sekolah (BOS Pusat)	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
			Pelatihan peningkatan kompetensi guru	250	250	250	250	250	250

			Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan serta Koordinasi lintas sektoral bidang pendidikan	25	25	25	52	30	32
			Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Gerakan Membiasakan Budaya Membaca 15 menit setiap hari	20	20	25	52	30	32
			Jumlah Forum Koordinasi Komite Sekolah (FKKS)	31	31	31	31	31	31
SP.6	<b>PROGRAM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS</b>								
SP.6.1	<b>Terselenggaranya sistem perencanaan yang andal</b>	terselenggaranya pendidikan bagi anak yang termarginalkan	Jumlah PKBM yang menyelenggarakan Pendidikan Ketrampilan bagi anak yang termarginalkan dan terlantar	120	120	150	275	300	450
SP.6.2	<b>Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus</b>	<b>Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan PLK</b>	Jumlah siswa /anak berkebutuhan khusus penerima bantuan atau beasiswa	25	25	25	25	25	25
			Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB /SLB/SM Inklusi/SM Cibi/SM keberbakatan yang menerima BOS	25	25	25	25	25	25
			Jumlah pusat pengembangan PKLK yang dibangun	1	1	1	1	1	1
			Jumlah ruang kelas SDLB/SMPLB/SMLB / SLB yang direhabilitasi	5	5	5	5	5	5
			Jumlah sentra/sub sentra/SLB pembina yang direhabilitasi	3	3	3	3	3	3
			Jumlah unit SDLB/SMPLB/SMLB baru yang dibangun	1	1	1	1	1	1
			Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	5	5	5	5	5	5
			Jumlah asrama siswa yang dibangun	1	1	1	1	1	1

			Jumlah paket layanan pendidikan pada SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang melaksanakan kurikulum yang berlaku	5	5	5	5	5	5
			Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB)	5	5	5	5	5	5
			Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa	3	3	3	3	3	3
			Jumlah sekolah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan peralatan pendidikan	5	5	5	5	5	5
			Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan ruang penunjang lainnya	3	3	3	3	3	3
			Jumlah sekolah berwawasan pendidikan inklusif	5	5	5	5	5	5
			Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan pembinaan akreditasi menuju SSN	5	5	5	5	5	5
			Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	3	3	3	3	3	3
			Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis PKLK	5	5	5	5	5	5
			Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB yang menerapkan pendidikan karakter	5	5	5	5	5	5
SP.7	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN LAINNYA</b>								

SP.7.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	Meningkatnya pemanfaatan data pokok dan statistik pendidikan	Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan	90	90	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase penyebaran hasil pendayagunaan data dan statistik	90	90	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase terintegrasinya pendataan pusat dan daerah	94	94	96,82	99,72	100,00	100,00
		Penyediaan data dan statistik pendidikan	Persentase satuan pendidikan dan proses pembelajaran yang tervalidasi dalam data warehouse	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase tersedianya data referensi pendidikan	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase peserta didik dan PTK yang tervalidasi dalam data warehouse	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase UPT pendidikan yang telah mengimplementasikan sistem verval referensi pendidikan	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase UPT pendidikan terkoordinasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase UPT yang telah terintegrasi dengan backbone pengelolaan data pendidikan Kemendikbud	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase kesesuaian laporan keuangan dengan peraturan perundangundangan	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Jumlah satuan pendidikan dalam rangka pelayanan data dan statistik pendidikan	1.095	1.095	1.097	1.100	1.105	1.110

			Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan kepegawaian	1	1	1	1	1	1
		<b>Terlaksananya pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</b>	Persentase arsip dan dokumentasi terintegrasi dengan Kantor arsip dan dokumentasi Pemerintah Daerah	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Jumlah satuan pendidikan yang terkoneksi jaringan online	1.095	1.095	1.097	1.100	1.105	1.110
			Jumlah pegawai yang SDM terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK	1.095	1.095	1.097	1.100	1.105	1.110
			Jumlah pengaduan masyarakat dari pemangku kepentingan pendidikan	5	5	5	5	5	5
		<b>Meningkatnya kualitas layanan Komunikasi dan layanan masyarakat</b>	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Pendidikan	sedang	sedang	sedang	baik	baik	baik
			Persentase pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat dan efektif	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		<b>Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Jumlah aparatur Dinas Pendidikan yang mengikuti diklat jabatan, teknis, dan fungsional	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
		<b>Peningkatkan layanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum</b>	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	12	12	12	12

			Pengadaan alat tulis kantor, Barang cetakan dan penggandaan	12	12	12	12	12	12
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	12	12	12	12	12
			Penyediaan makanan dan minuman	12	12	12	12	12	12
			Rapat-rapat koordinasi/konsultasi/ kunjungan ke dalam dan luar daerah	12	12	12	12	12	12
		<b>Tercapainya Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan</b>	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	6	6	6	6	6	6
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3	3	3	3	3	3
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/ mobil jabatan	15	15	15	15	15	15
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	1	1	1	1	1	1
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	3	3	3	3	3	3
		<b>Peningkatan pelayanan prima bidang pengelolaan anggaran dan akuntabilitas</b>	Persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan	85,00	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00
			Persentase Sekretariat/Bidang yang laporan Keuangannya sesuai dengan peraturan perundangan	85,00	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12	12	12	12	12	12

			Skor kualitas LAKIP Dinas Pendidikan menurut penilaian Pemerintah Daerah	7,00	7,00	7,30	7,50	7,70	7,90
SP.7.2	<b>Peningkatan efektivitas pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara</b>	<b>Tercapainya peningkatan efektivitas pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN)</b>	Persentase standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase pegawai yang telah melaksanakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai	80,00	80,00	85,00	87,00	90,00	95,00
			Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase pegawai dengan kinerja minimal "baik"	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase pencapaian target kinerja program	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
SP.7.3	<b>Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>	<b>Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Jumlah aparatur Dinas Pendidikan yang mengikuti Diklat jabatan, teknis dan fungsional	5	5	5	5	5	5
			Dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
			Meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
		<b>Penilaian Kinerja Dinas Pendidikan</b>	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095

			Nilai Minimal LAKIP Dinas Pendidikan pada tahun 2021	71	71	76	79	82	85
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	sedang	sedang	baik	baik	baik	baik
			Opini Inspektorat terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	baik	baik	baik	baik	baik	baik

## 6.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan.

Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara, diperhatikan pula Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, sedangkan yang mengatur cukup terperinci adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Pembagian kewenangan pendidikan menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu kewenangan tingkat pemerintah/kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun substansi kewenangannya mencakup bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik/guru dan tenaga

kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Penjelasan mengenai kewenangan tingkatan pemerintahan dan bidang yang dikelola.

Berbagai capaian yang telah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sampai dengan tahun 2021, merupakan sasaran antara yang diharapkan memiliki kontribusi yang nyata terhadap tingkat capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Indramayu.

## **BAB VII PENUTUP**

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Kabupaten Indramayu merupakan acuan legal bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk mengembangkan program dan kegiatan ke depan selama periode tahun 2016-2021. Sebagai acuan pengembangan program dan kegiatan ke depan, Renstra disusun dengan memperhatikan dan mencermati kecenderungan dinamika perkembangan pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait dengannya, seperti bidang sosial, ekonomi, budaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Catatan penting yang perlu disampaikan dalam Revisi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 adalah acuan tujuan pembangunan pendidikan di Indramayu yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Indramayu Tahun 2016-2021, yaitu meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Seperti diketahui tujuan pembangunan tersebut pada prinsipnya identik dengan prioritas pembangunan bidang pendidikan Indramayu periode 2011-2015, yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan.

Hal ini dapat dimaklumi berdasarkan pemikiran bahwa pengambil kebijakan di Kabupaten Indramayu masih memandang persoalan pemerataan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan belum sepenuhnya terpecahkan dan dicapai secara memuaskan. Meskipun demikian perlu disadari bahwa dalam naskah *Grand Design* Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2019, pada periode

pembangunan pendidikan 2016-2021 Indramayu seharusnya sudah memasuki tahap daya saing regional, hal tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, dimana pada periode pembangunan 2015-2020 tahap pembangunan pendidikan di Indonesia telah memasuki tahap peningkatan mutu, relevansi dan daya saing regional. Dengan mempertimbangan hal tersebut, maka visi yang dikembangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu yang memiliki keunggulan komparatif, religius, amanah, taat dan inovatif”**. Berdasarkan visi tersebut, dikembangkan misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan yang tetap mengacu pada tujuan pembangunan pendidikan Indramayu seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021, diperkaya dengan tujuan untuk mencapai daya saing dan daya sanding baik pada tataran nasional maupun global.

Sejumlah tantangan pada dasarnya masih menghadang dalam pengupayakan pembangunan pendidikan di Indramayu, tantangan yang nampak nyata adalah tingginya tingkat diferensiasi capaian pembangunan pendidikan yang terjadi di antara kecamatan di wilayah Indramayu. Capaian-capaian keberhasilan secara merata di tingkat kabupaten seringkali menjadi nampak kurang mengembirakan, karena rendahnya capaian pembangunan pendidikan di beberapa kecamatan yang laju pembangunannya memang lambat. Untuk itu prioritas sasaran pembangunan pendidikan perlu diarahkan pada beberapa kecamatan yang tertinggal dalam

pembangunan pendidikannya, dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Upaya yang demikian seharusnya diikuti oleh peningkatan koordinasi dan kerjasama antara kecamatan yang tertinggal dengan kecamatan yang mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan pendidikannya.

**TABEL : 6.3**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**  
**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN INDRAMAYU 2016-2021**

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Sumber Dana/Data	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
				2016			2017			2018		2019		
				Target	Realisasi	%	Target	realisasi	%	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3		5		6					7	8	9	10
<b>01. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU</b>														
<b>SS.1</b>	<b>Meningkatnya Perilaku Positif Siswa</b>													
IKSS 1.1	Rata-rata nilai peralaku siswa PAUD minimal baik	nilai	PAUD	sedang			baik					baik		baik
IKSS 1.2	Rata-rata nilai peralaku siswa SD/SMP/SM minimal baik	nilai	disdik	72/83			72/85					73/87		74/89
IKSS 1.3	Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SMALB	indeks	disdik	baik			baik					baik		baik
IKSS 1.4	Jumlah Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga	orang		125			150					175		200
IKSS 1.5	Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang berkinerja Baik	%		75,00			78,75					83,48		88,48
<b>SS.2</b>	<b>Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini (PAUD)</b>													
IKSS.2.1	APK PAUD usia 3-6 tahun	%	PAUD	45,00			47,25	51,36	108,70			49,61		52,09
IKSS.2.2	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	lembaga	UPA	397			417					438		460
IKSS.2.3	Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	lembaga	PAUD	366			384					404		424
<b>SS.3</b>	<b>Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar</b>													
IKSS.3.1	APK SD/SDLB/Paket A	%	SD	118,50	118,40	99,9	118,81	116,59	98,13			119,71		118,86
IKSS.3.2	APM SD/SDLB	%	SD	99,99	99,99	100,0	99,99	109,10	109,11			99,99		103,02
IKSS.3.3	APK SMP/SMPLB/Paket B	%	SMP	86,48		-	89,48	91,39	102,13			86,65		86,74
IKSS.3.4	APM SMP/SMPLB	%	SMP	80,02		-	80,82	78,45	97,07			81,63		82,44
IKSS.3.5	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	%	UPA	60,00		-	65,00					67,00		69,00
IKSS.3.6	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	%	UPA	82,00		-	83,45					84,70		85,97
IKSS.3.7	Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	%	SD	50,00		-	52,00					54,00		56,00
IKSS.3.8	Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	%	SMP	75,00		-	78,75					83,48		88,48

IKSS.3.9	Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB	nilai	SD	55,00		-	72,00				74,00		76,00
IKSS.3.10	Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB	nilai	disdik	55,00		-	60,00				65,00		70,00
IKSS.3.11	Jumlah satuan pendidikan yang membaca minimal 15 menit sebelum pelajaran dimulai	lembaga	disdik	1667		-	1.667				1.676		1.684
IKSS.3.12	Jumlah PTK yang membaca buku literatur minimal 15 menit sebelum proses pembelajaran.	orang	disdik	90		-	90				180		270
IKSS.3.13	Jumlah satuan pendidikan yang telah menyelenggarakan tata kelola kelembagaan.	lembaga	disdik	1.659		-	1.667				1.676		1.684
IKSS.3.14	Persentase pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	%	disdik	75,27		-	79,04				82,99		87,14
IKSS.3.15	Jumlah sekolah yang menerapkan model pembelajaran berbasis TIK;	lembaga	disdik	1095		-	1.095				1.095		1.095
IKSS.3.16	Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang menyelenggarakan pembinaan karakter	lembaga	disdik	1667		-	1.667				1.676		1.684
<b>SS.4</b>	<b>Meningkatnya literasi angka penduduk usia 15 tahun ke atas melalui akses pendidikan non formal</b>												
IKSS 4.1	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun	%	BPS	97,50	97,50	100,0	98,48	91,14	92,55		99,49		100,00
IKSS 4.2	Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang terakreditasi	lembaga	PNF	75		-	80				90		100
IKSS 4.3	Jumlah lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan atau UPTD)	lembaga	PNF	120		-	125				130		135
IKSS 4.4	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	PNF	6,75	5,54	82,1	7,20	5,96	82,78		7,65		8,10
	Rata-rata harapan Lama Sekolah (HLS)		PNF	12,59	12,59	100,0	13,07	12,93	98,93				14,03
IKSS 4.5	Meningkatnya mutu pendidikan non formal yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	orang	PNF	77		-	100				125		150
IKSS 4.6	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI	%	PNF	16,06		-	16,87				17,72		18,62
<b>SS.5</b>	<b>Meningkatnya Profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan</b>												
IKSS.5.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%		76,88		-	80,77				844,86		89,15
IKSS.5.2	Jumlah PTK PNF profesional	orang		150		-	200				250		300
IKSS.5.3	Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM	%	disdik	69,19		-	72,69				76,37		80,24

IKSS.5.4	Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai SNP	%	disdik	76,88		-	80,77				84,86		89,15
IKSS.5.5	Prosentase profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	%	disdik	30		-	30,00				20,00		35,00
IKSS.5.6	Jumlah peserta didik yang melaksanakan pengembangan karakter siswa	orang	disdik	1.063		-	1.084				1.084		1.084
IKSS.5.7	Jumlah siswa dan guru yang berprestasi di bidang Seni, OR dan sains	orang	disdik	381		-	381				381		381
IKSS.5.8	Jumlah PTK PAUD Profesional	orang	disdik	6.918		-	7.022				7.127		7.234
<b>02. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)</b>													
<b>SP.2.1</b>	<b>Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu</b>												
<b>SK.2.1.1</b>	<b>Meningkatnya akses PAUD</b>												
IKP 2.1.1.1	APK PAUD	%	PAUD	45,00	44,34	98,5	47,25	51,36	108,70		49,61		52,09
IKP 2.1.1.2	APM PAUD	%	PAUD	40,00	36,46	91,2	42,00	23,55	56,07		44,10		46,31
IKP 2.1.1.3	Jumlah lembaga PAUD	lembaga	PAUD	366	366,00	100,0	384				404		424
IKP 2.1.1.4	Jumlah Kelompok Bermain	lembaga	PAUD	60	60,00	100,0	63				66		69
IKP 2.1.1.5	Jumlah TPA	lembaga	PAUD	2	1,00	50,0	3				4		5
IKP 2.1.1.6	Jumlah Satuan PAUD Sejenis	lembaga	PAUD	397	397,00	100,0	417				438		460
IKP 2.1.1.7	Angka Partisipasi Sekolah TK	*		99,70	100,00	100,3	47,25	51,36	98,53		99,10		
IKP 2.1.1.8	Angka Putus sekolah jenjang TK	%		0,13	0,01	7,7	10,00	1,86	18,60		5,00		
IKP 2.1.1.9	Angka Pendidikan Yang ditamatkan/Angka Kelulusan (AL)	%		100,00	100,00	100,0	100,00	98,14	98,14		100		
IKP 2.1.1.10	Angka Melanjutkan dari TK/RA ke SD/MI	%		100	100,00	100,0	100,00	97,70	97,70		100		
IKP 2.1.1.11	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	PAUD	16,45		-	17,28				18,14		19,05
IKP 2.1.1.12	Jumlah PTK PAUD profesional	orang	PAUD	215		-	473				558		643
<b>SP.2.2</b>	<b>Terwujudnya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PAUD</b>												
<b>SK.2.2.1</b>	<b>Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUD</b>												
IKP.2.2.1.1	% guru TK bersertifikat pendidik	%	disdik	24,87		-	24,87	24,00	96,50		28,87		33,87
IKP.2.2.1.2	% PTK PAUD yang memiliki indeks kinerja minimal baik	%	disdik	53,34		-	53,34				57,84		62,84

IKP.2.2.1.3	% PTK PAUD yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosisl)	%	disdik	53,34		-	55,34				59,14		62,94	
IKP.2.2.1.4	%PTK PAUD yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus.	%	disdik	52,55		-	52,55				54,55		56,55	
IKP.2.2.1.5	% PTK PAUD berkualifikasi Si/D4	%	disdik	28,87		-	28,87	8,06	27,92		33,87		39,87	
IKP.2.2.1.6	% PTK PAUD berkualifikasi S2/S.3	%		5,00		-	8,00	1,06	13,25		9,00			
IKP.2.2.1.7	% PTK PAUD memperoleh penghargaan dan perlindungan	%	disdik	25,00		-	27,00				54,55		56,55	
IKP.2.2.1.8	% PTK PAUD yang meningkat karirnya	%	disdik	25,00		-	27,00				32,00		37,00	
IKP.2.2.1.9	% PAUD yang memiliki PTK sesuai SNP	%	disdik	15,00		-	17,00				22,00		27,00	
IKP.2.2.1.10	Rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD	rasio	disdik	1/4		-	1/4				1/4		1/4	
<b>SP.2.3.</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola PAUD yang transparan dan akuntabel</b>													
<b>SK.2.3.1</b>	<b>Fasilitas, kompetensi SDM dan regulasi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bidang PAUD</b>													
IKP.2.3.1.1	Jumlah dokumen data dan informasi PAUD	dokumen	PAUD	3		-	3			75	3	75	3	75
IKP.2.3.1.2	Jumlah dokumen program dan anggaran Bidang PAUD	dokumen	PAUD	3		-	3			60	3	60	3	60
IKP.2.3.1.3	Jumlah Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Bidang PAUD	dokumen	PAUD	3		-	3			45	3	45	3	45
IKP.2.3.1.4	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	dokumen	PAUD	3		-	3			50	3	50	3	50
IKP.2.3.1.5	Jumlah dokumen hukum dan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SPM-NSPK)	dokumen	PAUD	1		-	1			75	1	75	1	75
IKP.2.3.1.6	Jumlah dokumen kepegawaian dan pembinaan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	dokumen	PAUD	1		-	1			30	1	30	1	30
IKP.2.3.1.8	Jumlah SDM Bidang PAUD meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya	dokumen	PAUD	10		-	10			50	10	50	10	50
IKP.2.3.1.9	Jumlah satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar dan lembaga/satuan PAUD memperoleh penguatan kapasitas	dokumen	PAUD	1		-	1			30	1	30	1	30

<b>SP.2.4.</b>	<b>Meningkatnya Layanan pengkajian, pengembangan Model/ program, dan pemetaan mutu PAUD</b>												
<b>SK.2.4.1</b>	<b>Fasilitas, kompetensi pendidik/tenaga kependidikan yang bermutu</b>												
IKP.2.4.1.1	Jumlah guru yang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	orang	APBD	60	-	60		40	60	50	60	60	
IKP.2.4.1.2	Jumlah Lembaga/satuan PAUD yang menerapkan model/program hasil kajian/ pengembangan	dokumen	PAUD	1	-	1		60	1	60	1	60	
IKP.2.4.1.3	Jumlah Dokumen NSPK pengkajian dan pengembangan model/program PAUD yang dikembangkan	dokumen	PAUD	1	-	1		60	1	60	1	60	
IKP.2.4.1.4	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	dokumen	PAUD	1	-	1		60	1	60	1	60	
IKP.2.4.1.5	Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	dokumen	PAUD	1	-	1		60	1	60	1	60	
IKP.2.4.1.6	Jumlah dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD	dokumen	PAUD	1	-	1		60	1	60	1	60	
<b>SP.2.5</b>	<b>Terciptanya Penyediaan layanan PAUD</b>												
<b>SK.2.5.1</b>	<b>Fasilitas, kompetensi penyelenggara/pendidik dan regulasi/ kebijakan penyelenggaraan PAUD</b>												
IKP.2.5.1.1	Jumlah Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD	lembaga	APBN	675	-	762		14.645	800	15.377	840	16.146	
IKP.2.5.1.2	Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/ revitalisasi	lembaga	APBN	2	-	5		500	7	700	9	900	
IKP.2.5.1.3	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir	ruang	APBN	1	-	5		750	7	1.225	10	1.750	
IKP.2.5.1.4	Jumlah Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE	lembaga	APBN	3	-	10		100	20	20	30	45	
IKP.2.5.1.5	Jumlah Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD	lembaga	APBN	1	-	31		310	31	465	31	465	
IKP.2.5.1.6	Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba dan Apresiasi	dokumen	APBD	1	-	1		30	1	30	1	35	
IKP.2.5.1.7	Jumlah lembaga PAUD yang melaksanakan kurikulum 2013	lembaga	APBD	350	-	417		30	438	30	460	50	
IKP.2.5.1.8	Jumlah lembaga PAUD baru yang terbentuk	lembaga	APBD	350	-	417		30	438	30	460	50	
IKP.2.5.1.9	Jumlah ruang kelas PAUD yang dibangun	ruang	APBD	15	-	15		1.800	15	1.800	20	2.600	
IKP.2.5.1.10	Jumlah ruang kelas baru PAUD yang direhabilitasi	lembaga	APBD	7	-	7		525	7	525	10	850	





<b>SK.3.2017.3</b>	<b>Tersedianya layanan pendidikan SMP</b>												
IKK.3.2017.3.1	Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun	ruang	APBD	10		-	-		-	50	5.000	40	4.000
IKK.3.2017.3.2	Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi	ruang	APBD	20		-	-		-	100	5.000	40	2.000
IKK.3.2017.3.3	Jumlah RKB SMP yang dibangun	ruang	APBN	10		-	2		19.409	5	19.409	5	19.797
IKK.3.2017.3.4	Persentasi gedung SMP/MTs kondisi baik	%		70		-	87,00	83,84	96,37	90,00			
IKK.3.2017.3.5	Jumlah laboratorium IPA SMP yang dibangun	lab	BANPROP	10		-	13		1.170	13,00	1.170	13	1.170
IKK.3.2017.3.6	Jumlah laboratorium IPS SMP yang dibangun	lab	BANPROP	10		-	10		1.000	10	1.000	10	1.000
IKK.3.2017.3.7	Jumlah laboratorium Matematika SMP yang dibangun	lab	BANPROP	10		-	10		1.000	10	1.000	10	1.000
IKK.3.2017.3.8	Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun	lab	APBD	16		-	10,00		1.000	10,00	1.000	10	1.000
IKK.3.2017.3.9	Jumlah Penyediaan sarana prasarana sekolah	ruang	BANPROP	372		-	37		375	375,00	380	380,00	390
IKK.3.2017.3.10	Jumlah sekolah yang dapat pembangunan pagar halaman	sekolah	APBN	2		-	20		2.000	100	2.000	20	2.000
IKK.3.2017.3.11	Jumlah sekolah yang dapat pembangunan jamban	ruang	APBN	5		-	20		1.600	20,00	1.600	20	1.600
IKK.3.2017.3.12	Jumlah pengadaan mebelair SMP	ruang	BANPROP	15		-	10		300	10,00	300	10	300
IKK.3.2017.3.13	Jumlah guru SMP yang mengikuti pelatihan kurikulum 2013	guru	APBD	46		-	330		300	330,00	330	330	330
IKK.3.2017.3.14	Jumlah Alat laboratorium bahasa berbasis kumputer	sekolah	BANPROP	10		-	10		1.000	10	1.000	10	1.000
IKK.3.2017.3.15	Jumlah Alat laboratorium bahasa berbasis multimedia	sekolah	BANPROP	10		-	15		1.875	15	1.875	15	1.875
IKK.3.2017.3.16	Jumlah Alat peraga IPA, Matematika dan IPS)	sekolah	BANPROP	20		-	20		1.000	15	1.875	15	1.875
IKK.3.2017.3.17	Jumlah Alat peraga Olah Raga	sekolah	BANPROP	10		-	13		2.340	13,00	2.340	13,00	2.340
IKK.3.2017.3.18	Jumlah Alat peraga kesenian	sekolah	BANPROP	10		-	20		900	20,00	900	20,00	900
IKK.3.2017.3.19	Jumlah buku perpustakaan	sekolah	BANPROP	7.500		-	20		200	20,00	200	20,00	200
IKK.3.2017.3.20	Jumlah koleksi buku pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk jenjang SMP (banprop 2017)	siswa	APBD	31		-	540		1.618	540,00	12	540,00	12
IKK.3.2017.3.21	Jumlah Siswa SMP yang mengembangkan bakat dan berprestasi di bidang seni, olah raga dan sains	siswa	APBD	30		-	30		1.350	30	1.350	30	1.350
IKK.3.2017.3.22	Jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	sekolah	APBD	40		-	40		600	40	600	40	600

IKK.3.2017.3.23	Jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan akreditasi	sekolah	APBD	75		-	75			112	75	112	75	112
IKK.3.2017.3.24	Jumlah SMP yang mendapatkan ruang penunjang lainnya	sekolah	APBD	5		-	5			1.578	5	1.578	5	1.578
IKK.3.2017.3.25	Jumlah siswa SMP yang mengikuti pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	kegiatan	APBD	300		-	300			700	300	700	300	700
IKK.3.2017.3.26	Jumlah siswa SMP yang mengirimkan pemilihan duta sanitasi pelajar SMP	siswa	APBD	1		-	12			50	12	50	12	50
IKK.3.2017.3.27	Jumlah siswa SMP yang mengikuti penyelenggaraan Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (Galaksi) dan Pasangiri	siswa	APBD	80		-	80			75	80	75	90	100
IKK.3.2017.3.28	Jumlah sekolah SMP yang melaksanakan kegiatan TUB, UKS, SBL dan Bela Negara	kegiatan	APBD	1		-	4			550	4	550	4	550
IKK.3.2017.3.29	Jumlah ekolah SMP yang melaksanakan pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural	kegiatan	APBD	1		-	1			50	1	60	1	70
IKK.3.2017.3.30	Kegiatan Penyelenggaraan Expo Pendidikan	kegiatan	APBD	1	1,00	100,0	1			75	1	75	1	75
IKK.3.2017.3.31	Jumlah sekolah SMP yang Mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional	siswa	APBD	1		-	1			150	1	150	1	150
IKK.3.2017.3.32	Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	kegiatan		1		-	1			25	2	15	3	20
IKK.3.2017.3.33	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP	sekolah	APBD	1	1,00	100,0	181			20	185	20	188	21
IKK.3.2017.3.34	Jumlah siswa SMP penerima BOS	siswa	APBN	64.989	64.989,00	100,0	65.366			65.366	65.745	65.745	66.126	66.126
IKK.3.2017.3.35	Jumlah siswa SMP penerima bantuan melalui KIP/Bantuan Siswa Miskin (BSM)	siswa	APBN	15.632		-	15.650			6.260	15.700	6.280	15.750	6.300
IKK.3.2017.3.36	Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SMP	kegiatan	APBD	25		-	9			1.080	9	1.080	9	1.080
<b>04. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>														
SP.4.1	<b>Terciptanya keluasan dan pemerataan akses kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan.</b>													
SK.4.2017.1	<b>Meningkatnya Akses Pendidikan Kursus dan Pelatihan PNF</b>													
IKP.4.2017.1.1	AMH (Angka Melek Huruf)	%		97,50		-	98,48	91,14	92,55		99,46		100,00	
IKP.4.2017.1.2	Persentase Lulusan UN Pendidikan Kesetaraan	%		98,00		-	99,00				100,00		100,00	
IKP.4.2017.1.3	Nilai UNPK	nilai		6,00		-	6,00				6,20		6,40	

IKP.4.2017.1.4	Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang berkinerja Baik	%		50,00		-	50,00			50,00		50,00	
IKP.4.2017.1.5	Jumlah Lembaga PKBM	lembaga		10		-	10		60	10	60	10	60
IKP.4.2017.1.6	Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan Peningkatan dan Pembelajaran Pendidikan Non Formal	orang	APBD	25		-	25		50	25	50	25	50
IKP.4.2017.1.7	Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha	orang	APBD	20		-	20		46	20	46	20	46
IKP.4.2017.1.8	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	lembaga	APBD	5		-	5		25	5	25	5	25
<b>SP.4.2</b>	<b>Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan</b>												
<b>SK.4.2017.2.1</b>	<b>Meningkatnya Akses Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan PNF</b>												
IKP.4.2.1.1	jumlah Angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	orang	disdik	16.950		-	1.500		1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
IKP.4.2.1.3	Jumlah remaja dan orang dewasa yang belum lulus pendidikan menengah memperoleh kualifikasi setara pendidikan dasar dan menengah	orang	PNF	50		-	50		75	50	75	50	75
<b>SP.4.3</b>	<b>Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keluarga yang bermutu</b>												
<b>SK.4.3.1</b>	<b>Meningkatnya Akses Pendidikan Keluarga yang bermutu</b>												
IKP.4.3.1.1	Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga	lembaga	PNF	1		-	1		25	1	25	1	25
IKP.4.3.1.2	Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga	orang	PNF	25		-	25		25	25	25	25	25
IKK.4.8.1.1	Jumlah komite sekolah dan madrasah serta persatuan orangtua murid (POM) yang melaksanakan Sosialisasi pendidikan karakter dan budaya prestasi	komite	APBD	31		-	31		50	31	50	31	50
IKK.4.8.1.2	Jumlah lembaga/satuan pnf menyelenggarakan pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup	lembaga	APBD	10		-	10		250	10	250	10	250
<b>SP.4.4</b>	<b>Terwujudnya tatakelola dan partisipasi Pemerintah Daerah, Lembaga dan Masyarakat</b>												
<b>SK.4.4.1</b>	<b>Fasilitas, kompetensi SDM dan regulasi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya</b>												
IKP.4.4.1.1	Jumlah model/program PNF yang dibakukan dan diterapkan	lembaga	PNF	5		-	5		50	5	150	5	150

IKP.4.4.1.2	Jumlah Dokumen data dan informasi PNF	dokumen	PNF	3	-	3			75	1	20	1	20
IKP.4.4.1.3	Jumlah dokumen program dan anggaran Bidang PNF	dokumen	PNF	3	-	10			1	11	2	11	2
IKP.4.4.1.4	Jumlah Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Bidang PNF	dokumen	PNF	3	-	3			45	1	25	1	25
IKP.4.4.1.5	Jumlah dokumen hukum dan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan	dokumen	PNF	1	-	1			75	1	10	1	10
IKP.4.4.1.6	Jumlah dokumen kepegawaian dan pembinaan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan	dokumen	PNF	1	-	1			25	1	10	1	10
IKP.4.4.1.7	Jumlah Dokumen kerjasama, kehumasan, dan publikasi	dokumen	PNF	1	-	1			20	1	15	1	15
IKP.4.4.1.8	Jumlah SDM Bidang PNF meningkat kompetensi dan/atau kualitasnya	orang	PNF	10	-	10			5	60	120	60	120
IKP.4.4.1.9	Jumlah satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar dan lembaga PNF memperoleh penguatan kapasitas	lembaga	PNF	1	-	1			15	5	50	5	50
IKP.4.4.1.10	Jumlah dokumen Pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan	dokumen	PNF	1	-	1			30	1	10	1	10
<b>SP.4.5</b>	<b>Layanan pengkajian, pengembangan model/program, dan pemetaan mutu PNF</b>												
<b>SK.4.5.1</b>	<b>Fasilitas, kompetensi pendidik/tenaga kependidikan dan &amp; DIKMAS Model/Program, PNF yang bermutu</b>												
IKK.4.5.1.1	Jumlah Lembaga/satuan PNF yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan	lembaga	PNF	31	-	31			15	31	15	31	15
IKK.4.5.1.2	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	dokumen	PNF	1	-	1			25	1	25	1	25
IKK.4.5.1.3	Jumlah Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	dokumen	PNF	1	-	1			25	1	25	1	25
<b>SP.4.6</b>	<b>Penyediaan layanan kursus dan pelatihan</b>												
<b>SK.4.6.1</b>	<b>Fasilitas Kursus dan Pelatihan, kompetensi penyelenggara/ pendidik Kursus dan pelatihan, dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD)</b>												
IKK.4.6.1.1	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	orang	PNF	150	-	200			120	60	120	60	120

IKK.4.6.1.2	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/ berwirausaha	orang	PNF	150	-	200			150	60	150	60	150
IKK.4.6.1.3	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan rujukan	lembaga	PNF	5	-	35			100	10	100	10	100
IKK.4.6.1.4	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	lembaga	PNF	5	-	10			100	10	100	10	100
IKK.4.6.1.5	Jumlah jenis kompetensi kerja terstandarisasi nasional	lembaga	PNF	3	-	5			100	5	100	5	100
IKK.4.6.1.6	Jumlah tempat uji kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina	lembaga	PNF	1	-	2			20	4	20	4	20
IKK.4.6.1.7	Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi	orang	PNF	500	-	500			50	100	50	100	50
IKK.4.6.1.8	Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	lembaga	PNF	50	-	65			125	65	125	75	125
IKK.4.6.1.9	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	lembaga	PNF	50	-	65			75	65	75	75	75
IKK.4.6.1.10	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi	lembaga	PNF	50	-	50			30	50	30	60	30
IKK.4.6.1.11	Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	orang	PNF	100	-	20			25	5	25	5	25
IKK.4.6.1.12	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	dokumen	PNF	1	-	1			25	1	25	1	25
IKK.4.6.1.13	Jumlah Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	dokumen	PNF	1	-	1			25	1	25	1	25
<b>SP.4.7</b>	<b>Penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan</b>												
<b>SK.4.7.1</b>	<b>Fasilitas, kompetensi penyelenggara/pendidik dan regulasi/ kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD)</b>												
IKK.4.7.1.1	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	warga belajar	APBD	700	-	-				1.000	350	1.000	350
IKK.4.7.1.2	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pra paket A	warga belajar	APBD	100	-	200			75	200	100	200	100
IKK.4.7.1.3	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pra paket B	warga belajar	APBD	95	-	125			50	125	75	125	100
IKK.4.7.1.4	Jumlah warga belajar yang menyelenggaraan Paket B Pesantren Salafiah	warga belajar	APBD	25	-	25			45	50	50	50	60
IKK.4.7.1.5	Jumlah warga belajar penyelenggaraan Paket B Kelas Baru	warga belajar	APBD	125	-	125			150	80	160	100	200

IKK.4.7.1.6	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pra paket C	warga belajar	APBD	150	-	240	50	240	75	240	85
IKK.4.7.1.7	Jumlah peserta Ujian Nasional Paket A, B dan C	warga belajar	APBD	2	-	3	30	3	50	3	50
IKK.4.7.1.8	Jumlah warga belajar penyelenggaraan Paket C setara SMA Kelas Baru	warga belajar	APBD	180	-	180	272	200	300	225	350
IKK.4.7.1.9	Kegiatan pengembangan pendidikan kesetaraan Bintek Tutor Paket B dan Paket C	tutor	APBD	264	-	264	127	275	150	275	175
IKK.4.7.1.10	Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan	orang	APBD	60	-	60	138	60	138	60	138
IKK.4.7.1.11	Jumlah PKBM Memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM	warga belajar	APBD	10	-	10	850	10	850	10	850
IKK.4.7.1.12	Jumlah TBM memperoleh bantuan Sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat	TBM	APBD	5	-	5	125	5	125	5	125
IKK.4.7.1.13	Jumlah lembaga TBM baru yang dibentuk di satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar	TBM	APBD	2	-	2	100	2	100	2	100
IKK.4.7.1.14	Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran	SKB	APBD	1	-	1	85	1	85	1	85
IKK.4.7.1.16	Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, lomba dan apresiasi	dokumen	APBD	2	-	2	300	2	300	2	300
IKK.4.7.1.17	Kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan Lomba PTK PNF	kegiatan	APBD	1	-	1	75	1	75	1	100
IKK.4.7.1.18	Kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan Pameran Kursus	kegiatan	APBD	1	-	1	100	1	100	1	125
<b>05. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>											
<b>SP.5.1</b>	<b>Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUD</b>										
<b>SK.5.1.1</b>	<b>Terwujudnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUD yang bermutu</b>										
IKP.5.1.1.1	Prosentase Guru bersertifikat pendidik	%	PAUD	85,00	-	85,00		95,00		100,00	
IKP.5.1.1.2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik	%	PAUD	100,00	-	100,00		100,00		100,00	
IKP.5.1.1.3	Nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan	nilai	PAUD	58,00	-	58,00		59,00		80,00	

IKP.5.1.1.4	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosial)	%	PAUD	70,00	-	70,00				75,00		80,00	
<b>SP.5.2</b>	<b>Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dikdas</b>												
<b>SK.5.2.1</b>	<b>Terwujudnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang bermutu</b>												
IKP.5.2.1.1	Prosentase guru SD kualifikasi S.1/D.IV	%		97,27	-	98,27	89,29	90,86		98,27		99,27	
IKP.5.2.1.2	Prosentase guru SMP kualifikasi S.1/D.IV	%		86,46	-	87,86	91,04	103,62		86,46		89,32	
IKP.5.2.1.1	Prosentase guru SD kualifikasi S.2/S.3	%		97,27	-	8,00	1,86	23,25		10,00		99,27	
IKP.5.2.1.2	Prosentase guru SMP kualifikasi S.2/S.3	%		86,46	-	15,00	5,19	34,60		20,00		89,32	
IKP.5.2.1.3	Persentase guru sertifikasi jenjang SD	%		87,33	-	87,89	87,33	99,36		88,33		88,45	
IKP.5.2.1.4	Persentase guru sertifikasi jenjang SMP	%		86,46	-	87,86	86,46	98,41		86,46		89,32	
IKP.5.2.1.5	Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	kegiatan	APBD	24	-	-			-	100	50	100	75
IKP.5.2.1.6	Jumlah guru yang melaksanakan Uji Kompetensi Guru dan Penilaian Kinerja kepala Sekolah Dasar	guru	APBD	40	-	1.000			72	1.500	100	1.750	150
IKP.5.2.1.7	Jumlah guru yang mendapatkan Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional SD	guru	APBD	300	-	300			49	250	75	300	100
IKP.5.2.1.8	Kegiatan yang mendapat dukungan Pelaksanaan Pemilihan Tenga Fungsional dan Komite Sekolah SD Berprestasi	kegiatan	APBD	25	-	93			20	93	50	93	75
IKP.5.2.1.9	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dan Pengawas SD	orang	APBD	100	-	100			800	100	800	330	2.640
IKP.5.2.1.10	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang memiliki indeks kinerja minimal baik	%	SD	60,00	-	60,00			60	65,00	60	70,00	60
IKP.5.2.1.11	Nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SD	nilai	SD	70,00	-	70,00			70	75,00	70	80,00	70
IKP.5.2.1.12	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosial)	%	SD	70,00	-	70,00			70	75,00	70	80,00	70
IKP.5.2.1.13	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus (Inklusi)	%	SD	2	-	2,00			20	2,50	20	3,00	20
<b>SP.5.3</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan dan kualitas PTK PAUD yang merata.</b>												
<b>SK.5.3.1</b>													
IKP.5.3.1.1	Persentase PTK PAUD berkualifikasi S1/D4	%	PAUD	21,87	-	28,87				33,87		39,87	

IKP.5.3.1.2	Persentase PTK PAUD memperoleh peningkatan kompetensi	%	PAUD	50,00	-	52,55			54,55		56,55	
IKP.5.3.1.3	Persentase PTK PAUD memperoleh penghargaan dan perlindungan	%	PAUD	35,00	-	2,00			54,55		56,55	
IKP.5.3.1.4	Persentase PTK PAUD yang meningkat karirnya	%	PAUD	50,00	-	5,00			10,00		15,00	
IKP.5.3.1.5	Persentase PAUD yang memiliki PTK sesuai dengan SNP	%	PAUD	35,00	-	5,00			10,00		15,00	
<b>SP.5.4</b>	<b>Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD</b>											
<b>SK.5.4.1</b>	<b>Meningkat ketersediaan, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraannya dalam rangka penguatan peran strategis untuk mewujudkan revolusi mental</b>											
IKK.5.4.1.1	Jumlah pengawas yang bersertifikat pendidik	pengawas	APBN	163	-	7		3.495	8	3.495	9	3.495
IKK.5.4.1.2	Jumlah guru TK/TPA/KB memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4	guru	APBN	45	-	45		1.575	47	1.575	50	1.575
IKK.5.4.1.3	Jumlah Guru TK penerima tunjangan profesi	guru	APBN	149	-	214		7.718	264	952	314	1.131
IKK.5.4.1.4	Jumlah Guru TK/TKLB penerima tunjangan Profesi guru bukan PNS	guru	APBN	173	-	193		3.474	393	707	593	1.067
IKK.5.4.1.5	Jumlah Guru TK/TKLB penerima tunjangan fungsional guru bukan PNS	guru	APBN	87	-	90		324	120	432	150	540
IKK.5.4.1.6	Kegiatan dukungan Manajemen Pelaksanaan Pembinaan Guru dan Tendik PAUD	kegiatan	APBD	120	-	120		160	125	168	130	176
<b>SP.5.5</b>	<b>Pembinaan Guru Pendidikan Dasar</b>											
<b>SK.5.5.1</b>	<b>Meningkatnya profesionalisme Guru Pendidikan Dasar</b>											
IKK.5.8.1.1	Jumlah guru Sekolah Dasar (SD) yang bersertifikat pendidik	guru	APBN	4.251	-	4.251		-	4.251	-	4.251	-
IKK.5.8.1.2	Jumlah Guru SD yang menerima tunjangan profesi tambahan (Tamsil)	guru	APBN	335	-	335		-	335	-	335	-
IKK.5.8.1.3	Jumlah guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersertifikat pendidik	guru	APBN	1.086	-	1.086		-	1.086	-	1.086	-
IKK.5.8.1.4	Jumlah Guru Dikdas yang menerima tunjangan profesi guru bukan PNSD	guru	APBN	205	-	205		-	205	-	205	-
IKK.5.8.1.5	Jumlah Guru SMP yang menerima tunjangan profesi tambahan (Tamsil)	guru	APBN	77	-	77		-	77	-	77	-
IKK.5.8.1.6	Jumlah Guru Dikdas yang menerima tunjangan fungsional guru bukan PNS	guru	APBD	314	-	314		-	314	-	314	-
IKK.5.8.1.7	Jumlah Guru Dikdas dalam jabatan berkualifikasi akademik S-1/D-4	guru	APBD	660	-	660		-	660	-	660	-

<b>SP.5.9</b>	<b>Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya</b>													
<b>SK.5.9.1</b>	<b>Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya</b>													
IKK.5.9.1.1	Jumlah guru yang berkompeten bidang TK/PLB	orang	disdik	215	-	249				262			275	
IKK.5.9.1.2	Jumlah guru yang berkompeten bidang IPA	orang	disdik	170	-	170				180			190	
IKK.5.9.1.3	Jumlah guru yang berkompeten bidang IPS dan Kewarganegaraan	orang	disdik	200	-	200				250			260	
IKK.5.9.1.4	Jumlah guru yang berkompeten bidang Matematika	orang	disdik	211	-	211				235			245	
IKK.5.9.1.5	Jumlah guru yang berkompeten bidang Penjas dan BK	orang	disdik	122	-	122				142			155	
IKK.5.9.1.6	Jumlah guru yang berkompeten bidang Bahasa	orang	disdik	356	-	356				365			380	
IKK.5.9.1.7	Jumlah guru yang berkompeten bidang Seni dan Budaya	orang	disdik	31	-	31				50			55	
IKK.5.9.1.8	Jumlah pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah yang kompeten	orang	disdik	4	-	4				5			6	
IKK.5.9.1.9	Nilai rata-rata UKG Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	nilai	disdik	6,00	-	6,50				7,00			7,50	
<b>06. ROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>														
<b>SP.6.1</b>														
<b>SK.6.1.1</b>	<b>Pelayanan Prima penunjang fungsi pendidikan</b>													
IKP.6.1.1.1	PAUD terakreditasi	%	disdik	20,00	-	24,71	5,70	23,07		29,42			34,13	
IKP.6.1.1.1	SD terakreditasi	%	disdik	84,03	-	65,00	11,20	17,23		84,17			84,24	
IKP.6.1.1.2	SMP terakreditasi	%	disdik	86,00	-	83,45	79,37	95,11		86,39			86,52	
<b>SK.6.1.2</b>	<b>Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan</b>													
IKK.6.1.2.1	Persentase TK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	disdik	40,00	-	40,00				45,00			50,00	
IKK.6.1.2.2	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	disdik	65,00	-	65,00				70,00			75,00	
IKK.6.1.2.3	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	disdik	65,00	-	65,00				70,00			75,00	
IKK.6.1.2.4	Jumlah layanan pengendalian internal yang berfungsi dengan baik	%	disdik	20,00	-	20,00				25,00			52,00	
IKK.6.1.2.5	Kegiatan yang mendapat dukungan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	kegiatan	APBD	1	-	1			75	1	75	1	80	

IKK.6.1.2.6	Jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah	aplikasi	APBD	1	-	1	190	25	50	52	55
IKK.6.1.2.7	Kegiatan yang mendapat dukungan Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK),	kegiatan	APBD	1.095	-	1.095	150	1.095	150	1.095	150
IKK.6.1.2.8	Kegiatan Penataan Asset Milik Daerah	kegiatan	APBD	1	-	1	100	1	100	1	125
IKK.6.1.2.9	Jumlah Pengadaan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik	exemplar	APBD	1	-	1	500	1	500	1	500
IKK.6.1.2.10	Jumlah orang yang mengikuti Bintel sistem aplikasi dapodik bagi operator	orang	APBD	1.085	-	1.085	126		130		135
IKK.6.1.2.11	Kegiatan Penyelenggaraan Bintel dan sosialisasi implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kegiatan	APBD	1	-	1	100	1	100	1	150
IKK.6.1.2.12	Jumlah sekolah yang dimonitoring, Evaluasi dan Pelaporan	sekolah	APBD	1	-	1	50	1,00	75	1	100
IKK.6.1.2.13	Jumlah guru SD yang menyelenggarakan diseminasi DBE3-USAID Prioritas	orang	APBD	250	-	250	200	300	300	350	350
IKK.6.1.2.14	Kegiatan penyusunan dokumen Peraturan Perundang-undangan tentang sarpras pendidikan	kegiatan	APBD	1	-	1	90	1	90	1	100
IKK.6.1.2.15	Jumlah siswa yang mengikuti lomba-lomba Penyelenggaraan Olimpiade Sains Tk. Kabupaten Indramayu	siswa	APBD	1.350	-	1.350	100	1.400	105	1.410	110
IKK.6.1.2.16	Jumlah siswa yang mengikuti Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Kabupaten, Wilayah III dan Propinsi	siswa	APBD	80	-	80	150	85	155	85	155
IKK.6.1.2.17	Kegiatan penyelenggaraan Pengembangan dan Pembinaan Kesiswaan	kegiatan	APBD	1.593	-	1.593	300	1.600	300	1.600	300
IKK.6.1.2.18	Kegiatan penyelenggaraan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS dan SBL)	kegiatan	APBD	186	-	186	300	186	300	186	300
IKK.6.1.2.19	Kegiatan Penyelenggaraan TUB dan Paskibra Kabupaten Indramayu	kegiatan	APBD	188	-	188	550	188	600	188	600
IKK.6.1.2.20	Kegiatan operasional Penyelenggaraan Penunjang Tunjangan Tambahan dan Profesi Guru	kegiatan	APBD	1.241	-	1.241	43	1.241	45	1.241	45
IKK.6.1.2.21	Kegiatan operasional Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Pusat)	kegiatan	APBD	1.070	-	1.070	66	1.070	70	1.070	70
IKK.6.1.2.22	Pelatihan peningkatan kompetensi guru	kegiatan	APBD	250	-	250	200	250	200	250	200

IKK.6.1.2.23	Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan serta Koordinasi lintas sektoral bidang pendidikan	sekolah	APBD	25	-	25	25	25	50	52	55
IKK.6.1.2.24	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Gerakan Membiasakan Budaya Membaca 15 menit setiap hari	sekolah	APBD	20	-	20	40	25	50	52	55
IKK.6.1.2.25	Jumlah Forum Koordinasi Komite Sekolah (FKKS)	unit	APBD	31	-	31	50	31	60	31	70
<b>07. PROGRAM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS</b>											
<b>SP.7.1</b>	<b>Terselenggaranya sistem perencanaan yang andal</b>										
<b>SK.7.1.1</b>											
IKP.7.1.1.1	Jumlah PKBM yang menyelenggarakan Pendidikan Ketrampilan bagi anak yang termarginalkan dan terlantar	orang	APBD	120	-	120	140	150	150	275	175
<b>SP.7.2</b>	<b>Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus</b>										
<b>SK.7.2.1</b>	<b>Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan PLK</b>										
IKK.7.2.1.1	Jumlah siswa /anak berkebutuhan khusus penerima bantuan atau beasiswa	siswa	APBD	25	-	25	25	25	25	25	25
IKK.7.2.1.2	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB/SM Inklusi/SM Cibi/SM keberbakatan yang menerima BOS	siswa	APBD	25	-	25	25	25	25	25	25
IKK.7.2.1.3	Jumlah pusat pengembangan PKLK yang dibangun	lembaga	APBD	1	-	1	100	1	100	1	100
IKK.7.2.1.4	Jumlah ruang kelas SDLB/SMPLB/SMLB/ SLB yang direhabilitasi	ruang	APBD	5	-	5	500	5	500	5	500
IKK.7.2.1.5	Jumlah sentra/sub sentra/SLB pembina yang direhabilitasi	lembaga	APBD	3	-	3	75	3	75	3	75
IKK.7.2.1.6	Jumlah unit SDLB/SMPLB/SMLB baru yang dibangun	sekolah	APBD	1	-	1	500	1	500	1	500
IKK.7.2.1.7	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	ruang	APBD	5	-	5	500	5	500	5	500
IKK.7.2.1.8	Jumlah asrama siswa yang dibangun	asrama	APBD	1	-	1	500	1	500	1	500
IKK.7.2.1.9	Jumlah paket layanan pendidikan pada SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB yang melaksanakan kurikulum yang berlaku	sekolah	APBD	5	-	5	50	5	50	5	50
IKK.7.2.1.10	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber	sekolah	APBD	5	-	5	250	5	250	5	250

IKK.7.2.1.11	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan Ruang Laboratorium/ Praktik Siswa	sekolah	APBD	3	-	3	300	3	300	3	300
IKK.7.2.1.12	Jumlah sekolah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan peralatan pendidikan	sekolah	APBD	5	-	5	500	5	500	5	500
IKK.7.2.1.13	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan ruang penunjang lainnya	sekolah	APBD	3	-	3	300	3	300	3	300
IKK.7.2.1.14	Jumlah sekolah berwawasan pendidikan inklusif	sekolah	APBD	5	-	5	50	5	50	5	50
IKK.7.2.1.15	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan pembinaan akreditasi menuju SSN	sekolah	APBD	5	-	5	30	5	30	5	30
IKK.7.2.1.16	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	sekolah	APBD	3	-	3	50	3	50	3	50
IKK.7.2.1.17	Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis PKLK	kegiatan	APBD	5	-	5	50	5	50	5	50
IKK.7.2.1.18	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB yang menerapkan pendidikan karakter	sekolah	APBD	5	-	5	50	5	50	5	50
<b>8. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN LAINNYA</b>											
<b>SP.8.1</b>	<b>Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya</b>										
<b>SK.8.1.1</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan data pokok dan statistik pendidikan</b>										
IKP.8.8.1.1	Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan	%	disdik	90	-	90		92,70		95,48	
IKP.8.8.1.2	Persentase penyebaran hasil pendayagunaan data dan statistik	%	disdik	90	-	90		92,70		95,48	
IKP.8.8.1.3	Persentase terintegrasinya pendataan pusat dan daerah	%	disdik	94	-	94		96,82		99,72	
<b>SK.8.8.2</b>	<b>Penyediaan data dan statistik pendidikan</b>										
IKK.8.8.2.1	Persentase satuan pendidikan dan proses pembelajaran yang tervalidasi dalam data warehouse	%	disdik	90,00	-	90,00		92,70		95,48	
IKK.8.8.2.2	Persentase tersedianya data referensi pendidikan	%	disdik	90,00	-	90,00		92,70		95,48	
IKK.8.8.2.3	Persentase peserta didik dan PTK yang tervalidasi dalam data warehouse	%	disdik	90,00	-	90,00		92,70		95,48	
IKK.8.8.2.4	Persentase UPT pendidikan yang telah mengimplementasikan sistem verval referensi pendidikan	%	disdik	90,00	-	90,00		92,70		95,48	
IKK.8.8.2.5	Persentase UPT pendidikan terkoordinasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan	%	disdik	90,00	-	90,00		92,70		95,48	

IKK.8.8.2.6	Persentase UPT yang telah terintegrasi dengan backbone pengelolaan data pendidikan Kemendikbud	%	disdik	90,00		-	90,00				92,70		95,48	
IKK.8.8.2.7	Persentase kesesuaian laporan keuangan dengan peraturan perundangundangan	%	disdik	90,00		-	90,00				92,70		95,48	
IKK.8.8.2.10	Jumlah satuan pendidikan dalam rangka pelayanan data dan statistik pendidikan	lembaga	disdik	1.095		-	1.095				1.097		1.100	
IKK.8.8.2.12	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan kepegawaian	dokumen	disdik	1		-	1				1		1	
<b>SK.8.8.3</b>	<b>Terlaksananya pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</b>													
IKK.8.8.3.1	Persentase arsip dan dokumentasi terintegrasi dengan Kantor arsip dan dokumentasi Pemerintah Daerah	%	disdik	90,00		-	90,00				92,70		95,48	
IKK.8.8.3.2	Jumlah satuan pendidikan yang terkoneksi jaringan online	lembaga	disdik	1.095		-	1.095				1.097		1.100	
IKK.8.8.3.3	Jumlah pegawai yang SDM terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK	lembaga	disdik	1.095		-	1.095				1.097		1.100	
IKK.8.8.3.4	Jumlah pengaduan masyarakat dari pemangku kepentingan pendidikan	dokumen	disdik	5		-	5				5		5	
<b>SK.8.8.4</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan Komunikasi dan layanan masyarakat</b>													
IKP.8.8.4.1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Pendidikan	indeks	disdik	sedang			sedang				sedang		baik	
IKP.8.8.4.2	Persentase pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat dan efektif	%	disdik	5,00		-	5,00				5,00		5,00	
<b>SK.8.8.5</b>	<b>Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai</b>													
IKP.8.8.5.1	Jumlah aparatur Dinas Pendidikan yang mengikuti diklat jabatan, teknis, dan fungsional	orang	disdik	90,00		-	90,00				92,70		95,48	
IKP.8.8.5.2	Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	%	disdik	90,00		-	90,00				92,70		95,48	
<b>SK.8.8.6</b>	<b>Peningkatkan layanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum</b>													
IKK.8.8.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	%	APBD	12		-	12		200		12	200	12	200
IKK.8.8.6.2	Pengadaan alat tulis kantor, Barang cetakan dan penggandaan	%	APBD	12		-	12			241	12	241	12	241

IKK.8.8.6.3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%	APBD	12	-	12	20	12	20	12	20
IKK.8.8.6.4	Penyediaan makanan dan minuman	%	APBD	12	-	12	110	12	110	12	110
IKK.8.8.6.5	Rapat-rapat koordinasi/konsultasi/ kunjungan ke dalam dan luar daerah	%	APBD	12	-	12	350	12	350	12	350
<b>SK.8.8.7</b>	<b>Tercapainya Peningkatkan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan</b>										
IKK.8.8.7.1	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	paket	APBD	6	-	6	25	6	25	6	25
IKK.8.8.7.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	APBD	3	-	3	106	3	106	3	106
IKK.8.8.7.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/mobil jabatan	unit	APBD	15	-	15	95	15	95	15	95
IKK.8.8.7.4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	paket	APBD	1	-	1	49	1	49	1	49
IKK.8.8.7.5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	%	APBD	3	-	3	1.400	3	1.400	3	1.400
<b>SK.8.8.8</b>	<b>Peningkatan pelayanan prima bidang pengelolaan anggaran dan akuntabilitas</b>										
IKK.8.8.8.1	Persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan	%	disdik	85,00	-	85,00		87,00		89,00	
IKK.8.8.8.2	Persentase Sekretariat/Bidang yang laporan Keuangannya sesuai dengan peraturan perundangan	%	disdik	85,00	-	85,00		87,00		89,00	
IKK.8.8.8.3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	kegiatan	APBD	12	-	12	53	12	55	12	60
IKK.8.8.8.4	Skor kualitas LAKIP Dinas Pendidikan menurut penilaian Pemerintah Daerah	indeks	APBD	7,00	-	7,00		7,30		7,50	
<b>SP.8.2</b>	<b>Peningkatan efektivitas pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara</b>										
<b>SK.8.2.1</b>	<b>Tercapainya peningkatan efektivitas pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN)</b>										
IKK.8.2.1.1	Persentase standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan	%	disdik	90,00	-	90,00		92,70		95,48	
IKK.8.2.1.2	Persentase pegawai yang telah melaksanakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	%	disdik	100,00	-	100,00		100,00		100,00	
IKK.8.2.1.3	Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai	%	disdik	80,00	-	80,00		85,00		87,00	
IKK.8.2.1.4	Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu	%	disdik	90,00	-	90,00		92,70		95,48	
IKK.8.2.1.5	Persentase pegawai dengan kinerja minimal "baik"	%	disdik	90,00	-	90,00		92,70		95,48	

IKK.8.2.1.6	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi	%	disdik	90,00		-	90,00				92,70		95,48
IKK.8.2.1.7	Persentase pencapaian target kinerja program	%	disdik	90,00		-	90,00				92,70		95,48
<b>SP.8.3</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan</b>												
SK.8.3.1	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai	kegiatan	disdik	1		-	1				1		1
IKK.8.3.1.1	Jumlah aparatur Dinas Pendidikan yang mengikuti Diklat jabatan, teknis dan fungsional	orang	disdik	5		-	5				5		5
IKK.8.3.1.2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	kegiatan	disdik	1.095		-	1.095				1.095		1.095
IKK.8.3.1.3	Meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan	kegiatan	disdik	1.095		-	1.095				1.095		1.095
<b>SK.8.3.2</b>	<b>Penilaian Kinerja Dinas Pendidikan</b>												
IKK.8.3.2.1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan	%	disdik	1.095		-	1.095				1.095		1.095
IKK.8.3.2.2	Nilai Minimal LAKIP Dinas Pendidikan pada tahun 2021	%	disdik	71		-	71				76		79
IKK.8.3.2.3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	opini	BPK	sedang			sedang				baik		baik
IKK.8.3.2.4	Opini Inspektorat terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	opini	Inspektora t	baik			baik				baik		baik
	JUMLAH									260.583		259.364	267.626

**(REVISI)**

2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
11	12	13	14	15	16
baik		baik		baik	
75/91		76/93		76/93	-
baik		baik		baik	-
225		250		250	
93,79		99,42		99,42	
54,70		57,43		57,43	-
483		507		507	-
445		467		467	
118,97		119,09		119,09	-
104,05		105,09		105,09	-
86,83		86,91		86,91	-
83,27		84,10		84,10	-
72,45		76,07		76,07	-
87,26		88,57		88,57	-
58,00		60,00		60,00	-
93,79		99,42		99,42	-

78,00		80,00		80,00	-
75,00		80,00		80,00	-
1.692		1.701		1.701	-
360		450		450	-
1.692		1.701		1.701	-
91,50		96,07		96,07	-
1.095		1.095		1.095	-
1.692		1.701		1.701	-
100,00		100,00		100,00	-
110		120		120	-
140		146		146	-
8,55		9,00		9,00	-
175		200		200	-
19,56		20,55		20,55	-
<b>93,66</b>		<b>98,41</b>			
350		400			
84,30		88,57		88,57	-

93,66		98,41		98,41	-
15,00		20,00		20,00	-
1.084		1.084		1.084	-
381		386		386	-
7.343		7.453		7.453	-
54,70		57,43		57,43	-
48,62		51,05		51,05	-
445		467		467	-
73		77		77	-
6		7		7	-
483		507		507	-
20,00		21,00		21,00	-
728		813		813	-
39,87		46,87		46,87	-
67,84		73,84		73,84	-

67,74		73,74		73,74	-
58,55		60,55		60,55	-
46,87		46,87		46,87	-
58,55		60,55		60,55	-
42,00		47,00		47,00	-
32,00		37,00		37,00	-
1/4		1/4		1/4	-
3	75	3	75	15	375
3	60	3	60	15	300
3	45	3	45	15	225
3	50	3	50	15	250
1	75	1	75	5	375
1	30	1	30	5	150
10	50	10	50	50	250
1	30	1	30	5	150

60	70	60	75	300	295
1	60	1	60	5	300
1	60	1	60	5	300
1	60	1	60	5	300
1	60	1	60	5	300
1	60	1	60	5	300
1	60	1	60	5	300
882	16.954	868	16.674	882	79.796
10	1.000	15	1.500	46	4.600
12	2.100	15	3.000	49	8.825
50	75	70	140	180	380
31	620	31	775	155	2.635
1	35	6	40	10	170
483	50	459	50	483	210
483	50	459	50	483	210
25	3.250	30	3.250	105	12.700
15	1.275	20	1.275	59	4.450

25	275	30	300	105	3.795
25	2.125	30	3.000	105	9.075
25	3.250	30	4.050	105	13.500
440	450	459	500	440	2.050
110	75	115	100	110	340
7	75	7	100	31	350
2	2.148	2	2.148	7	7.518
100,00		100,00		100,00	
100,00		100,00		100,00	
121,51		122,41		122,41	
98,48		101,48		101,48	
100,00		100,00		100,00	
96,00		100,00		100,00	
0		0		0	-
0,07		0,06		0,06	100
100,00		100,00		100,00	-
100,00		100,00		100,00	100
100,00		100,00		100,00	100
192		192		192	100
384		384		384,00	100
20		20		20	100
20		20		20,00	100
32		32		32	100
32		32		32,00	100
32		32		32	100
32		32		32,00	100
78,00	-	80,00		80,00	77
75,00		80,00		80,00	100

40	4.000	40	4.000	212	23.100
40	2.000	40	2.000	360	20.100
145	16.000	150	18.000	670	70.465
30	5.000	20	4.000	140	22.100
29.000	300	29.500	300	143.665	1.150
350	7.000	400	7.500	1.419	32.984
10	2.500	10	2.750	40	9.500
75	80	100	100	316	2.692
111	100	117	125	432	350
50	4.000	50	4.000	236	15.189
178	350	178	350	1.062	6.426
898	150	900	175	4.480	550
2.588	900	2.588	1.000	8.052	3.450
110	110	116	120	531	485
7	150	7	175	35	600
-	-	-	-	160.007	-
101.750	45.788	102.340	48.077	505.834	229.649
898	100	900	125	4.480	400

30	3.000	30,00	3.000	150	15.000
40	2.000	40	2.000	220	11.000
5	20.193	5		22	78.808
13	1.170	13	1.170	65	5.850
10	1.000	10	1.000	50	5.000
10	1.000	10	1.000	50	5.000
30	3.000	30	3.000	90	9.000
390,00	400	400,00	405	1.582	1.950
20	2.000	20	2.000	180	10.000
20	1.600	20	1.600	100	8.000
10	300	10	300	50	1.500
200	200	100	100	1.290	1.260
30	3.000	30	3.000	90	9.000
15	1.875	15	1.875	75	9.375
15	1.875	15	1.875	80	8.500
13,00	2.340	13,00	2.340	65	11.700
10,00	200	10,00	200	80	3.100
20,00	200	20,00	200	100	1.000
540,00	12	540,00	12	2.700	1.666
30	1.350	30	1.350	150	6.750
40	600	40	600	200	3.000

75	112	75	112	375	560
5	1.578	5	1.578	25	7.890
300	700	300	700	1.500	3.500
12	50	12	50	60	250
90	100	100	125	440	475
4	550	4	550	20	2.750
1	80	1	90	5	350
1	75	1	75	5	475
1	150	1	150	5	750
4	25	4	25	14	110
192	21	196	22	942	205
66.510	66.510	66.896	66.896	330.643	330.743
15.800	6.320	15.850	6.340	78.750	31.500
9	1.080	9	1.080	45	5.400
100,00		100,00		100,00	-
100,00		100,00		100,00	-
6,60		6,80		6,80	-

75,00		80,00		80,00	-
10	70	10	70,00	50	320
25	50	25	50,00	125	250
20	46	20	46	100	230
5	25	5	25,00	25	125
1.500	1.000	1.500	<b>1.000</b>	1.500	5.000
50	75	50	75	250	375
1	25	1	25	5	125
25	25	25	25	125	125
31	50	31	50	155	250
10	250	10	250	50	1.250
5	150	5	150	25	650

1	20	1	20	7	155
12	2	12	2	56	9
1	25	1	25	7	145
1	10	1	10	5	115
1	10	1	10	5	65
1	15	1	15	5	80
60	120	60	120	250	485
5	50	5	50	21	215
1	10	1	10	5	70
31	15	31	15	155	75
1	25	1	25	5	125
1	25	1	25	5	125
60	120	60	120	440	600

60	150	60	150	440	750
10	100	10	100	75	500
10	100	10	100	50	500
5	100	5	100	25	500
4	20	4	20	18	100
100	50	100	50	900	250
75	125	100	125	380	625
75	75	100	75	380	375
70	30	70	30	300	150
5	25	5	25	40	125
1	25	1	25	5	125
1	25	1	25	5	125
1.000	350	1.000	350	4.000	1.400
200	100	200	100	1.000	475
125	100	125	100	625	425
50	70	50	80	225	305
100	200	100	200	505	910

240	95	240	105	1.200	410
3	50	3	50	15	230
250	375	275	400	1.130	1.697
275	200	275	225	1.364	877
60	138	60	138	300	690
10	850	10	850	50	4.250
5	125	5	125	25	625
2	100	2	100	10	500
1	85	1	85	5	425
2	300	2	300	10	1.500
1	100	1	125	5	475
1	150	1	175	5	650
100,00		100,00		100,00	-
100,00		100,00		100,00	-
81,00		85,00		85,00	-

85,00		90,00		90,00	-
99,77		99,77		99,77	-
90,78		90,78		90,78	-
99,77		99,77		99,77	-
90,78		90,78		90,78	-
89,01		89,01		89,01	-
90,78		90,78		90,78	-
100	100	125	150	425	375
200	175	1.500	300	5.950	797
350	125	1.500	250	2.700	599
100	100	93	150	472	395
50	400	50	400	630	5.040
75,00	60	80,00	300,00	350	540
85,00	70	90,00	350,00	400	630
85,00	70	90,00	350,00	400	630
3,50	20	4,00	82,00	15	162
46,87		46,87		46,87	-

58,55		60,55		60,55	-
58,55		60,55		60,55	-
20,00		25,00		25,00	-
20,00		25,00		25,00	-
10	3.495	10	3.495	44	17.475
52	1.575	55	1.575	249	7.875
364	1.312	414	1.493	1.570	12.606
793	1.427	993	1.787	2.965	8.462
180	648	210	756	750	2.700
135	185	140	194	650	883
4.251	-	4.251	4.251	4.251	4.251
335	-	335	335	335	335
1.086	-	1.086	1.086	1.086	1.086
205	-	205	205	1.025	205
77	-	77	77	385	77
314	-	314	314	314	314
660	-	660	660	660	660

224		220		220	-
195		200		200	-
280		300		300	-
250		280		280	-
165		175		175	-
385		390		390	-
60		70		70	-
7		8		8	-
8,00		8,00		8,00	-
38,84		43,55		43,55	-
84,31		84,38		84,38	-
86,65		86,78		86,78	-
					#VALUE!
55,00		60,00		60,00	-
80,00		85,00		85,00	-
80,00		85,00		85,00	-
30,00		32,00		32,00	-
1	85	1	90	5	405

30	60	32	65	139	420
1.095	150	1.095	150	1.095	750
1	130	1	135	5	590
1	500	1	500	5	2.500
	140		150	1.085	681
1	150	1	170	5	670
1	125	1	150	5	500
400	450	500	500	1.800	1.800
1	100	1	100	5	480
1.415	115	1.420	120	1.415	550
90	160	90	160	430	780
1.625	310	1.625	310	8.043	1.520
186	300	186	300	186	1.500
188	600	188	600	188	2.950
1.241	45	1.241	45	1.241	223
1.070	70	1.070	70	1.070	346
250	200	250	200	1.250	1.000

30	60	32	65	30	255
30	60	32	65	30	270
31	80	31	90	31	350
300	200	450	250,00	1.295	915
25	25	25	25	125	125
25	25	25	25	125	125
1	100	1	100	5	500
5	500	5	500	25	2.500
3	75	3	75	15	375
1	500	1	500	5	2.500
5	500	5	500	25	2.500
1	500	1	500	5	2.500
5	50	5	50	25	250
5	250	5	250	25	1.250

3	300	3	300	15	1.500
5	500	5	500	25	2.500
3	300	3	300	15	1.500
5	50	5	50	25	250
5	30	5	30	25	150
3	50	3	50	15	250
5	50	5	50	25	250
5	50	5	50	25	250
98,35		100,00		100,00	-
98,35		100,00		100,00	-
100,00		100,00		100,00	-
98,35		100,00		100,00	-
98,35		100,00		100,00	-
98,35		100,00		100,00	-
98,35		100,00		100,00	-
98,35		100,00		100,00	-

98,35		100,00		100,00	-
98,35		100,00		100,00	-
1.105		1.110		1.110	-
1		1		1	-
98,35		100,00		100,00	-
1.105		1.110		1.110	-
1.105		1.110		1.110	-
5		5		5	-
baik		baik		baik	#VALUE!
5,00		5,00		5,00	-
98,35		100,00		100,00	-
98,35		100,00		100,00	-
12	200	12	200	60	1.000
12	241	12	241	60	1.205

12	20	12	20	60	100
12	110	12	110	60	550
12	350	12	350	60	1.750
6	25	6	25	30	125
3	106	3	106	15	530
15	95	15	95	75	475
1	49	1	49	5	245
3	1.400	3	1.400	15	7.000
91,00		93,00		93,00	-
91,00		93,00		93,00	-
12	65	12	70	60	303
7,70		7,90		7,90	-
98,35		100,00		100,00	-
100,00		100,00		100,00	-
90,00		95,00		95,00	-
98,35		100,00		100,00	-
98,35		100,00		100,00	-

98,35		100,00		100,00	-
98,35		100,00		100,00	-
1		1		5	-
5		5		25	-
1.095		1.095		1.095	-
1.095		1.095		1.095	-
1.095		1.095		1.095	-
82		85		85	-
baik		baik		baik	#VALUE!
baik		baik		baik	#VALUE!
	274.580		271.271		#VALUE!